

Jejak Jurnalis Perempuan

PEMETAAN KONDISI KERJA JURNALIS PEREMPUAN DI INDONESIA

Jejak Jurnalis Perempuan

PEMETAAN KONDISI KERJA JURNALIS PEREMPUAN DI INDONESIA

Design penelitian: **Ignatius Haryanto dan Luviana**

Penulis: **Luviana**

Editor: **Mariana Amiruddin**

Penyelaras Akhir: **Rach. Alida Bahaweres**

Peneliti: **Tim Cakra Elok Raimuna (CER) dan Tim AJI**

Pewawancara: **Ratna Ariyanti dan Tim**

Penyusun Bahan: **Rach. Alida Bahaweres dan Febrina Galuh P.**

Cover dan Lay Out: **J!DSG, RLD SG**

Penerbit:

Aliansi Jurnalis Independen

Jl. Kembang Raya No. 6 Kwitang Senen Jakarta Pusat 10420

Email: sekretariatnya_aji@yahoo.com

Website: www.ajiindonesia.org

Edisi Cetakan: **Juni 2012**

Didukung Oleh:



Daftar Isi

Daftar Isi	3
Dari Data Menuju Perbaikan Kerja	9
Bab I: Pendahuluan	13
Bab II: Potret Jurnalis Perempuan Indonesia	17
Bab III A: Jurnalis Perempuan. Pentingkah membicarakan sebuah Jumlah?	27
3.1 Kondisi Jurnalis Perempuan di Indonesia	27
3.2 Pendidikan Jurnalistik	37
3.3 Posisi/Jabatan Saat Ini	39
3.4 Keanggotaan pada Organisasi Jurnalis	40
Bab III B: Waktu Kerja, Gaji, Tunjangan dan Fasilitas	45
3.1 Gaji Bulanan	49
3.2 Tunjangan Tunjangan	55
3.3 Cuti Cuti	60
3.4 Manajemen Laktasi dan Tempat Penitipan Anak	64
3.5 Kesempatan Pengembangan Diri	68
Bab III C: Harapan dan Kenyataan	71
3.1 Jam Kerja	72
3.2 Jam Istirahat	74
3.3 Perlindungan Kerja	76
3.4 Gaji Rutin	78
3.5 Asuransi	79
3.6 Jamsostek	81
3.7 Tunjangan Makan	83

3.8 Tunjangan Transportasi	84
3.9 Cuti Tahunan.....	86
3.10 Cuti Hamil dan Melahirkan.....	88
3.11 Cuti Haid	90
3.12 Manajemen Laktasi	91
3.13 Tempat Penitipan Anak.....	93
3.14 Kesempatan Jenjang Pengambil Keputusan	95
3.15 Kesempatan Memperoleh Pelatihan	97
3. 16 Importance Performance Analysis.....	99

Bab III D: Potret Perempuan dan Media..... 103

3.1 Gambaran Tentang Perempuan di Media Masing-Masing	104
3.2 Kehadiran Narasumber Perempuan	106
3.3 Penulisan Isu Tentang Perempuan di Media Masing-Masing	108
3.4 Kontribusi Penulisan Tentang Perempuan	109
3.5 Diskriminasi Dalam Tugas.....	111
3.6 Pelecehan Seksual dalam Tugas	112

Bab III E: Kesimpulan..... 115

3.1 Kesimpulan Umum	115
3.2 Kesimpulan soal Fasilitas	116
3.3 Harapan dan Kenyataan	117
3.4 Potret Perempuan dan Media	118

Bab IV: Jejak para Jurnalis Perempuan(Penelitian Kualitatif) 119

1. Maria Hartiningsih(Wartawan Senior Kompas).....	123
2. Fransiska Ria Susanti(Wakil Pemimpin Redaksi Sinar Harapan)	127
3. Hermien Kleden(Redaktur Utama Tempo)	129
4. Adek Berry(Fotografer AFP)	132
5. Donna Sita(Jurnalis/ Direktur Produksi Majalah Wanita Indonesia).....	134
6. Citra Dyah Prastuti(Editor KBR 68H)	136
7. Fira Basuki(Pemimpin Redaksi Majalah Cosmopolitan).....	138
8. Linda Tangdiala(Pemimpin Redaksi Kabar 24 Bisnis Indonesia).....	141
9. Evi Mariani(Kepala Desk Nasional The Jakarta Post)	143
10. Neni Ridarineni(Wartawan Senior Republika, Yogyakarta)	147

11. Rika Suartiningsih(Koordinator Jurnalis Radio KIS FM Medan).....	150
12. Sunarti Sain(Redaktur Harian Fajar, Makassar).....	152
13. Nunung Rusmiaty(Pemimpin Redaksi Majalah Honai, Jayapura)	155
14. Meladina Sari(Redaktur Akcaya Pontianak Post).....	156
15. Heti P Yunani(Redaktur harian Radar Surabaya).....	158
16. Iin Yumiyanti(Wakil Pemimpin Redaksi Majalah Detik.com)	160

Bab V: Fakta yang terungkap, Mulai dari Wajib Dandan sampai Dirayu Narasumber (Hasil Focus Group Discussion)..... 165

1. Wajib dandan dan kriteria cantik bagi Jurnalis Televisi	166
2. Hak reproduksi jadi hambatan	170
3. Pelecehan terhadap jurnalis perempuan	174

Bab VI: Tantangan berserikat dan berorganisasi..... 177

Bab VII: Lakukan sekarang ! 187

Bab VIII: Standar Layak Kerja Bagi Jurnalis Perempuan 191

Daftar Tabel dan Grafik

Tabel 1.1	Jumlah Responden di Tiap Lokasi.....	30
Grafik 1.1	Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Media.	30
Grafik 1.2	Pembagian Responden Total Berdasarkan Usia	31
Tabel 1.2	Pembagian Responden Per Lokasi Berdasarkan Usia	32
Grafik 1.3	Status Responden	33
Grafik 1.4	Status Karyawan Responden	34
Grafik 1.6	Jumlah Responden Terhadap Jumlah Total Jurnalis Perempuan di Setiap Media yang disurvei Berdasarkan Lokasi	36
Grafik 1.7	Pengalaman Pendidikan/Pelatihan Jurnalistik Berdasarkan Lokasi.....	37
Grafik 1.8	Pengalaman Pendidikan/Pelatihan Jurnalistik Perspektif Gender Berdasarkan Lokasi.	38
Tabel 1.3	Posisi/Jabatan Saat Ini.....	40
Grafik 1.9	Keanggotaan Di Organisasi Kewartawanan per Lokasi	41
Grafik 1.10	Banyaknya Organisasi Kewartawanan yang Diikuti.....	42
Tabel 1.5	Jenis Organisasi Jurnalis yang Diikuti	43
Grafik 2.1	Jumlah Jam Kerja Jurnalis Perempuan Per Minggu.....	46
Grafik 2.2	Jumlah Jam Kerja Jurnalis Laki-Laki Per Minggu	47
Tabel 2.1	Perbandingan Jam Kerja Rata Rata Antara Jurnalis Laki-Laki dan Jurnalis Perempuan	48
Grafik 2.3	Pemberian Waktu Istirahat	49
Grafik 2.4	Pemberian Gaji Rutin Bulanan	50
Grafik 2.5	Pendapatan Bulanan Jurnalis Perempuan Per Bulan	51
Grafik 2.6	Pendapatan Bulanan Laki-Laki Per Bulan	52
Tabel 2.2	Perbandingan Gaji Rata Rata Antara Jurnalis Laki Laki dan Jurnalis Perempuan	53
Grafik 2.7	Diskriminasi dalam Hal Penggajian	54
Grafik 2.9	Fasilitas Jamsostek.....	56
Grafik 2.10	Tunjangan Makan.....	57
Grafik 2.12	Tunjangan Dinas Malam Hari	59
Grafik 2.13	Pemberian Cuti Tahunan.....	61

Grafik 2.14	Pemberian Cuti Haid	62
Grafik 2.15	Pemberian Cuti Melahirkan	63
Grafik 2.16	Kesempatan Manajemen Laktasi	64
Grafik 2.17	Fasilitas Ruang Menyusui	65
Grafik 2.18	Fasilitas Tempat Penitipan Anak.....	66
Tabel 2.3	Rekapitulasi Derajat Fasilitas Kerja.....	67
Grafik 2.19	Kesempatan Mendapat Pendidikan Tambahan	69
Grafik 2.20	Kesempatan Jenjang Karir Struktural	70
Grafik 3.1	Harapan dan Kenyataan Jam Kerja.....	73
Tabel 3.1	Persentase Jumlah Responden untuk Harapan dan Kenyataan Jam Kerja.....	74
Grafik 3.2	Harapan dan Kenyataan Jam Istirahat.....	75
Tabel 3.2	Persentase Jumlah Responden untuk Harapan dan Kenyataan Jam Istirahat	75
Grafik 3.3	Harapan dan Kenyataan Perlindungan Kerja.....	77
Tabel 3.3	Persentase Jumlah jurnalis perempuan untuk Harapan dan Kenyataan Perlindungan Kerja	77
Grafik 3.4	Harapan dan Kenyataan Gaji Rutin	78
Tabel 3.4	Persentase Jumlah Responden untuk Harapan dan Kenyataan Gaji Rutin	79
Grafik 3.5	Harapan dan Kenyataan Asuransi	80
Tabel 3.5	Persentase Jumlah Responden untuk Harapan dan Kenyataan Asuransi	80
Grafik 3.6	Harapan dan Kenyataan Jamsostek.....	82
Tabel 3.6	Persentase Jumlah Responden untuk Harapan dan Kenyataan Jamsostek.....	82
Grafik 3.7	Harapan dan Kenyataan Tunjangan Makan	83
Tabel 3.7	Persentase Jumlah Responden untuk Harapan dan Kenyataan Tunjangan Makan	84
Grafik 3.8	Harapan dan Kenyataan Tunjangan Transportasi.....	85
Tabel 3.8	Persentase Jumlah Responden untuk Harapan dan Kenyataan Tunjangan Transportasi.....	86
Grafik 3.9	Harapan dan Kenyataan Tunjangan Cuti Tahunan.....	87
Tabel 3.9	Persentase Jumlah Responden untuk Harapan dan Kenyataan Cuti Tahunan	88

Grafik 3.10	Harapan dan Kenyataan Tunjangan Cuti Hamil dan Melahirkan...	89
Tabel 3.10	Persentase Jumlah Responden untuk Harapan dan Kenyataan Cuti Hamil dan Melahirkan.....	89
Grafik 3.11	Harapan dan Kenyataan Tunjangan Cuti Haid	90
Tabel 3.11	Persentase Jumlah Responden untuk Harapan dan Kenyataan Cuti Haid	91
Grafik 3.12	Harapan dan Kenyataan Manajemen Laktasi.....	92
Tabel 3.12	Persentase Jumlah Responden untuk Harapan dan Kenyataan Manajemen Laktasi.....	93
Grafik 3.13	Harapan dan Kenyataan Tempat Penitipan Anak	94
Tabel 3.13	Persentase Jumlah Responden untuk Harapan dan Kenyataan Tempat Penitipan Anak.....	94
Grafik 3.14	Harapan dan Kenyataan Jenjang Karir Struktural.....	96
Tabel 3.14	Persentase Jumlah Responden untuk Harapan dan Kenyataan Jenjang Karir Struktural.....	96
Grafik 3.15	Harapan dan Kenyataan Kesempatan Mengikuti Pelatihan	98
Tabel 3.15	Persentase Jumlah Responden untuk Harapan dan Kenyataan Memperoleh Pelatihan	98
Grafik 3.16	Total Harapan dan Kenyataan	99
Grafik 3.17	Importance Performance Analysis	101
Tabel 4.1	Tingkat Kepuasan Rata-Rata Terhadap Peliputan Tentang Perempuan di Media Masing-Masing.....	104
Grafik 4.1	Tingkat Kepuasan Terhadap Gambaran Tentang Perempuan di Media Masing-Masing.....	105
Tabel 4.2	Tingkat Kepuasan Rata Rata Terhadap Kehadiran Narasumber Perempuan	106
Grafik 4.2	Tingkat Kepuasan Terhadap Kehadiran Narasumber Perempuan	107
Tabel 4.3	Tingkat Kepuasan Rata Rata Terhadap Penulisan Isu Perempuan	108
Grafik 4.3	Tingkat Kepuasan Terhadap Penulisan Isu Perempuan	109
Grafik 4.4	Kontribusi Penulisan Tentang Perempuan.....	110
Grafik 4.5	Diskriminasi Dalam Tugas.....	111
Grafik 4.6	Pelecehan Seksual Dalam Tugas.....	112

Dari Data Menuju Perbaikan Kerja

DI banyak tempat dan waktu, perempuan itu seperti kelompok masyarakat tertinggal. Pengaturan perempuan hanya pada sektor yang sesuai dengan kodrat biologis, sistem kepercayaan, dan budaya tertentu, memunculkan ketimpangan atau ketidakadilan gender.

Kondisi yang timpang pun terjadi dalam dunia media dan profesi jurnalistik. Perempuan seakan dinomorduakan, sehingga berdampak pada masalah kesejahteraan dan keadilan sosial. Hasil survei Divisi Perempuan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia 2012, menunjukkan fenomena itu.

Dari segi jumlah, jurnalis perempuan masih kalah dibandingkan laki-laki. Data menunjukkan, dari 10 jurnalis, hanya ada 2 sampai 3 jurnalis perempuan. Atau dari 1000 jurnalis, 200-300 adalah perempuan, selebihnya jurnalis laki-laki. Mungkin hanya di Jakarta komposisi jurnalis perempuan dan laki-laki mencapai 40 berbanding 60. Di luar kota Jakarta, terutama di kota-kota madya, ketimpangan jumlah jurnalis perempuan dan laki-laki sangat terasa dan memprihatinkan.

Begitupun dengan status kekaryawanan. Data survei AJI

menunjukkan, sekitar 60 persen jurnalis perempuan bekerja sebagai pekerja kontrak, sisanya atau 40 persen berstatus karyawan tetap. Yang mengejutkan, jumlah pekerja perempuan berstatus kontrak justru lebih banyak (60-65 persen) di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Makassar.

Jumlah sumber daya manusia yang tertinggal berdampak kepada kedudukan jurnalis perempuan di ruang redaksi atau newsroom. Data survei AJI menunjukkan, hanya 6 persen jurnalis perempuan yang duduk sebagai petinggi redaksi. Artinya 94 persen atau mayoritas jurnalis perempuan bekerja sebagai reporter atau bukan pengambil keputusan redaksional. Kecilnya jumlah jurnalis perempuan dalam redaksi, membuat banyak kebijakan media kurang ramah terhadap kebutuhan perempuan, termasuk dalam tugas peliputan dan masalah pengupahan.

Dari survei ini ditemukan, banyak jurnalis perempuan belum menikah agar kesejahteraannya bisa setara dengan jurnalis laki-laki. Di luar itu, kesadaran tentang kesetaraan gender di kalangan jurnalis perempuan pun masih rendah. Yakni hanya 17 persen jurnalis perempuan yang pernah mengikuti pelatihan isu gender, sehingga kesadaran tentang masalah kesetaraan gender perlu ditingkatkan.

Dari gambaran di atas muncul kesan, dunia media dan profesi jurnalistik itu macho alias dunianya kaum laki-laki. Dari daftar nama jurnalis yang dikenal publik sebagian besar pasti laki-laki. Adapun bagi pekerja perempuan, mereka biasanya ditempatkan sebagai presenter studio yang adem, atau sebagai redaktur yang duduk manis di belakang seperangkat komputer. Dalam industri televisi, pekerja perempuan biasanya lebih dekat ke peralatan kecantikan (*make-up*) ketimbang ke peralatan liputan, dimana profesi sebagai presenter dianggap lebih prestisius dibandingkan jurnalis perempuan di lapangan.

Sisterhood dan Pengorganisasian Perempuan

Disinilah pentingnya jurnalis perempuan berkelompok dan membentuk solidaritas profesi bagi perbaikan kondisi kerja dan kesejahteraan jurnalis secara umum. Dimulai dengan memperbanyak jumlah jurnalis perempuan, mengangkat berbagai isu perempuan secara profesional dan beretika, membangun kesadaran bersama tentang berbagai masalah antar jurnalis perempuan, sampai memperkuat serikat-serikat kerja media bagi kesejahteraan jurnalis secara umum.

Buku ini adalah sebuah langkah kecil dari upaya besar AJI, khususnya dalam hal menguatkan peran jurnalis perempuan dalam dunia media dan jurnalistik modern. Divisi Perempuan AJI telah memulai sebuah survei sederhana, semoga ini bisa menjadi acuan bagi program-program penguatan peran jurnalis perempuan ke depan secara konkret dan lebih strategis.

Kekurangan buku ini hendaknya tidak menjadikan kecil hati, melainkan membuat lebih semangat bagi perbaikan. Untuk itu, kritik dan saran kami terima dengan tangan terbuka.

Salam solidaritas,

Eko Maryadi

Ketua Umum AJI

BAB I

Pendahuluan

SAAT ini tidak ada data yang dapat menunjukkan berapa jumlah jurnalis perempuan di Indonesia. Mengapa data jumlah jurnalis perempuan di Indonesia menjadi penting?

Berdasarkan masalah yang berhasil kami kumpulkan sebelumnya, jurnalis perempuan mengalami persoalan khusus dalam karirnya. Pertama, mereka mengalami beban ganda. Mereka harus menyelesaikan dua hal sekaligus, persoalan domestic dan pekerjaan mereka di kantor. Kedua, dalam sebuah workshop yang dilakukan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) di empat kota di Indonesia di tahun 2009, kami juga mendapatkan data bahwa para jurnalis perempuan sering tidak mendapatkan gaji serta asuransi yang sama dengan jurnalis laki-laki karena bukan dianggap sebagai kepala keluarga. Ketiga, mereka sering kali mengalami pelecehan dari narasumber laki-laki ataupun dari rekan kerja mereka. Keempat, mereka tidak mendapatkan penilaian yang baik dari atasan mereka ketika mereka harus berkutat dengan proses reproduksi mereka (contoh: kehamilan). Kelima, mereka harus tampil cantik dan berdandan rapi jika sedang berada di depan kamera.

Atas persoalan jurnalis perempuan ini, kami perlu melakukan penelitian. Penelitian yang dilakukan AJI ini merupakan

kerjasama dengan Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) yang ingin melihat kondisi jurnalis perempuan di Indonesia, dengan menggunakan metode kuantitatif, kualitatif dan *Focus Group Discussion* (FGD). Survey ini dilakukan di tujuh kota di Indonesia di tahun 2011-2012 meliputi: Jakarta, Pontianak, Surabaya, Makassar, Jayapura, Yogyakarta dan Medan.

Penelitian dengan menggunakan perspektif perempuan ini juga ingin mengetahui bagaimana penggambaran secara umum jurnalis perempuan di Indonesia, terkait dengan hak-hak mereka sebagai jurnalis seperti hak untuk mendapatkan upah yang sama dengan laki-laki, hak untuk mendapatkan cuti haid, hak untuk mendapatkan cuti melahirkan selama tiga bulan, hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan jurnalis laki-laki, dan sebagainya. Penelitian ini juga ingin melihat apakah jurnalis perempuan mengalami kekerasan, subordinasi, stereotype dalam menjalankan tugas-tugas mereka.

Beberapa data tentang persoalan yang dialami jurnalis perempuan kemudian kami dapatkan, seperti dalam Bab 3 (kuantitatif), kami mendapatkan data bahwa jumlah jurnalis perempuan di Indonesia hanya sekitar 1:3 hingga 1:4 dibandingkan jurnalis laki-laki. Kami juga mendapatkan data soal belum banyaknya ruang untuk menyusui dan belum populernya cuti haid di kalangan jurnalis perempuan. Beberapa jurnalis perempuan juga masih ada yang mengalami kekerasan atau pelecehan. Namun dari penelitian ini kami juga mendapatkan data bahwa rata-rata jurnalis perempuan sudah mendapatkan gaji dan asuransi yang sama dengan jurnalis laki-laki. Mereka juga mendapatkan perlakuan yang sama dalam hal jam kerja, waktu istirahat, fasilitas transportasi dan beberapa fasilitas lain.

Pada Bab 4 (kualitatif) kami juga mendapatkan data bahwa secara umum, para jurnalis perempuan memilih untuk lebih fokus dalam karirnya, namun banyak jurnalis perempuan yang

kemudian juga focus untuk menuliskan persoalan perempuan di medianya. Hanya beberapa jurnalis perempuan yang memilih untuk bergiat di organisasi atau serikat pekerja untuk mengatasi persoalan yang mereka alami di tempat kerja.

Selanjutnya, kami juga menambah metode penelitian dengan melakukan FGD (*Focus Group Discussion*) dan mendapatkan data sejumlah persoalan yang dialami jurnalis perempuan di televisi. Jurnalis perempuan televisi tak hanya harus tampil rapi, namun juga harus terlihat segar dan berdandan, terutama ketika harus siaran langsung/*live* di depan layar kaca. Mereka juga mengalami persoalan ketika bereproduksi. Jurnalis perempuan televisi yang sedang hamil tak boleh terlalu sering tampil di depan layar kaca karena dinilai kurang menarik.

Dalam penelitian ini, kita dapat mengetahui bagaimana suara dari para jurnalis perempuan yang mencoba memberikan rekomendasi mulai dari membangun organisasi atau serikat pekerja jurnalis sampai menuliskan berita yang berperspektif gender di media tempat mereka bekerja.

Penelitian ini sekaligus membawa berita gembira untuk jurnalis perempuan, mengingat tak banyak jejak yang menuliskan kiprah para jurnalis perempuan di Indonesia. •

BAB II

Potret Jurnalis Perempuan di Indonesia

BERAPA jumlah jurnalis perempuan di Indonesia? Apakah mereka menduduki posisi sebagai pengambil keputusan? Apakah yang mereka alami sehari-hari dalam bekerja? Apakah sudah mendapatkan kenyamanan dalam bekerja? Apa saja kebutuhan mereka? Apakah mereka memiliki cara untuk menyelesaikan persoalan?

Saat ini fakta tentang jumlah industri media di Indonesia begitu pesat. Dewan Pers tahun 2011 mencatat, jumlah media cetak mencapai 1.076, jumlah radio 1.248 dan jumlah stasiun televisi mencapai 76, serta terdapat 176 stasiun televisi yang mengajukan izin baru. Berdasarkan data tersebut, diperkirakan industri media di Indonesia menyerap 40 ribu jurnalis. Namun dari semua data ini belum diketahui berapa jumlah jurnalis perempuan.

Tahun 2009, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia melakukan pengamatan sekaligus workshop dengan para jurnalis di Jakarta, Yogyakarta, Pekanbaru, dan Bali. Workshop ini diselenggarakan untuk mengetahui bagaimana media memperlakukan jurnalis perempuan. Selain mendapatkan data-data jumlah jurnalis perempuan, beberapa temuan lain

menyebutkan¹:

1. Hingga 2012, jumlah jurnalis perempuan yang merupakan anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) sebanyak 347 orang.

Sementara jumlah jurnalis laki-laki anggota AJI sebanyak 1521. Hanya sekitar 18,6% jurnalis perempuan dari total 1868 anggota AJI se-Indonesia.

2. Jurnalis perempuan umumnya masih mengalami kekerasan berbasis gender.

Meskipun media mulai memperbanyak jumlah jurnalis perempuan, hanya merupakan taktik untuk mendekati narasumber laki-laki. Jurnalis perempuan lebih banyak direkrut berdasarkan kecantikan atau tubuh dan wajah yang dianggap menarik oleh standar industri. Penilaian secara fisik untuk tubuh perempuan ini banyak terjadi pada industri Televisi.

3. Setelah berkarir dan berkeluarga, jurnalis perempuan kerap mengalami hambatan dalam berkarir.

Selain harus bekerja, mereka memiliki kewajiban untuk mengasuh anak. Sistem kerja yang tidak mengenal waktu kerap menjadi hambatan bagi para jurnalis perempuan. Ini yang seringkali membuat penilaian dari perusahaan terhadap para jurnalis perempuan tidak lebih baik dari rekannya jurnalis laki-laki.

4. Beberapa jurnalis perempuan juga mengakui, upah yang mereka terima lebih kecil dibandingkan jurnalis laki-laki.

Hal ini karena perusahaan media masih menganggap jurnalis perempuan bukan sebagai kepala rumah tangga. Hal ini pulalah yang juga menyebabkan jurnalis perempuan kadang tidak mendapatkan asuransi.

5. Menyusui yang menjadi hak pekerja jurnalis perempuan terkadang tidak terpenuhi.

Mereka jarang yang dapat memberikan ASI eksklusif selama enam bulan di media tempat mereka bekerja. Tidak ada ruang khusus untuk menyusui (*nursery room*). Mereka juga belum mendapatkan haknya untuk cuti haid dan cuti melahirkan selama tiga bulan.

1 Workshop Jurnalis Perempuan dan media, AJI Indonesia, 2009

6. **Jurnalis perempuan mengalami pelecehan seksual pada saat melakukan peliputan.** Bentuk pelecehan tersebut beberap kali dilakukan oleh narasumber laki-laki, yaitu dengan tindakan meraba atau merayu. Bahkan ada jurnalis perempuan yang mengaku mendapat ajakan kencan oleh narasumbernya.

Kondisi tersebut menunjukkan telah terjadi ketimpangan dan diskriminasi perlakuan yang dilakukan media dan lingkungannya terhadap jurnalis perempuan. Padahal posisi jurnalis perempuan seharusnya sama dengan posisi jurnalis laki-laki, yaitu penghargaan atas kualitas kerjanya seperti mendapatkan gaji yang sama dengan jurnalis laki-laki, serta perhatian terhadap kualitas hidupnya seperti mendapatkan cuti haid, cuti melahirkan selama tiga bulan, dan masih banyak yang lainnya.

Bertitik tolak atas perumusan tersebut maka survey ini ingin mengetahui "Bagaimana potret jurnalis perempuan di Indonesia?" Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka hasil penelitian ini akan menjawab beberapa permasalahan umum seperti:

Perbandingan jumlah jurnalis perempuan dengan jumlah jurnalis laki-laki di Indonesia.

Penggambaran secara umum hak-hak perempuan sebagai jurnalis di Indonesia seperti mendapatkan upah yang sama, mendapatkan cuti haid, cuti melahirkan selama 3 bulan, dan kesempatan yang sama.

Apakah jurnalis perempuan mengalami kekerasan, subordinasi, diskriminasi, stereotype serta eksploitasi dalam pekerjaannya?

Di tahun 2011 AJI telah mengeluarkan delapan komponen upah layak terhadap jurnalis. Komponen ini merupakan evaluasi untuk melengkapi Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor

13 Tahun 2003. Beberapa hal yang disebutkan dalam UU yang terkait dengan perempuan misalnya menuntut perusahaan media agar memberikan cuti haid untuk jurnalis perempuan dan cuti melahirkan selama tiga bulan. Berikut adalah komponen upah layak terkait dengan jurnalis perempuan:

1. Memberikan jaminan (Asuransi) keselamatan kerja yang sama kepada setiap jurnalisnya.
2. Memberikan jaminan kesehatan kepada setiap jurnalis dan keluarganya seperti pelayanan medis rawat jalan oleh dokter umum, rawat jalan dokter spesialis, rawat inap di rumah sakit, perawatan kehamilan dan persalinan, serta pelayanan penunjang lainnya.
3. Memberikan jaminan sosial tenaga kerja yang sama bagi setiap jurnalis dan keluarganya.
4. Memberikan hak cuti kepada jurnalis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Memberikan berbagai tunjangan kepada jurnalisnya terutama tunjangan keluarga (setidaknya 10% gaji untuk tunjangan istri dan anak).
6. Memberikan pelatihan ketrampilan (skill) kepada setiap jurnalisnya secara berkala.
7. Menyediakan makanan dan minuman bergizi serta menjaga keamanan jurnalis perempuan yang bekerja antara pukul 23.00-07.00. Perusahaan harus menyediakan kendaraan operasional antar jemput bagi jurnalis perempuan yang berangkat dan pulang kerja antara pukul 23.00 – 05.00.
8. Tidak mempekerjakan jurnalis perempuan yang tengah hamil pada pukul 23.00 – 07.00 jika menurut keterangan dokter bisa membahayakan keselamatan kandungan.
9. Memberikan bonus kepada jurnalisnya yang berprestasi.

Artinya komponen upah layak ini menggarisbawahi tentang tidak diperbolehkannya tindakan kekerasan sekaligus diskriminasi terhadap jurnalis perempuan.

Tentang hal ini, beberapa keputusan tentang perempuan juga ditulis Deklarasi Beijing +15 yang berisi tentang deklarasi universal hak-hak perempuan yang menyebutkan komponen media dan perempuan. Salah satu pasal dari Deklarasi tersebut adalah mengatur peningkatan partisipasi dan kesempatan perempuan untuk berekspresi dan mengambil keputusan di dalam dan melalui media massa serta teknologi-teknologi komunikasi yang baru. Selain itu media dan semua pihak juga punya kewajiban untuk memajukan gambaran yang seimbang dan tidak klise tentang perempuan dan media.

Deklarasi universal untuk hak-hak perempuan ini kemudian juga dilengkapi dengan konvensi anti diskriminasi terhadap perempuan (Cedaw/ *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia. Isi dari konvensi ini antara lain, setiap individu maupun institusi tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap perempuan.

Seorang feminis yang juga pengamat media, Lisbeth van Zonen kemudian memberikan masukan tentang bagaimana melihat kiprah perempuan di media² :

1. Berapa banyak perempuan yang sudah terlibat di media?
2. Apakah mereka sudah dalam posisi sebagai pengambil kebijakan dalam proses produksi/dalam redaksi?
3. Potensi apa saja yang mereka punyai untuk membawa isu perempuan di media?

Feminis multikultural, Angela Mc Robbie kemudian

² Lisbeth Van Zoonen, *Feministmedia studies*, sage Publications, 1994

menambahkan teori untuk melihat bagaimana posisi perempuan di media³:

1. Apakah perempuan telah tampak di media? Jika tidak, mengapa?
2. Jika perempuan tampak, lalu dimana posisi mereka?
3. Bagaimana cara mereka menegosiasi keputusan?
4. Strategi apa yang mereka lakukan untuk mengorganisir dirinya?

Empat pertanyaan pokok ini cukup penting untuk melihat dimana posisi perempuan dan apa yang sudah mereka lakukan di media? Berkarir dengan baik, fokus untuk menuliskan isu-isu perempuan di media atau membawa isu perempuan di ruang redaksi dan kemudian mengorganisir para pekerja perempuan untuk menyelesaikan persoalan mereka? Penelitian ini cukup penting untuk menjawab beberapa pertanyaan dari Angela Mc Robbie.

Penilaian lain untuk melihat persoalan perempuan adalah: apakah perempuan mengalami kekerasan, subordinasi, diskriminasi dan dieksploitasi dalam pekerjaannya.

Beberapa aktivis perempuan kemudian mempunyai terminologi soal kekerasan ini bahwa kekerasan adalah suatu tindakan menguasai pihak lain yang menimbulkan orang lain menjadi dirugikan atau dikorbankan. Dalam UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 disebutkan bahwa beberapa macam kekerasan antarlain: Kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi.

Selanjutnya kerangka konseptual dan teoritis yang dipergunakan dalam meninjau tema-tema penelitian adalah dengan melihat konsep-konsep: kekuasaan, penindasan,

3 Angela Mc Robbie, *Culture Society: Art, Fashion and Popular Music*, Edisi 1, Routledge, 1999

subordinasi, marginalisasi dan lain sebagainya yang terkait dengan kehidupan perempuan sehari-hari.

Subordinasi: terjadinya relasi kuasa terhadap perempuan (gambaran sentral dari struktur dominasi).

Diskriminasi: tindakan pembedaan atau tindakan yang lebih menyenangkan orang lain.

Eksplotasi: menggunakan pengalaman atau keterampilan orang lain tanpa memberikannya penghargaan.

Stereotype: cap buruk yang dilekatkan pada seseorang. Cap buruk ini sering dilakukan untuk memperlemah kondisi orang yang dimaksud.

Dari penelitian inilah kemudian AJI dan FnV ingin melihat secara kuantitatif maupun kualitatif serta dengan melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) pada sejumlah jurnalis perempuan di Indonesia, untuk mengetahui bagaimana potret jurnalis perempuan di media menurut perspektif perempuan serta mengetahui perlakuan media terhadap jurnalis perempuan dibandingkan perlakuan mereka terhadap jurnalis laki-laki.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi feminis (metodologi yang menggunakan perspektif perempuan/kajian perempuan)⁴.

Metodologi perspektif feminis lahir di barat di tahun 1970. Metodologi ini lahir khususnya di kalangan feminis ketika ilmu pengetahuan mereka nilai bersifat androsentrik. Dianggap androsentrik karena ilmu pengetahuan

4 Metodologi feminis adalah satuan teori, konsepsi, dan gagasan tentang ketertindasan dan pembebasan perempuan. Metodologi feminis lahir sebagai kritik dari ilmu pengetahuan umum yang menganggap persoalan sosial adalah netral gender. Metodologi ini menjadi bagian dari paradigma kritis dan sekarang

mengkonsepsikan perempuan sebagai pihak yang pasif, tidak terlihat dan bahkan beberapa pihak melakukan mysogini (membenci perempuan).

Peneliti feminis, Sandra Harding dan Schulamith Reinharz menambahkan bahwa penelitian feminis dengan sendirinya mendekonstruksi ilmu pengetahuan yang selama ini sudah dibangun secara bertahun-tahun dibangun atas dasar pengalaman hidup dan pengalaman laki-laki, diakui "kebenarannya" secara epistemologis sebagai alat untuk membangun ilmu pengetahuan dan dianggap sebagai metodologi yang universal.⁵

Riset feminis ini kemudian tidak hanya digunakan untuk riset sosial, namun juga untuk riset sejarah, politik, bahkan media.

Jika pada penelitian lain mengagung-agungkan obyektivitas, maka riset perspektif feminis ini menggunakan analisa subyektif. Karena tujuan dari penelitian perspektif feminis adalah mendengarkan suara perempuan dan mengetahui apa kebutuhan perempuan. Jadi riset ini tidak berisi tentang perempuan, tetapi untuk perempuan.

Berbagai masalah perempuan perlu dipahami berdasarkan kondisi dan situasi perempuan. Paradigma ini akan menuliskan soal: agenda perempuan yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas perempuan dan perubahan sosial bagi perempuan. Juga etika perempuan yang antarlain tidak menyakiti dan ketersediaan perempuan untuk terlibat di dalamnya.

Penelitian ini juga melibatkan epistemologi yaitu berupa: pengalaman hidup perempuan, pemikiran, refleksi, interpretasi perempuan dan juga ontologi yaitu bagaimana perempuan memandang realitas kehidupan. Dan yang terakhir yaitu dengan menggunakan aksiologi yaitu untuk melihat bagaimana nilai-nilai yang kita miliki mempengaruhi penelitian kita.⁶

5 Sandra E. Harding (ed.), *Feminism and Methodology: Social Sciences Issue*, Bloomington and Indianapolis, Indiana University Press 1987 dan Schulamit Reinharz, *Feminist Research Methods in Social Research*, Oxford University, 1992.

6 Rahmat Hidayat, *Jurnal Perempuan*, Edisi 48, 2006.

Ciri-ciri metodologi penelitian berperspektif feminis adalah⁷:

1. Riset menunjukkan identitas perempuan—jadi dalam riset feminis selalu dipertanyakan apa yang membedakan identitas perempuan dengan laki? Bagaimana masyarakat memperlakukan perempuan dibandingkan dengan laki-laki?
2. Riset menunjukkan pengalaman perempuan. Validitas riset dikaitkan dengan pengalaman perempuan sebagai indikator realitas. Perspektif perempuan sebagai responden tentang pengalaman diri sendiri adalah bagian penting dalam suatu riset dengan perspektif perempuan.
3. Tujuan riset bukanlah ‘tentang perempuan’ namun ‘untuk perempuan’. Jadi penelitian akan menjawab: apa yang terjadi pada perempuan? Bagaimana perempuan bisa dalam situasi seperti ini? Apa yang sebenarnya diinginkan perempuan? Apa harapan-harapan mereka?. Jadi penelitian bukan mementingkan metode riset, tetapi bagaimana hasil riset nantinya digunakan untuk bisa menjawab berbagai kondisi hidup perempuan yang merugi akibat jendernya (seperti misalnya mengalami opresi, kekerasan, kebutuhan khusus yang terabaikan, dan sebagainya)
4. Penelitian perspektif feminis umumnya memakai perspektif etnografis. Etnografis dengan sendirinya mendekonstruksi penelitian antropologi yang umumnya hanya berdasarkan budaya normatif masyarakat setempat. Namun penelitian etnografi mengedepankan pengalaman nyata yang dialami perempuan sehingga membutuhkan observasi, partisipasi, analisis arsip sekaligus wawancara.
5. Analisa riset menggunakan konsep dari berbagai aliran feminis seperti: hubungan kekuasaan, marjinalisasi, subordinasi, opresi, dan lain-lain.

Atas latar belakang inilah, maka Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bekerjasama dengan Federatie Nederlandse Vakbeweging

⁷ *Metodologi Penelitian Berperspektif Perempuan dalam Riset Sosial*, Program Studi Kajian Wanita Universitas Indonesia (Saparinah Sadli, Marilyn Porter, Editor Kristi Poerwandani), tahun 1999.

(FNV) kemudian melakukan survey tentang kondisi jurnalis perempuan di Indonesia, dengan menggunakan metode kuantitatif, kualitatif dan *Focus Group Discussion* (FGD). Survey ini dilakukan di tujuh kota di Indonesia di tahun 2011-2012 meliputi Jakarta, Pontianak, Surabaya, Makassar, Jayapura, Yogyakarta dan Medan.

Selanjutnya, teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik kuantitatif, kualitatif dan FGD. Metode kualitatif digunakan untuk memperkaya data kuantitatif, yaitu untuk lebih mendalami lebih lanjut dari makna dan data yang telah dihimpun. Sedangkan metode kuantitatif dipilih untuk membuat peta yang luas tentang suatu masalah, untuk mengukur penyebarannya dan untuk mengadakan kesimpulan umum (generalisasi) tentang masalah yang diteliti. Sedangkan FGD dilakukan untuk melihat persoalan dari beberapa jurnalis perempuan yang berasal dari berbagai kota lain di Indonesia.●

BAB III A

Jurnalis Perempuan. Pentingkah membicarakan sebuah Jumlah?

Dari data didapatkan : saat ini jumlah jurnalis perempuan di Indonesia masih jauh dibandingkan jurnalis laki-laki, yaitu hanya sekitar 1:3 atau 1:4 di Indonesia. Penelitian ini juga menunjukkan: bahwa Jurnalis perempuan paling banyak bekerja di media cetak, selanjutnya televisi, radio dan paling sedikit bekerja di media online. Sekitar 56,5% jurnalis berstatus sebagai karyawan tetap sedangkan selebihnya berstatus kontrak dan freelance. Walaupun mereka telah mendapatkan berbagai pelatihan jurnalistik, namun hanya 17,46% jurnalis perempuan yang mendapatkan pelatihan gender. Data juga menunjukkan hanya sekitar 33% jurnalis perempuan yang masuk di organisasi wartawan. Hanya 6% jurnalis perempuan yang menduduki posisi sebagai redaktur maupun pengambil keputusan di redaksi.

3.1 Kondisi Jurnalis Perempuan di Indonesia

Seberapa penting membicarakan sebuah jumlah? Untuk perjuangan perempuan tentu saja ini merupakan sesuatu yang penting. Tak hanya secara kualitatif, namun kita berharap dari jumlah yang banyak, maka makin banyak para jurnalis perempuan yang menyuarakan perjuangan jurnalis perempuan dan kebutuhan-kebutuhan mereka.

Jika ini menjadi bagian penting, maka seharusnya kita tidak terlalu kesulitan untuk melihat dimana data yang menyebutkan tentang jumlah jurnalis perempuan di Indonesia. Namun kenyataannya, hampir tak ada data resmi tentang jumlah jurnalis perempuan di Indonesia. Apakah ini karena pembicaraan mengenai jumlah belum menjadi sesuatu yang penting, ataukah karena persoalan jurnalis khususnya perempuan dianggap sama dengan yang dialami jurnalis laki-laki?

Data tentang jumlah adalah sesuatu yang amat penting. Paling tidak jika kita mengacu pada apa yang dituliskan oleh International Federation of Journalist (IFJ). Karena dengan jumlah kita bias melihat bagaimana representasi para jurnalis perempuan sekaligus partisipasi mereka di media. Sedikitnya IFJ menyebutkan ada dua cara yang dilakukan untuk mengetahui representasi perempuan di media. Yang pertama adalah dengan membentuk struktur khusus seperti Komite perempuan atau Dewan Kesetaraan (*Equality Council*) untuk memberikan suara perempuan. Dan yang kedua adalah dengan memperkenalkan system kuota dalam upayanya untuk memastikan adakah representasi yang setara antara jurnalis perempuan dan laki-laki di media. Jika ini terpenuhi, maka ini tak hanya memberikan data tentang jumlah jurnalis perempuan, namun selanjutnya juga memberikan gambaran tentang representasi jurnalis perempuan di media.

Cara-cara ini sering digunakan untuk melihat berapa jumlah

perempuan di media dan apa yang terjadi disana. Di AJI, jumlah jurnalis perempuan yang menjadi anggota AJI mencapai 18,6%. Walaupun jumlahnya belum sama dengan jurnalis laki-laki, namun data ini selalu digunakan untuk membangun kapasitas jurnalis perempuan anggota AJI secara khusus dan jurnalis perempuan pada umumnya. Maka penelitian ini selanjutnya menjadi sesuatu yang sangat penting untuk mengetahui sekaligus memaknai apa yang harus dilakukan untuk jurnalis perempuan di media.

Harus diakui, hingga sekarang memang belum ada data resmi tentang berapa jumlah jurnalis di tanah air, namun sejauh ini yang paling banyak dikutip media massa, jumlah total jurnalis di Indonesia mencapai 14.000 orang yang tersebar di berbagai jenis media dan provinsi. Dari jumlah tersebut baru sekitar 10% (1.400 orang) yang merupakan jurnalis perempuan. Sungguh jumlah yang masih jauh dari harapan. Paling tidak penelitian ini menemukan angka-angka yang jauh dari harapan ini.

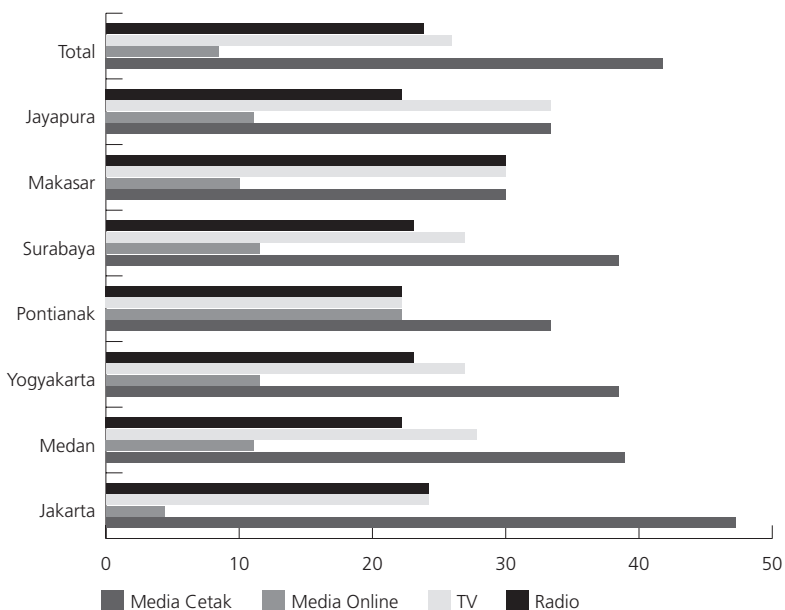
Selanjutnya, penelitian tentang kondisi jurnalis perempuan ini dilakukan untuk mengetahui jumlah jurnalis perempuan di tujuh provinsi di Indonesia, dengan total jumlah responden sebanyak 189 orang. Proporsi sampel terhadap total populasi adalah kurang lebih sekitar 14%. Mengingat keterbatasan waktu, biaya dan letak geografis provinsi di Indonesia, proporsi sampel terhadap populasi tersebut dianggap sudah cukup mewakili suara jurnalis perempuan di tanah air.

Tabel dibawah ini menunjukkan jumlah responden yang merupakan jurnalis perempuan per-wilayah pada penelitian ini:

Tabel 1.1 **Jumlah Responden di Tiap Lokasi**

Kota	Jumlah Responden (orang)	%
Jakarta	71	52.59%
Yogyakarta	18	13.33%
Surabaya	17	12.59%
Medan	12	8.89%
Jayapura	7	5.19%
Makassar	6	4.44%
Pontianak	4	2.96%
	135	100.00%

Sementara jika dilihat berdasarkan jenis media tempat mereka bekerja disajikan pada grafik di bawah ini:

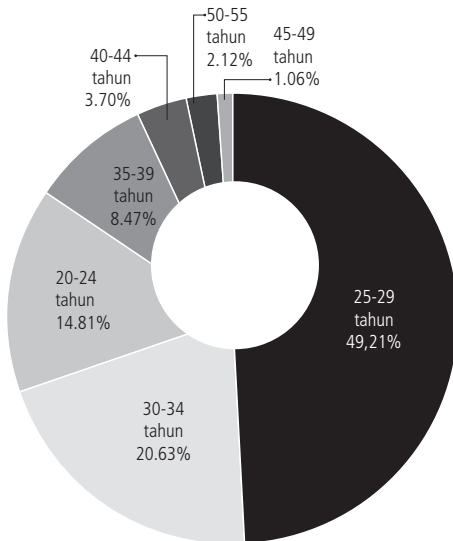


Grafik 1.1 **Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Media.**

Secara umum, jurnalis perempuan yang bekerja di media cetak tercatat dengan jumlah paling besar (41,80%) diikuti jurnalis perempuan yang bekerja di media televisi (25,93%) kemudian jurnalis perempuan yang bekerja di radio (23,81%) dan terakhir jurnalis perempuan di media online (8,47%). Komposisi ini hampir serupa di semua kota yang menjadi lokasi penelitian.

Sementara itu dilihat dari sisi usia, 49,21% responden berada pada usia 25-29 tahun, disusul 30-34 tahun (20,63%) dan 20-24 tahun (14,81%). Rentang usia ini terhitung usia yang sangat produktif. Namun survey juga berhasil menjangkit 2,12% responden berusia 50-55 tahun dan 1,06% responden berusia 45-49 tahun.

USIA RESPONDEN



Grafik 1.2 Pembagian Responden Total Berdasarkan Usia

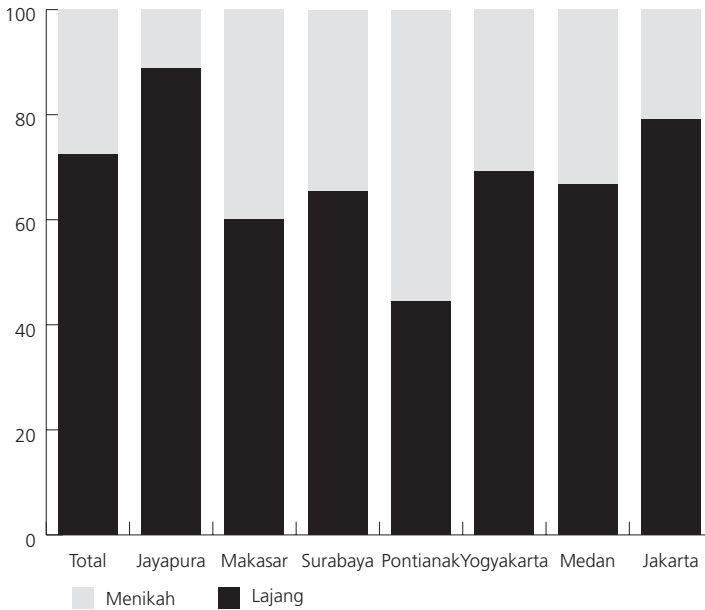
Selanjutnya tabel di bawah ini memaparkan jumlah responden berdasarkan usia di setiap lokasi:

Tabel 1.2 **Pembagian Responden Per Lokasi Berdasarkan Usia**

Usia (Tahun)	Jakarta	Makassar	Medan	Jayapura	Pontianak	Surabaya	Yogyakarta	Total
20 - 24	13	1	2	2	3	4	3	28
25 - 29	47	4	8	5	3	11	15	93
30 - 34	18	3	6		2	5	5	39
35 - 39	9	2	2		1	2		16
40 - 44	3			2		1	1	7
45 - 49	1						1	2
50 - 55						3	1	4
Grand Total	91	10	18	9	9	26	26	189

Nampak dari tabel, Jakarta menduduki posisi nomor satu untuk rentang usia responden yang paling banyak, sementara di daerah lain, sebagian besar responden adalah jurnalis yang berada pada usia 25-29 tahun.

Selain usia, status pernikahan akan mempengaruhi jawaban responden terhadap pertanyaan pertanyaan berikutnya pada survey ini. Status pernikahan ini menjadi bagian dari pertanyaan penelitian untuk mengetahui apakah ada perbedaan perlakuan yang dialami antara jurnalis perempuan yang sudah menikah dibanding jurnalis laki-laki yang sudah menikah di media tempat mereka bekerja. Secara keseluruhan tercatat 72,49% responden berstatus lajang sedangkan 27,51% sudah menikah. Jika diamati perlokasi, komposisi status pernikahan responden di tiap lokasi ditampilkan pada grafik dibawah ini.



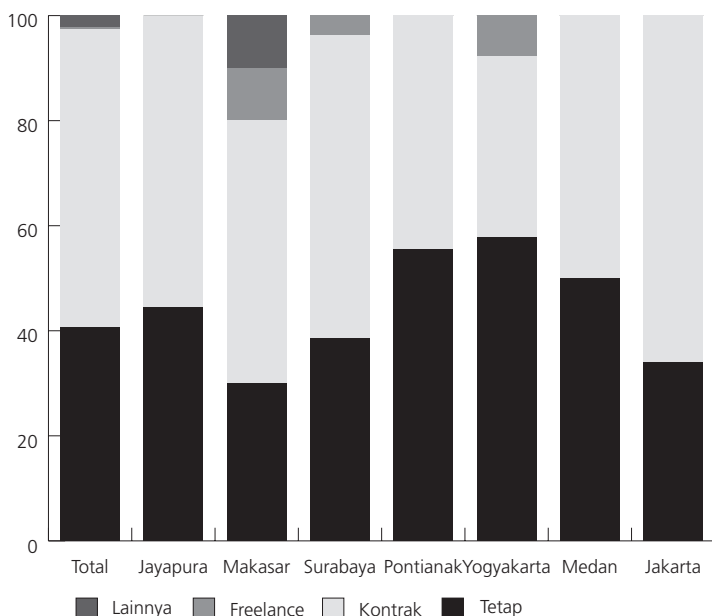
Grafik 1.3 **Status Responden**

Dari grafik tersebut, posisi lajang paling banyak ada pada responden di Jayapura disusul responden dari Jakarta. Sementara itu, jurnalis perempuan dengan status menikah terbanyak ada di Pontianak dan Makassar.

Status kepegawaian responden di media tempat mereka bekerja merupakan salah satu hal penting yang dapat mempengaruhi kinerja wartawan. Status ini menjadi sangat penting untuk di perjuangkan, karena banyak jurnalis yang mempunyai status belum diangkat menjadi karyawan walaupun sudah bekerja bertahun-tahun.

Pada penelitian ini secara keseluruhan tercatat sebanyak 56,61% jurnalis perempuan adalah karyawan tetap, sementara 40,74% berstatus kontrak. Masih ada 2,12% sebagai jurnalis *freelance* dan 1 orang jurnalis perempuan (0,53%) mengaku berstatus karyawan semi organik. Walaupun ia tidak bisa menyebutkan tentang status semi organik ini. Jika diamati per

lokasi, status kepegawaian responden ditampilkan pada grafik dibawah ini:



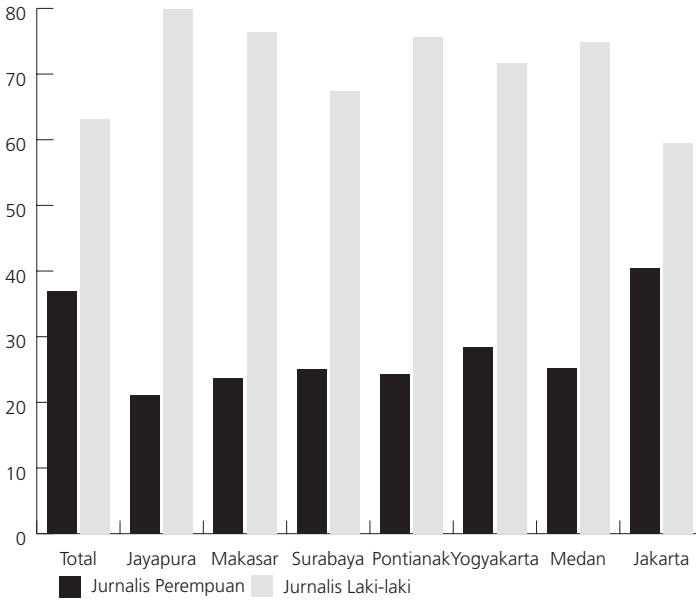
Grafik 1.4 Status Karyawan Responden

Dari grafik tersebut terlihat, di Jakarta meskipun jumlah wartawan dan respondennya paling banyak dibandingkan daerah lain, namun dari status karyawannya 65,93% jurnalis perempuan di Jakarta masih berstatus kontrak. Sementara Yogyakarta memegang posisi tertinggi dengan 57,96% responden sudah berstatus karyawan tetap yang diikuti Pontianak sejumlah 55,56% dan Medan dengan total 50% karyawan tetap. Sementara itu jurnalis perempuan dengan status freelance hanya ditemui di Makassar, Surabaya dan Yogyakarta.

Kepada responden ditanyakan pula, bagaimana komposisi jumlah jurnalis perempuan dan laki-laki ditempatnya bekerja. Hasilnya, dari total jumlah jurnalis ditempatnya bekerja, jumlah jurnalis perempuan adalah 2.480 orang (36,87%) sementara selebihnya sebanyak 4. 247 orang (63,13%) didominasi oleh

jurnalis laki-laki.

Untuk setiap daerah. komposisi ini ditampilkan pada gambar dibawah ini:

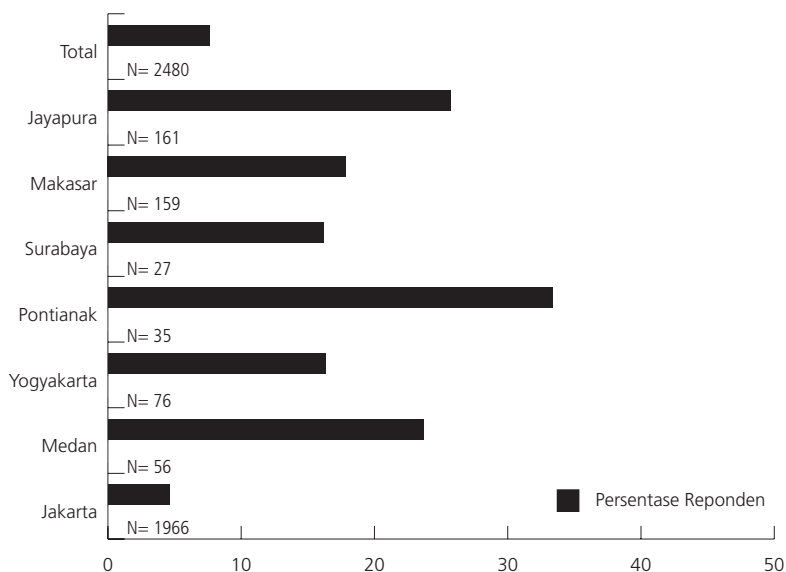


Grafik 1.5 Perbandingan Jumlah Jurnalis Perempuan dan Laki-Laki dari Media yang disurvei di Tiap Daerah

Dari gambar tersebut, perbandingan jumlah jurnalis laki-laki pada umumnya berkisar antara 1-3 kali jumlah jurnalis perempuan. Komposisi yang cukup seimbang ada di Jakarta, dimana jumlah jurnalis perempuan adalah 40,47% sedangkan jurnalis laki-laki 59,53%. Kesenjangan yang paling signifikan ditemui di Jayapura dimana jumlah jurnalis perempuan hanya 21,08% sementara jurnalis laki-laki mencapai 78,92%.

Sementara itu, dari pertanyaan ini juga digali perbandingan antara jumlah total jurnalis perempuan di setiap media terhadap jumlah jurnalis perempuan yang menjadi sampel. Hasilnya 189 responden adalah 7,62% dari total 2.480 jurnalis

perempuan. Secara statistik untuk jumlah populasi yang cukup besar dan dengan letak demografis yang berjauhan, angka 7,62% sudah dianggap cukup merepresentasikan populasi secara keseluruhan. Jika diamati per lokasi maka perbandingan antara jumlah responden dan jumlah total jurnalis perempuan di setiap media adalah sebagai berikut:



Grafik 1.6 Jumlah Responden Terhadap Jumlah Total Jurnalis Perempuan di Setiap Media yang disurvei Berdasarkan Lokasi

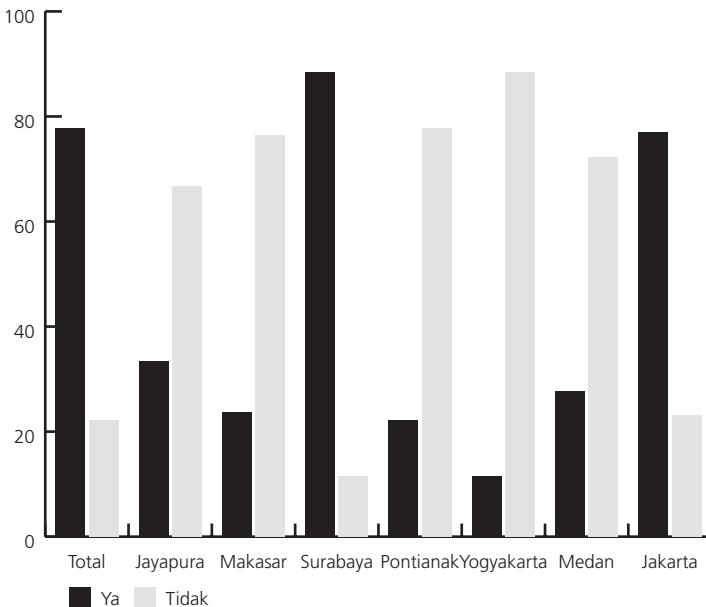
Dari gambar diatas, perbandingan terbesar ada di Pontianak sebesar 33,33%, disusul Jayapura (25,71%). Responden dari Jakarta, meskipun persentasenya paling kecil (4,63%) namun secara jumlah paling besar yaitu 91 orang, jumlah ini dianggap cukup mewakili 1966 responden jurnalis perempuan pada setiap media yang disurvei.

Selain itu juga dilakukan wawancara mendalam untuk jumlah jurnalis perempuan di media. Dari hasil wawancara mendalam, seluruh responden mengakui jumlah jurnalis laki-laki lebih banyak dari jurnalis perempuan, bahkan di salah satu media, jumlah jurnalis perempuan hanya dua orang saja.

Secara rata-rata perbandingan antara jurnalis perempuan dan jurnalis laki-laki mencapai 1:3 hingga 1:4 di setiap media.

3.2 Pendidikan Jurnalistik

Untuk meningkatkan profesionalisme jurnalis, pendidikan jurnalis merupakan salah satu hal yang harus dilakukan. Jurnalis perempuan tak hanya akan mendapatkan ketrampilan namun sekaligus perspektif untuk dalam melihat persoalan. Pada riset ini, secara total ternyata 77,78% responden mengaku pernah mengikuti pendidikan atau pelatihan tentang jurnalistik, namun masih ada 22,22% yang belum pernah mendapat pelatihan jurnalistik. Dilihat per lokasi, kondisi ini disajikan pada gambar dibawah ini:

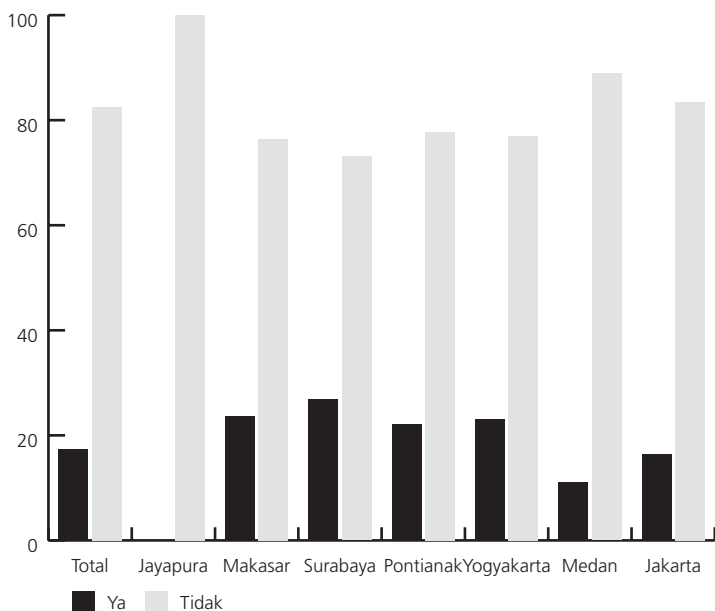


Grafik 1.7 **Pengalaman Pendidikan/Pelatihan Jurnalistik Berdasarkan Lokasi.**

Dapat dijelaskan dari tabel diatas ternyata jurnalis di Yogyakarta dan Surabaya adalah kelompok yang paling

banyak mempunyai pengalaman pelatihan jurnalistik, disusul Makassar, Pontianak. Jakarta, meskipun ibukota yang saat dekat dengan pusat pendidikan posisinya justru ada di peringkat ke-lima setelah Yogyakarta, Surabaya, Makassar dan Pontianak. Sementara itu, Jayapura berada di peringkat paling bawah, karena hanya 33,33% jurnalis perempuannya yang sudah pernah memperoleh pelatihan jurnalistik.

Kepada responden ditanyakan pula, apakah pernah mengikuti pelatihan jurnalistik dengan perspektif gender. Pertanyaan ini sangat penting untuk melihat keberpihakan jurnalis perempuan pada isu-isu perempuan dan kepedulian media pada isu-isu yang terkait dengan perempuan dan jurnalisnya di media. Hasilnya total 17,46% jurnalis perempuan menyatakan pernah mendapatkan pelatihan gender, sementara 82,56% belum pernah. Berdasarkan pembagian lokasi, hasil dari pertanyaan ini ditampilkan pada grafik dibawah ini:



Grafik 1.8 **Pengalaman Pendidikan/Pelatihan Jurnalistik Perspektif Gender Berdasarkan Lokasi.**

Hasilnya, berbanding lurus dengan pertanyaan sebelumnya, dimana para jurnalis perempuan di Yogyakarta dan Surabaya masih menempati posisi tertinggi, sementara di Jayapura, seluruh responden (100%) sama sekali belum pernah mendapat pelatihan gender.

3.3 Posisi/Jabatan Saat Ini

Pada penelitian ini, 94,18% responden berstatus sebagai reporter yang artinya lebih banyak bekerja di lapangan mencari berita. Jadi kira-kira tak sampai 6% jurnalis perempuan yang menduduki posisi sebagai redaktur maupun pengambil keputusan di redaksi.

Ini menjadi hal penting untuk melihat bagaimana media memposisikan jurnalis perempuan selama ini. Apakah jurnalis perempuan diposisikan sebagai pengambil kebijakan? Jika ada, berapa jumlah mereka di media?. Pertanyaan tentang ini dijawab oleh Azzam Karam dari *International Institute for Democracy and electoral Assistan* (IDEA). Azzam Karam pernah menuliskan: meningkatkan partisipasi dan jumlah perempuan menjadi hal yang sangat penting untuk melihat bagaimana perempuan dapat mempengaruhi secara aktual terhadap proses dan partisipasi mereka, sekaligus bagaimana para perempuan mengidentifikasi dirinya dan berbuat sesuatu untuk lingkungannya. Untuk itu, menjadi pengambil kebijakan di media menjadi sesuatu yang penting bagi jurnalis perempuan, Karena di posisi inilah kita bisa mengambil kebijakan untuk perjuangan para jurnalis perempuan. Namun sayang, ternyata masih sangat sedikit jumlah jurnalis perempuan yang duduk di dalamnya.

Ini adalah data Komposisi keseluruhan jurnalis perempuan berdasarkan posisinya, ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.3 **Posisi/Jabatan Saat Ini**

Kota	Editor	Kasi Program	Pemred	Produser	Redaktur	Reporter	Total
Jakarta	1			2	2	86	91
Makassar					1	9	10
Medan				1		17	18
Jayapura			1		1	7	9
Pontianak						9	9
Surabaya		1			1	24	26
Yogyakarta						26	26
Total	1	1	1	3	5	178	189

Dari data terlihat, jurnalis perempuan yang duduk sebagai pemimpin redaksi : 1 orang, Editor : 1 orang, kepala seksi program: 1 orang, Produser: 3 orang, Redaktur: 5 orang dan sebagai reporter : 178 orang.

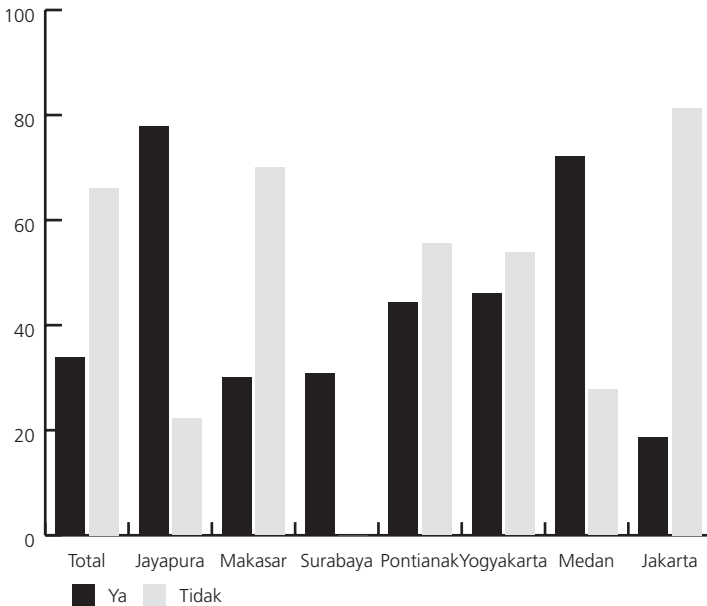
3.4 Keanggotan pada Organisasi Jurnalis

Menjadi anggota sebuah organisasi menjadi isu penting bagi AJI. Karena dengan berorganisasi maka jurnalis perempuan diharapkan untuk secara bersama-sama memetakan apa kebutuhan jurnalis perempuan dan menggagas ide-ide baru tentang membangun kapasitas dan organisasi jurnalis perempuan. Karena para jurnalis perempuan yang banyak berkiprah di isu-isu perempuan meyakini, bahwa perempuan harus diberikan ruang untuk mengorganisir dirinya, mengenali kebutuhannya dan berjuang dari ketertinggalan. Berbagai macam organisasi yang bisa dibangun oleh jurnalis perempuan. Jika di media tempat mereka bekerja ada serikat pekerja, maka jurnalis perempuan bisa menyalurkan ide tentang serikat

pekerja yang berperspektif perempuan. Atau jika masuk di dalam organisasi jurnalis, maka jurnalis perempuan bisa membangun organisasi jurnalis yang berperspektif perempuan. Dengan cara-cara inilah maka para jurnalis perempuan mulai mengorganisir dirinya dan kebutuhan-kebutuhan mereka.

Selanjutnya, dalam perspektif perempuan misalnya, organisasi ini sangat perlu agar perempuan secara bersama-sama mengidentifikasi persoalan yang mereka alami dan memposisikan mereka menjadi sesuatu yang diperhitungkan.

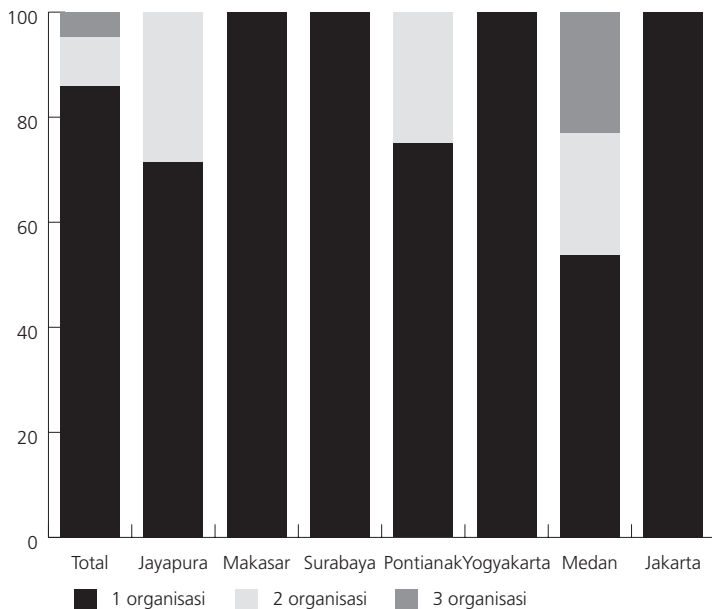
Pada penelitian ini para jurnalis perempuan juga ditanyakan tentang organisasi kewartawanan dimana mereka menjadi anggota, secara total menunjukkan baru 33,86% yang menjadi anggota dari beberapa organisasi, sisanya 66,64% sama sekali tidak terlibat dalam organisasi menyangkut profesi mereka. Hasil selengkapnya disajikan pada grafik di bawah ini:



Grafik 1.9 Keanggotan Di Organisasi Kewartawanan per Lokasi

Dari grafik di atas terlihat, sebagian besar responden di Jakarta (81,32%) diikuti Makassar (70,00%) belum menjadi anggota berbagai organisasi profesi wartawan, sementara sebaliknya di Jayapura sebagian besar (77,78%) diikuti Medan (72,22%) sudah menjadi anggota organisasi. Di Surabaya seluruh responden (100%) sudah menjadi anggota organisasi kewartawan. Di daerah lain komposisi antara anggota dan non anggota cukup berimbang.

Dari responden yang sudah bergabung dalam organisasi, penelitian ini juga mencatat ada beberapa responden yang aktif lebih di satu organisasi seperti ditampilkan pada grafik di bawah ini:



Grafik 1.10 **Banyaknya Organisasi Kewartawanan yang Diikuti.**

KETERANGAN : JAWABAN GANDA

Berdasarkan grafik diatas, sebagian besar responden di semua lokasi penelitian hanya menjadi anggota dalam satu

organisasi, namun di Jayapura dan Pontianak hanya ditemui beberapa jurnalis perempuan yang aktif dalam dua organisasi sekaligus, lebih menarik di Medan ada 23,1% responden yang merupakan anggota di tiga organisasi. Masing-masing yang menjadi anggota organisasi ini ada yang membangun organisasi dari perspektif perempuan, namun lebih banyak jurnalis yang belum membangun organisasi dengan perspektif perempuan.

Tabel 1.5 **Jenis Organisasi Jurnalis yang Diikuti**

Row Labels	Jakarta	Makassar	Medan	Jayapura	Pontianak	Surabaya	Yogyakarta	Grand Total
Persatuan Wartawan Indonesia	4	1	10	4	1	2	11	33
Aliansi Jurnalis Independen	6	1		4	3	1	1	16
Angkatan Jurnalis Televisi Indonesia			4			3		7
Forum Jurnalis Perempuan Indonesia			3					3
Poros Wartawan Jakarta	2							2
Forum Jurnalis Wanita Indonesia			2					2
Aliansi Wartawan Radio Indonesia						1		1
FEPI			1					1
Forum Jurnalis Kampus Atmajaya	1							1
Forum Komunikasi Wartawan Ekonomi & Moneter	1							1
Forum Wartawan Jakarta	1							1
Forum Wartawan Kejaksaan	1							1
Pers Mahasiswa Indonesia	1							1
Persatuan Jurnalis Indonesia		1						1
Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia						1		1
Ikatan Perempuan Pelaku Media					1			1
Komunitas Jurnalis Bencana				1				1
Asosiasi Media Online Indonesia			1					1
Paguyuban Wartawan Hukum			1					1

AJI misalnya, mempunyai divisi perempuan dalam organisasinya. Ini untuk membangun organisasi dengan

perspektif perempuan. Beberapa organisasi lain juga mulai dibangun jurnalis perempuan, seperti membangun Forum Jurnalis Perempuan Indonesia, Forum Jurnalis Wanita Indonesia maupun Ikatan perempuan pelaku media. Pada dasarnya, organisasi berdiri untuk membangun kapasitas dan kebutuhan jurnalis perempuan. •

BAB III B

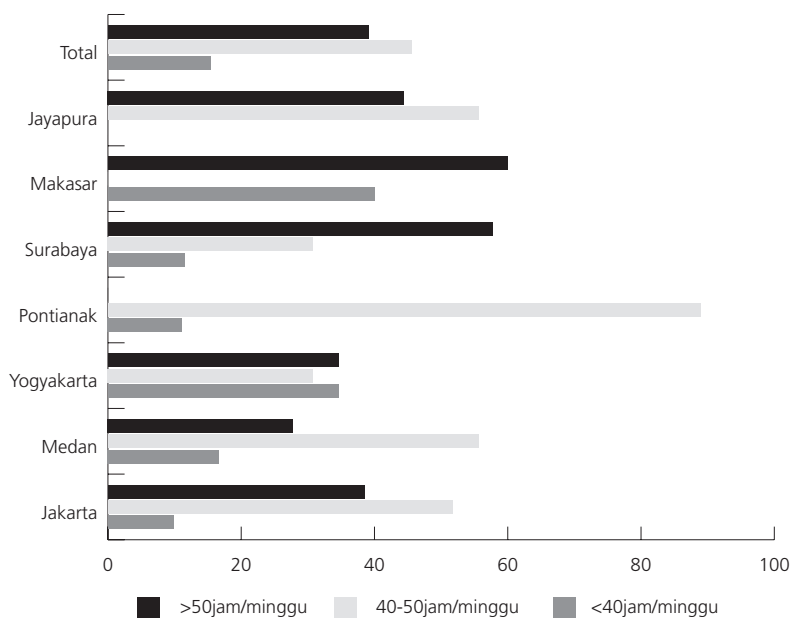
Waktu Kerja, Gaji, Tunjangan dan Fasilitas

Penelitian ini menunjukkan hingga hari ini jurnalis perempuan juga belum banyak yang mengambil jatah untuk cuti haid karena kurang begitu populernya hak cuti haid ini. Para perempuan jurnalis yang sedang menyusui juga belum diberikan waktu khusus untuk menyusui. Tidak ada perbedaan gaji antara jurnalis perempuan dan laki-laki, namun penelitian menunjukkan bahwa gaji jurnalis perempuan masih dibawah standar Upah Layak Jurnalis. Persoalan lain yang dialami jurnalis perempuan adalah belum banyaknya perusahaan yang menyediakan ruang khusus untuk menyusui. Hal lain sebanyak 51,8% jurnalis perempuan belum mendapatkan fasilitas peliputan di malam hari.

DALAM hitungan industri, lamanya waktu kerja perminggu selalu dianggap sangat menentukan produktivitas jurnalis. Namun penilaian ini sering hanya menguntungkan jurnalis laki-laki saja. Karena beban pekerjaan laki-laki umumnya kebanyakan hanya berkiprah di sektor publik. Perempuan

jurnalis yang tak hanya bekerja secara publik namun juga bekerja di domestik sering tidak diperhitungkan. Padahal hitungan ini seharusnya masuk. Banyak kasus misalnya para perempuan jurnalis yang sedang menyusui anaknya. Di saat istirahat ia membutuhkan waktu untuk menyusui. Otomatis waktu untuk istirahatnya jadi berkurang. Namun hitungan ini kadang tidak masuk dalam hitungan manajemen media. Tak hanya waktu, jam kerja jurnalis yang melebihi 8 jam setiap hari seringkali juga diabaikan oleh perusahaan media.

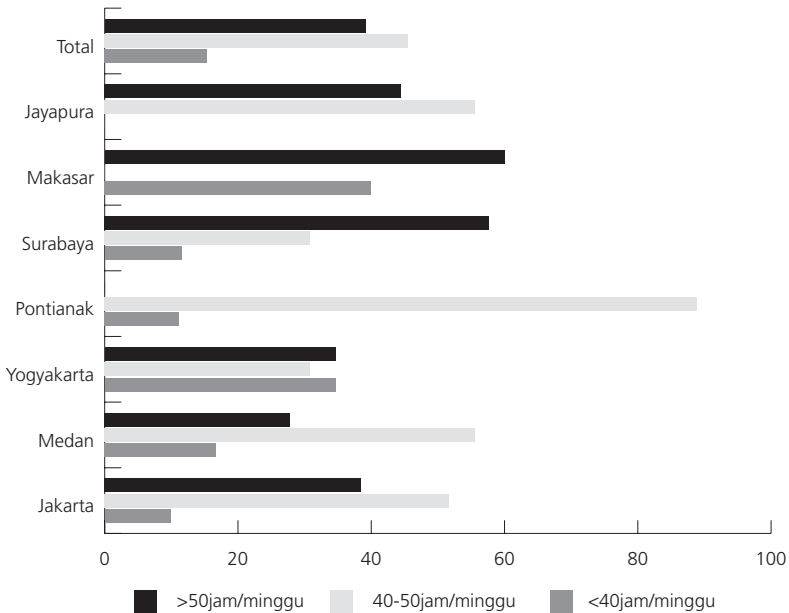
Penelitian ini selanjutnya mencoba melihat waktu kerja jurnalis laki-laki dan jurnalis perempuan serta membuat perbandingan diantara keduanya.



Grafik 2.1 Jumlah Jam Kerja Jurnalis Perempuan Per Minggu

Dari gambar terlihat sebagian besar jurnalis perempuan bekerja dengan jam kerja 40-50 jam per minggu, dimana kondisi ini ada di Pontianak sebagai peringkat pertama (88,89%) diikuti Jayapura dan Medan masing-masing 55,56%.

Responden di Makassar dan Surabaya ternyata memiliki jam kerja paling lama setiap minggunya yaitu berturut-turut 60,00% dan 57,69% lebih dari 50 jam per minggu. Sementara itu, responden yang bekerja kurang dari 40 jam per minggu masih cukup besar persentasenya di Makassar (40%) dan Yogyakarta (34,62%). Di sisi lain, responden juga diminta menjawab jam kerja jurnalis laki-laki per minggu di tempat mereka bekerja sesuai dengan pengetahuan mereka. Hasilnya disajikan pada grafik berikut ini:



Grafik 2.2 Jumlah Jam Kerja Jurnalis Laki-Laki Per Minggu

Pada pertanyaan ini ada 50 orang responden yang tidak dapat menjawab, karena mereka tidak mengetahui jam kerja rekan jurnalis laki-laki, meski demikian hasilnya cukup dapat memberikan gambaran. Tidak jauh berbeda dengan jurnalis perempuan, jam kerja jurnalis laki-laki pun mayoritas ada di kisaran 40-50 jam per minggu. Makassar dan Surabaya mempunyai jam kerja tertinggi, dimana jurnalis laki-laki di daerah tersebut juga bekerja lebih dari 50 jam per minggu

sama dengan jurnalis perempuannya. Secara lebih detail, perbandingan jam kerja mayoritas jurnalis di setiap lokasi ditampilkan pada tabel berikut.

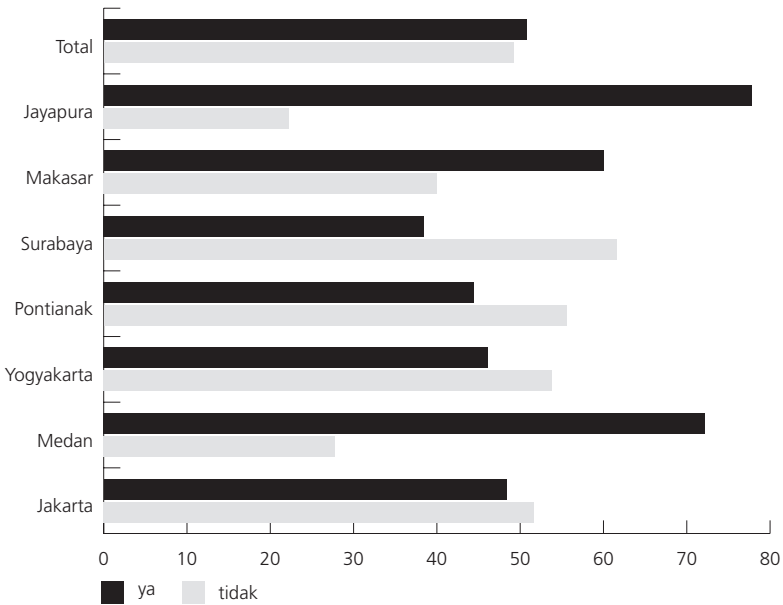
Tabel 2.1 **Perbandingan Jam Kerja Rata-Rata Antara Jurnalis Laki-Laki dan Jurnalis Perempuan**

	Laki-Laki	Perempuan
Jakarta	40 - 50 jam / minggu	40 - 50 jam / minggu
Makassar	> 50 jam / minggu	> 50 jam / minggu
Medan	40 - 50 jam / minggu	40 - 50 jam / minggu
Jayapura	> 50 jam / minggu	40 - 50 jam / minggu
Pontianak	40 - 50 jam / minggu	40 - 50 jam / minggu
Surabaya	> 50 jam / minggu	> 50 jam / minggu
Yogyakarta	> 50 jam / minggu	> 50 jam / minggu

Dari perbandingan tersebut, secara umum tidak ada perbedaan kerja antara jurnalis perempuan dan laki-laki. Di semua daerah, banyaknya jam kerja rata-rata antara jurnalis laki-laki dan perempuan relatif sama. Hanya Jayapura yang mempunyai perbedaan dimana jam kerja jurnalis laki-laki lebih banyak daripada jurnalis perempuan.

Sedangkan untuk jam istirahat, secara keseluruhan 50,79% mengatakan media tempatnya bekerja mempunyai jam istirahat khusus, namun yang tidak pun tidak jauh berbeda yaitu mencapai 49,21%. Hal ini menunjukkan masih ada media memang tidak menetapkan waktu istirahat khusus. Kebijakan ini dikeluarkan mengingat sifat pekerjaan wartawan yang lebih banyak di lapangan. Jadi jam istirahat antara jurnalis perempuan dan laki-laki sama. Dari sini dengan sendirinya menunjukkan bahwa tidak ada kebijakan waktu khusus bagi jurnalis perempuan yang sedang hamil maupun menyusui. Padahal seharusnya perusahaan media mengeluarkan ini dalam peraturan tertulis.

Hasil selengkapnya untuk setiap lokasi ditampilkan pada grafik di bawah ini.



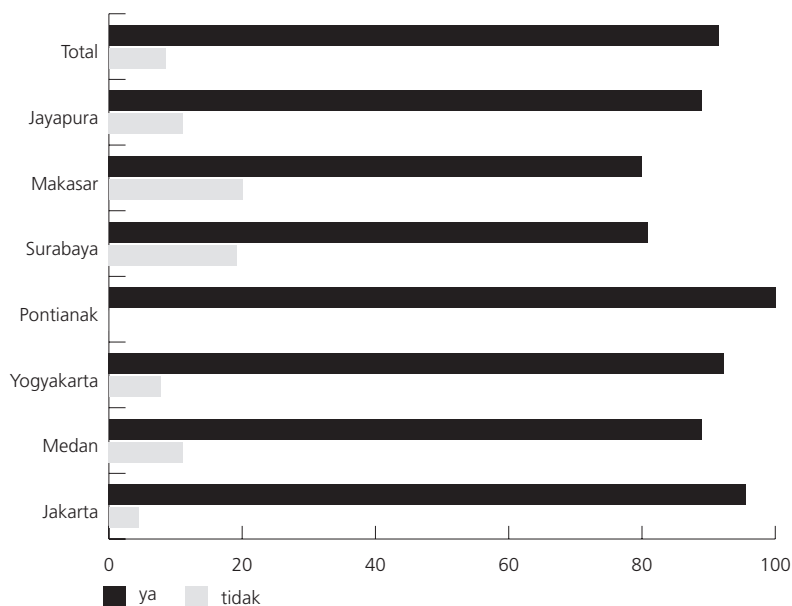
Grafik 2.3 **Pemberian Waktu Istirahat**

Ternyata, dari tujuh lokasi yang disurvei, empat lokasi yaitu Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, dan Pontianak sebagian besar medianya tidak menyediakan waktu istirahat secara khusus. Tiga daerah lain, Jayapura, Medan dan Makassar secara signifikan menunjukkan, media media di daerah tersebut memberikan waktu istirahat khusus bagi karyawannya. Namun inipun sifatnya umum.

3.1 Gaji Bulanan

Pertanyaan tentang berapakah gaji bulanan bagi jurnalis perempuan menarik untuk ditanyakan. Ini tak lain untuk mengetahui apakah ada perbedaan gaji antara jurnalis laki-laki dan perempuan yang diberikan perusahaan media. Status

responden pada penelitian ini bukan hanya jurnalis tetap, tetapi juga ada beberapa jurnalis perempuan yang berstatus *freelance*. Umumnya jurnalis *freelance* ini dibayar sesuai berita yang berhasil diliput. Karena itu, ditanyakan kepada mereka, apakah ada gaji rutin yang diberikan setiap bulannya. Hasilnya disajikan pada grafik di bawah ini:

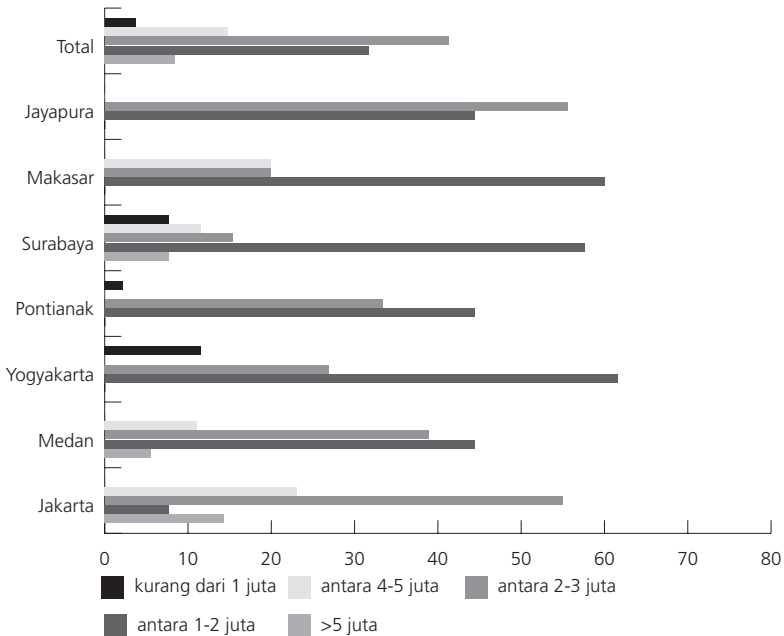


Grafik 2.4 Pemberian Gaji Rutin Bulanan

Secara total 91,53% jurnalis perempuan sudah mendapatkan gaji rutin perbulan tanpa melihat statusnya sebagai karyawan tetap atau kontrak, namun masih ada 8,47% yang belum menerima gaji rutin. Hal ini terjadi karena masih ada jurnalis perempuan yang berstatus *freelance*. Daerah tertinggi yang belum memberikan gaji rutin bulanan adalah Makassar (20,00%), hal ini sejalan dengan kondisi bahwa 20% responden di Makassar masih berstatus *freelance*.

Sementara itu, besarnya pendapatan atau total gaji yang diterima para jurnalis perempuan setiap bulan ditampilkan

pada gambar dibawah ini:



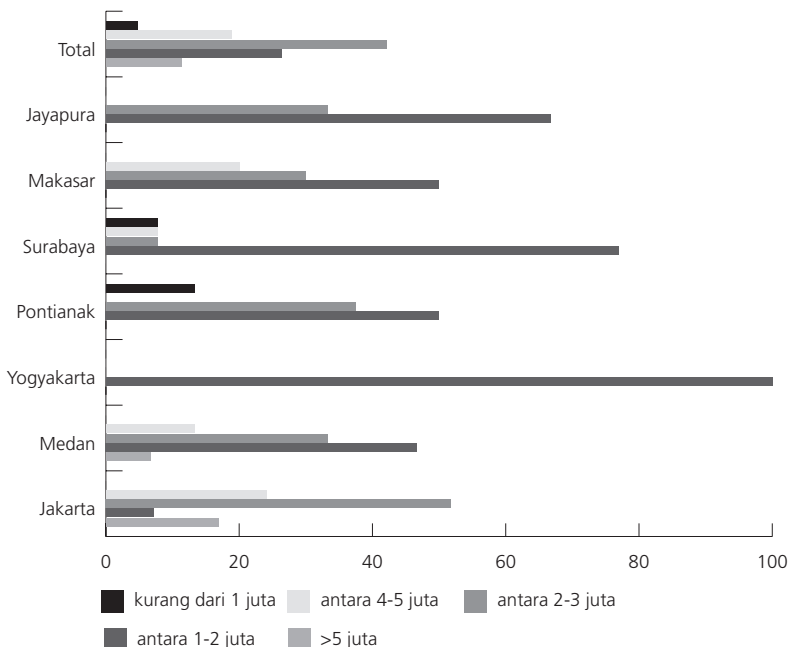
Grafik 2.5 **Pendapatan Bulanan Jurnalis Perempuan Per Bulan**

Grafik diatas menjelaskan, pada 5 lokasi yaitu; Makassar, Medan, Pontianak, Surabaya dan Yogyakarta gaji bersih (*take home pay*) rata-rata berada pada kisaran Rp 1-2 juta per bulan. Terjadi perbedaan hanya di Jakarta dan Jayapura yaitu Rp 2-3 juta per bulan. Perbedaan ini salah satunya dapat dijelaskan perbedaan UMR di setiap lokasi. Karena data ini diambil di tahun 2011, maka gaji jurnalis perempuan di Makassar, Medan, Pontianak, Surabaya, Yogyakarta, Jakarta dan Jayapura ini tidak sesuai dengan kampanye upah layak yang dilakukan AJI di tahun 2011. Standar upah layak yang dikeluarkan AJI selalu menyesuaikan kebutuhan riil jurnalis setiap tahunnya yang mencakup: papan, pangan, sandang yang disesuaikan dengan Upah Minimum Kota (UMK).

Hasil survey AJI menyebutkan upah layak jurnalis di jakarta

adalah sebesar: Rp. 4.748.919, sedangkan di Surabaya: Rp. 3.864.850, Yogyakarta: Rp. 3.147.980, Medan: Rp. 3.816.120, Pontianak: Rp. 3.526.600, Sedangkan di Makassar: Rp. 4.037.226, dan Jayapura: Rp. 6.414.320. Penelitian dengan sendirinya menunjukkan bahwa gaji jurnalis perempuan tidak sesuai dengan Upah layak Jurnalis.

Selanjutnya seperti halnya pertanyaan jam kerja, Jurnalis perempuan juga diminta untuk menyebutkan gaji jurnalis laki-laki yang bekerja di media yang sama dengan responden. Sebanyak 56 responden tidak dapat menjawab pertanyaan ini, namun selebihnya menjawab seperti dijelaskan pada grafik dibawah ini.



Grafik 2.6 **Pendapatan Bulanan Laki-Laki Per Bulan**

Hasilnya, sama dengan gaji pada jurnalis perempuan, hampir di semua daerah kecuali Jakarta ada di kisaran Rp 1-2 juta per bulan. Tabel di bawah ini menjelaskan gaji rata-rata

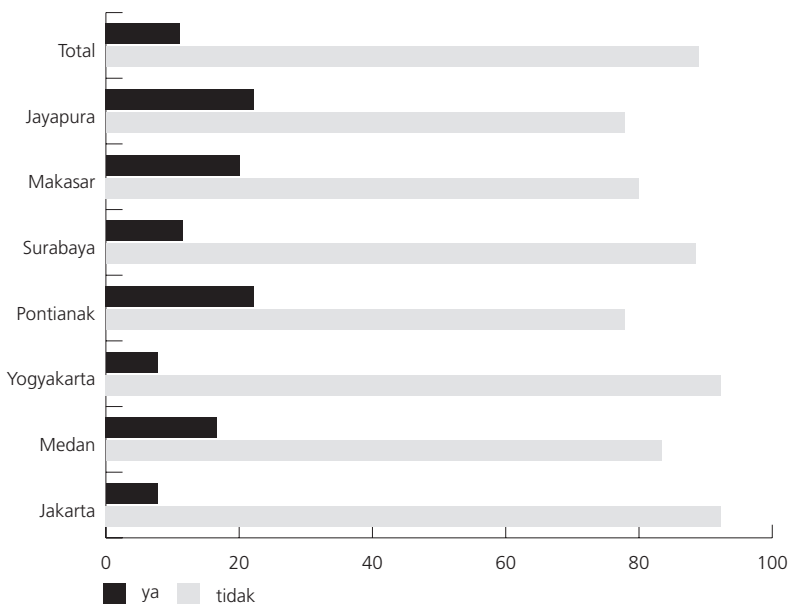
kelompok jurnalis perempuan dan laki-laki

Tabel 2.2 **Perbandingan Gaji Rata-Rata Antara Jurnalis Laki-Laki dan Jurnalis Perempuan**

	Laki-Laki	Perempuan
Jakarta	antara 2 juta - 3 juta	antara 2 juta - 3 juta
Makassar	antara 1 juta - 2 juta	antara 1 juta - 2 juta
Medan	antara 1 juta - 2 juta	antara 1 juta - 2 juta
Jayapura	antara 1 juta - 2 juta	antara 2 juta - 3 juta
Pontianak	antara 1 juta - 2 juta	antara 1 juta - 2 juta
Surabaya	antara 1 juta - 2 juta	antara 1 juta - 2 juta
Yogyakarta	antara 1 juta - 2 juta	antara 1 juta - 2 juta

Tabel diatas menunjukkan, tidak ada perbedaan gaji antara jurnalis perempuan dan laki-laki, hanya di Jayapura terdapat sedikit perbedaan karena gaji jurnalis perempuan lebih tinggi dibanding gaji laki-laki. Kondisi ini terjadi karena sebagian besar responden di Jayapura tidak bisa menjawab berapa gaji rekan jurnalis laki-laki. Hal ini mengindikasikan masih kurangnya keterbukaan tentang data gaji diantara para jurnalis.

Meskipun dari hasil tabulasi diatas, dapat disimpulkan tidak ada perbedaan dalam gaji antara jurnalis laki-laki dan perempuan, namun untuk menegaskan, pernyataan ini para jurnalis perempuan yang menjadi responden ditanyakan kembali, apakah menurut mereka ada diskriminasi dalam hal penggajian. Hasilnya disajikan pada tabel di bawah ini:



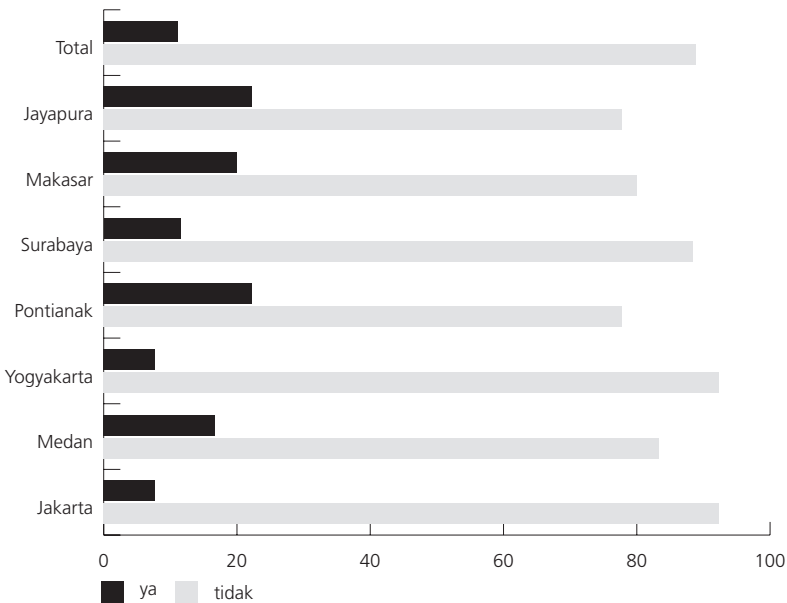
Grafik 2.7 **Diskriminasi dalam Hal Penggajian**

Total sebanyak 88,89% responden menyatakan tidak ada perbedaan, namun masih ada 11,11% merasakan adanya diskriminasi. Diskriminasi dalam soal penggajian yang terbesar dirasakan oleh para jurnalis perempuan di Pontianak dan Jayapura (masing-masing 22,22%), disusul Makassar (20,00%) dan Medan (16,67%). Jika diamati dari tabel pendapatan jurnalis perempuan dan jurnalis laki-laki yang cenderung sama bisa dikatakan tidak ada diskriminasi, namun hal ini memerlukan penggalan materi yang lebih jauh mengingat pendapatan jurnalis laki-laki yang ditampilkan pada bagian sebelumnya hanya merupakan opini atau sepengetahuan jurnalis perempuan yang menjadi responden.

3.2 Tunjangan Tunjangan

1. Asuransi

Penyediaan asuransi terutama kesehatan dan jiwa sudah menjadi kewajiban bagi perusahaan. Dalam penelitian ini ternyata masih ada 30,69% media yang belum menyediakan asuransi bagi jurnalisnya. Secara lebih lengkap fasilitas asuransi di tiap lokasi penelitian ditampilkan dalam grafik berikut:



Grafik 2.8 Fasilitas Asuransi

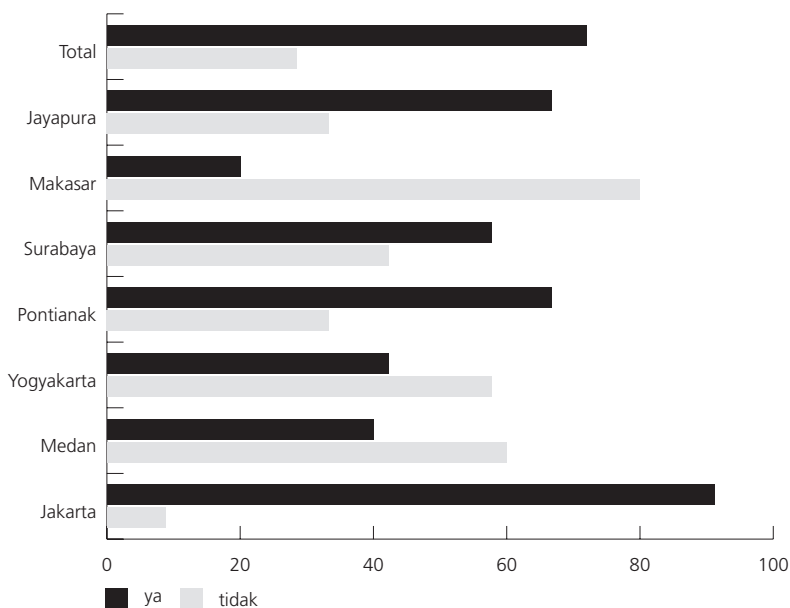
Dari grafik diatas, terlihat setiap media di hampir semua lokasi sudah menyadari pentingnya asuransi. Peringkat tertinggi berada pada media-media Ibukota dengan populasi sebesar 80,22%, disusul Surabaya (69,23%) serta Pontianak dan Medan (masing-masing 66,67%). Sayangnya di Yogyakarta ditemukan komposisi media yang tidak memberikan asuransi lebih besar (57,69%) dibandingkan yang menyediakan asuransi (42,31%). Kondisi ini tentu saja membutuhkan kajian lebih lanjut yang mendalam. Para jurnalis perempuan menyatakan

bahwa sejauh ini tidak ada diskriminasi untuk pemberian asuransi antara jurnalis perempuan dan laki-laki.

2. Jamsostek

Selain asuransi, peraturan ketenagakerjaan di Indonesia juga mewajibkan setiap perusahaan yang sudah memenuhi beberapa kriteria, menyediakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) bagi karyawannya. Pada penelitian ini diperoleh hasil secara signifikan hampir semua media (71,96%) sudah menyediakan Jamsostek, meskipun masih ada 28,04% yang belum menjadi peserta Jamsostek.

Secara lebih detail, hasil per geografis ditampilkan pada grafik di bawah ini.



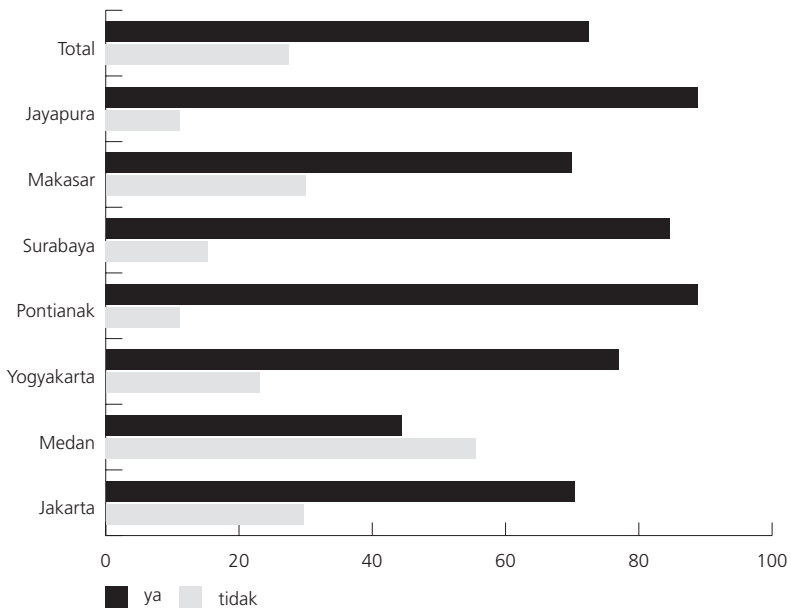
Grafik 2.9 Fasilitas Jamsostek

Hasilnya, seperti pada fasilitas asuransi, media di Jakarta tercatat sebagai media yang paling *concern* terhadap perlindungan ke karyawannya dengan 92,21% diantaranya

sudah menjadi peserta Jamsostek. Di daerah lain perbandingan antara media yang mengikuti dan tidak mengikuti Jamsostek cukup berimbang dengan kisaran perbandingan 60%:40%. Namun seperti pada fasilitas asuransi, Yogyakarta kembali masuk dalam lokasi dimana media yang beroperasi, mayoritas belum menjadi peserta Jamsostek. Makassar juga mengikuti kondisi Yogyakarta dimana hanya 40% media-nya yang mendaftar menjadi peserta Jamsostek. Para jurnalis perempuan juga menyatakan bahwa tidak ada perbedaan jamsostek antara jurnalis perempuan dibandingkan jurnalis laki-laki.

3. Tunjangan Makan

Jawaban untuk tunjangan makan ditampilkan dalam grafik di bawah ini.



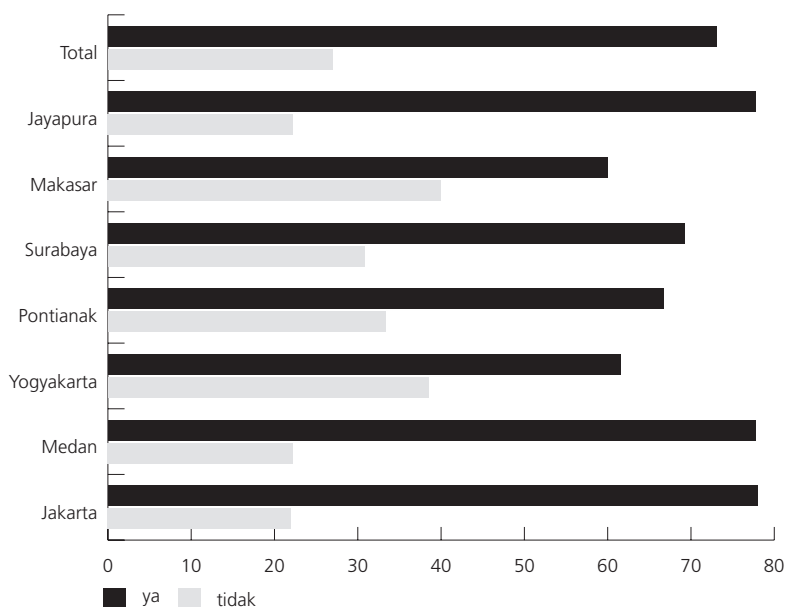
Grafik 2.10 **Tunjangan Makan**

Sebanyak 72,49% responden mengatakan medianya sudah memberikan tunjangan makan bagi karyawannya. Sementara

di Jayapura dan Surabaya menduduki peringkat tertinggi dalam jumlah media yang memberikan tunjangan ini, masing-masing 88,89%. Kondisi ini hampir terjadi di semua daerah dimana presentasi yang sudah dan yang belum berkisar dalam perbandingan 70%:30%, kecuali di Medan. Di Medan masih ada 55,56% media yang belum memberikan tunjangan jenis ini. Para jurnalis perempuan menyatakan tidak ada perbedaan yang diberikan antara jurnalis perempuan dibandingkan laki-laki dalam memperoleh tunjangan.

4. Tunjangan Transportasi

Tunjangan lain yang cukup penting bagi jurnalis adalah tunjangan transportasi. Hasil survei menunjukkan 73,02% jurnalis perempuan mengaku sudah mendapatkan tunjangan jenis ini. Di seluruh lokasi, persentasi pemberian tunjangan transportasi selalu lebih besar dibandingkan yang belum memberikan tunjangan ini. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

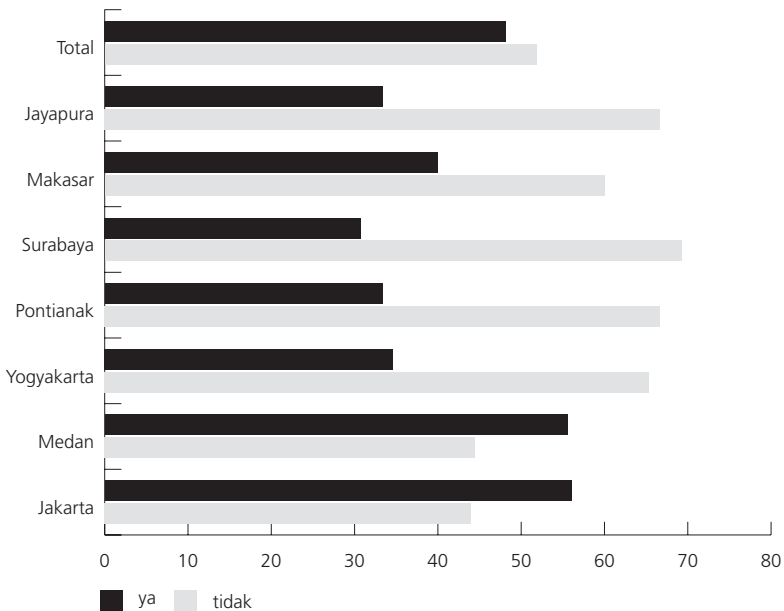


Grafik 2.11 Tunjangan Transportasi

Jakarta, Jayapura, Medan tercatat lebih dari tiga perempat medianya sudah memberikan tunjangan transportasi (dengan persentase masing masing diatas 75%). Daerah lain mempunyai perbandingan yang sudah dan belum dengan kisaran 60%: 40%.

5. Tunjangan Dinas Malam

Mengingat sifat pekerjaan jurnalis yang cenderung tidak mengenal waktu, adakalanya jurnalis perempuan pun bisa bertugas di malam hari yang rentan terhadap tindak kriminal. Karenanya sudah sepatutnya jurnalis (terutama jurnalis perempuan) mendapat fasilitas tambahan seperti tunjangan transportasi untuk kendaraan yang lebih aman seperti taksi atau fasilitas pengantaran dengan kendaraan kantor. Ketika hal tersebut ditanyakan kepada responden, secara total di semua daerah, 51,85% responden menjawab belum ada tunjangan jenis ini sementara sisanya (48,15%) menjawab ya. Jika dilihat per lokasi hasilnya, pada grafik dibawah ini;



Grafik 2.12 Tunjangan Dinas Malam Hari

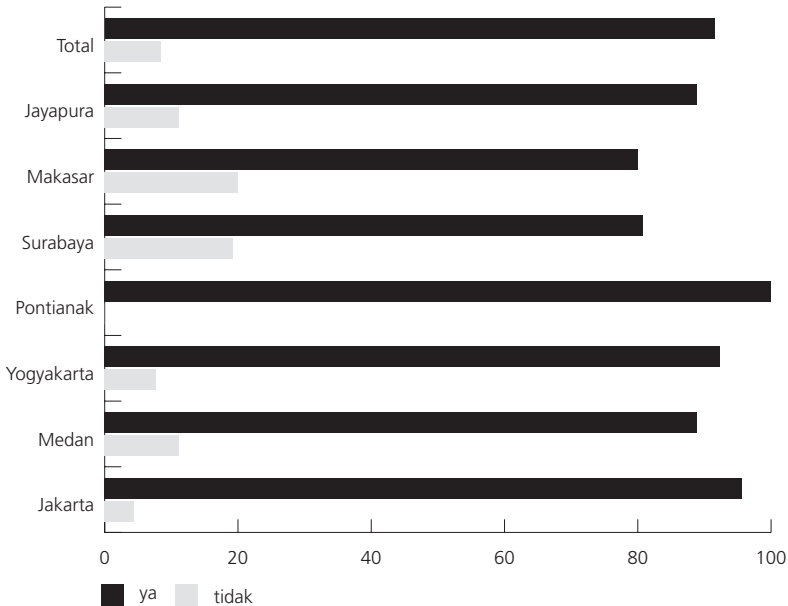
Terlihat, jenis tunjangan seperti itu, lebih banyak diberikan pada media-media yang bekerja di wilayah Jakarta dan Jayapura. Dengan demikian dapat dikatakan media-media di daerah tersebut sudah lebih *concern* mencermati kondisi lingkungan dan tindak kriminal yang mungkin saja menimpa para jurnalis perempuan. Di daerah lain, perbandingan antara media yang memberikan dan belum memberikan fasilitas tersebut cukup signifikan rata-rata ada di kisaran 65% berbanding 35%. Realita ini perlu mendapat perhatian serius dari manajemen media yang ada di tanah air. Karena dalam Upah layak yang dikeluarkan AJI pernah disebutkan bahwa jurnalis perempuan harus mendapatkan tunjangan dinas malam berupa pengantaran pulang dan makanan yang cukup selama bertugas dari jam 23.00 WIB- 05.00 WIB. Perusahaan juga terlihat tidak memberikan perlindungan khusus bagi para jurnalis perempuan yang hamil. Padahal ada peraturan khusus dalam UU Tenaga kerja misalnya yang menyebutkan bahwa jika perusahaan mempekerjakan jurnalis perempuan yang sedang hamil pada jam kerja ini maka harus ada surat keterangan dari dokter dulu yang memberikan rekomendasi atas kondisi kehamilan jurnalis perempuan. Namun peraturan ini belum dikeluarkan perusahaan baik di Jakarta maupun di daerah-daerah lain.

3.3 Cuti Cuti

1. Cuti Tahunan

Cuti tahunan sudah menjadi hal yang sangat lumrah dalam dunia kerja. Dalam tata perundangan ketenagakerjaan di Indonesia, cuti tahunan yang wajib diberikan adalah 12 hari dalam satu tahun dimana peraturan dan mekanismenya diatur kembali oleh masing-masing perusahaan. Pada penelitian ini, 91,53% Jurnalis perempuan mengatakan media tempatnya bekerja sudah memberikan hal cuti tahunan, namun untuk

Makassar dan Surabaya tercatat sebagai daerah tertinggi dimana mediana belum memberikan cuti tahunan dengan semestinya dengan nilai berturut turut 20,00% dan 19,23%. Ini masih sejalan dengan kondisi status kepegawaian dimana di dua daerah tersebut jurnalis yang berstatus non tetap (kontrak, *freelance* dan lain lain) lebih besar dibandingkan daerah lain. Hasil selengkapnya seperti dilihat pada tabel di bawah ini.

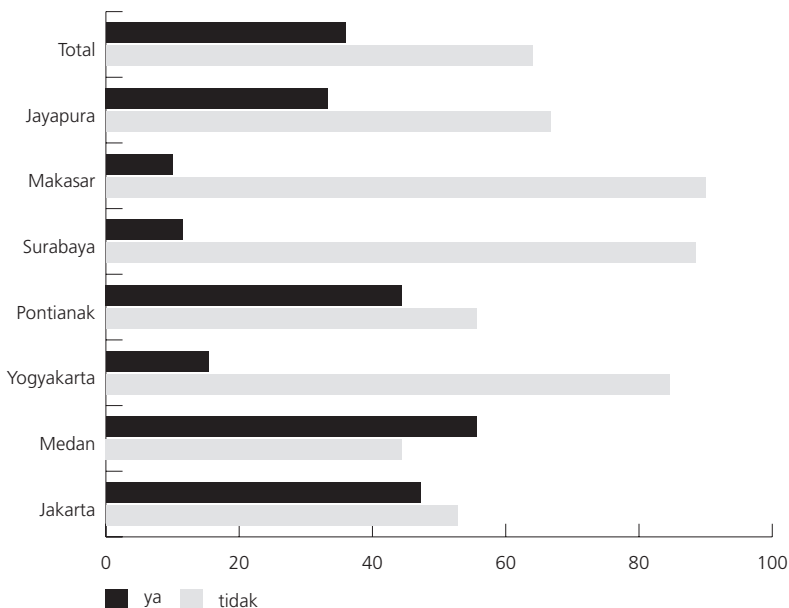


Grafik 2.13 **Pemberian Cuti Tahunan**

2. Cuti Khusus Wanita

Dalam penelitian ini, ada dua jenis cuti yang ditanyakan kepada responden, yaitu cuti haid dan cuti melahirkan. Merujuk Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 81 menyebutkan, idealnya setiap perusahaan memberikan hak cuti haid kepada pekerjanya sebanyak satu hingga dua hari setiap bulan dimana peraturannya diatur kembali oleh masing-masing perusahaan. Namun pada kenyataannya masih banyak perusahaan yang belum menerapkan peraturan ini. Dan

ternyata masih banyak jurnalis perempuan yang belum tahu adanya peraturan ini, terbukti dengan hasil survei berikut, seperti dijelaskan pada grafik di bawah ini.

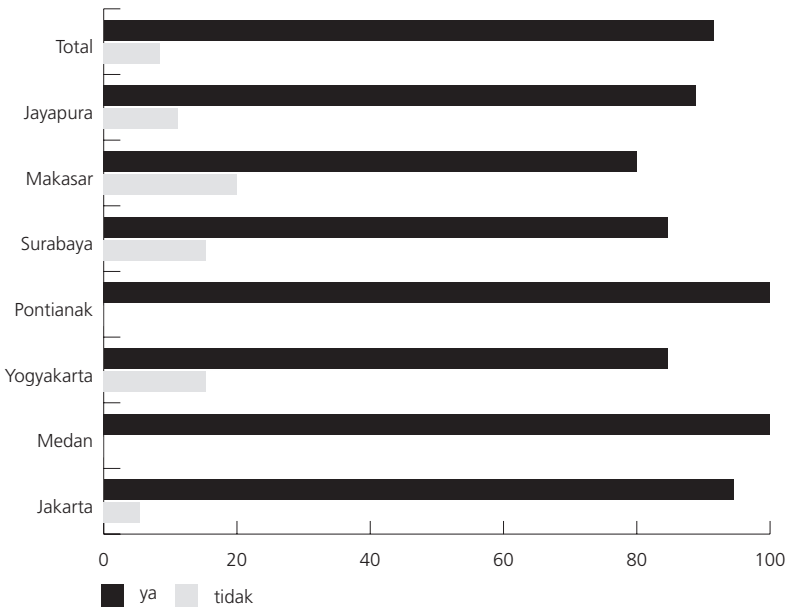


Grafik 2.14 Pemberian Cuti Haid

Terlihat pada grafik, perusahaan yang tidak memberikan cuti haid secara total mencapai 64,02% dan hanya 35,98% yang sudah mensosialisasikan peraturan ini kepada karyawannya. Dilihat per daerah, peraturan ini paling banyak digunakan di Medan (55,56%) diikuti Jakarta (47,25%) dan Pontianak (44,44%). Sementara hasil cukup signifikan terjadi di Makassar dimana 90% perusahaan sama sekali belum menerapkan aturan ini, kemudian berturut turut disusul Surabaya (88,46%) dan Yogyakarta (84,62%). Meskipun hingga saat ini, cuti haid masih menjadi pertentangan di banyak kalangan sudah seyogyanya media di Indonesia mulai memperhatikan dan memberlakukan hal ini. Mengingat bagi sebagian besar wanita, masa haid adalah masa yang tidak nyaman dan sering sekali disertai keluhan fisik dan psikis yang akhirnya justru

mengakibatkan turunnya produktivitas yang bersangkutan dalam pekerjaan.

Cuti lain yang sangat penting adalah cuti melahirkan. Cuti ini sudah sangat umum di Indonesia. Hasil survei ini menunjukkan 91,53% media di Indonesia sudah memberikan cuti hamil selama tiga bulan bagi karyawannya. Namun disayangkan masih ada 8,47% yang belum melakukan hal tersebut. Hasil selengkapnya disajikan pada grafik dibawah ini.

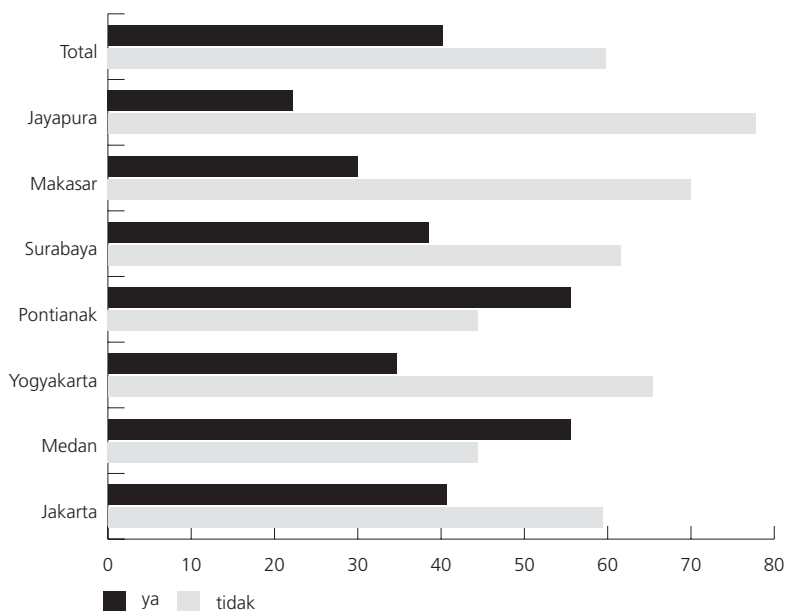


Grafik 2.15 **Pemberian Cuti Melahirkan**

Cuti melahirkan hampir diberikan oleh semua perusahaan kepada karyawan wanita. Namun masih ditemui di beberapa daerah persentasi media yang belum memberikan hak ini kepada karyawannya cukup besar, yaitu di Makassar (20,00%), Yogyakarta dan Surabaya (masing-masing 15,38%) dan Jayapura 11,11%. Perlu ditelaah lebih lanjut alasan masing-masing media yang belum memberikan hak cuti melahirkan ini.

3.4 Manajemen Laktasi dan Tempat Penitipan Anak

Survey selanjutnya menanyakan hak-hak reproduksi para jurnalis perempuan. Ini tak lain terkait dengan hak jurnalis perempuan untuk menyusui. Dua pertanyaan mendasar adalah; apakah kantor dimana jurnalis perempuan bekerja memberikan kesempatan untuk memberikan ASI kepada bayi (melakukan manajemen laktasi), berhubungan dengan itu ditanyakan pula apakah perusahaan menyediakan ruang khusus untuk menyusui. Hasil selengkapnya dijelaskan pada grafik di bawah ini.

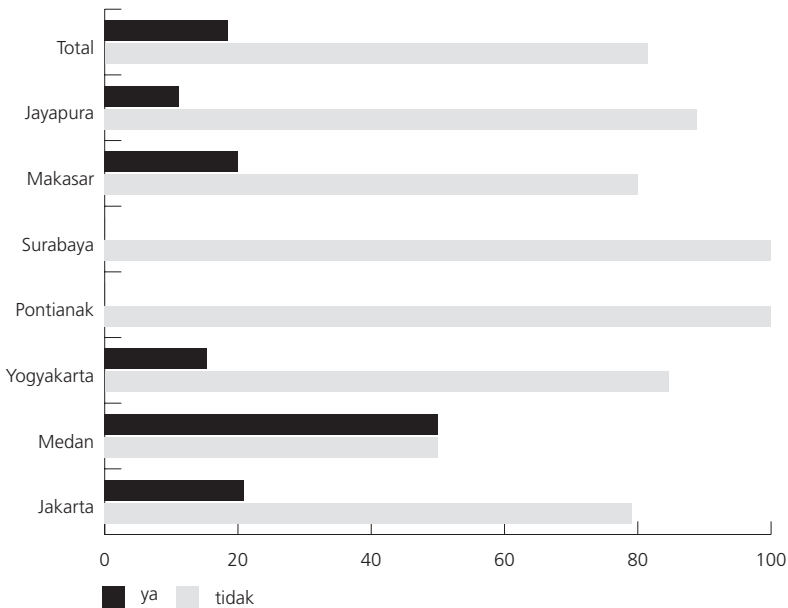


Grafik 2.16 **Kesempatan Manajemen Laktasi**

Manajemen laktasi memang belum umum diberikan secara khusus di berbagai perusahaan. Dari pengamatan sehari-hari, jurnalis perempuan umumnya mengatur sendiri hal ini. Secara general memang sebagian besar responden (59,79%) mengakui belum ada ketentuan mengenai hal ini dari media

tempatnya bekerja. Hampir di semua daerah mengalami hal yang sama, hanya di Medan dan Pontianak yang diakui sudah lebih banyak memberikan perhatian manajemen laktasi untuk para Ibu, dengan persentase masing-masing 55,56% berbanding 44,44% yang belum memberikan.

Perhatian terhadap manajemen laktasi salah satunya ditunjukkan dengan memberikan ruang khusus bagi para Ibu untuk memberikan ASI. Namun baru 18,52% perusahaan yang menyediakan ruang khusus untuk memberikan ASI. Hasil selengkapnya disajikan pada grafik di bawah ini.

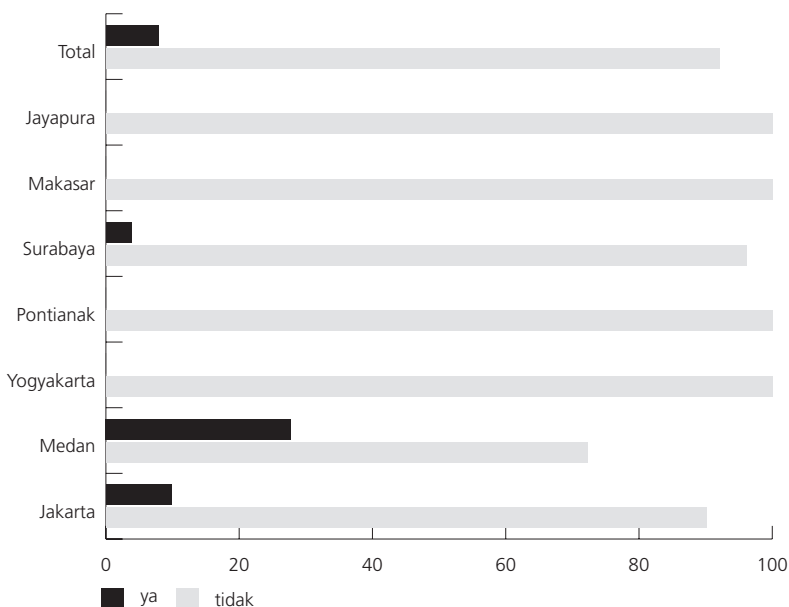


Grafik 2.17 Fasilitas Ruang Menyusui

Senada dengan perhatian terhadap manajemen laktasi seperti pada pertanyaan sebelumnya, Medan menempati posisi tertinggi untuk perusahaan yang sudah menyediakan ruang khusus pemberian ASI dengan persentase 50%. Di Pontianak, belum satu pun media yang memberikan ruang khusus untuk memberikan ASI. Begitu pula dengan Surabaya.

Daerah daerah lain sudah ada yang menyediakan ruang khusus meski baru berkisar 15%-20% dari jumlah media yang ada.

Dua pertanyaan diatas, seharusnya didukung pula oleh penyediaan ruang penitipan anak di kantor. Kondisi seperti ini menjadi keharusan untuk ditanyakan mengingat banyak jurnalis perempuan bekerja yang akhirnya membawa anaknya ke tempat bekerja. Berangkat dari hal tersebut survey ini juga menanyakan apakah kantor tempatnya bekerja menyediakan tempat penitipan anak. Ternyata fasilitas penitipan anak menjadi satu hal yang langka di media massa di tanah air, terlihat hanya 7,94% media yang menyediakan fasilitas ini. Hanya di Medan yang 27,78% media-nya memiliki fasilitas ini disusul daerah lain yaitu Jakarta (9,89%) dan Surabaya 3,85%. Hasil selengkapnya ditampilkan pada grafik di bawah ini.



Grafik 2.18 Fasilitas Tempat Penitipan Anak

Dari tiga pertanyaan terakhir, dapat disimpulkan bahwa kota Medan merupakan daerah dimana perhatian terhadap

Ibu menyusui dan balita paling tinggi dibandingkan daerah lain.

Dari uraian tunjangan dan fasilitas di atas, dilakukan pengamatan secara keseluruhan dengan cara melakukan pengelompokan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Rendah, jika jawaban ya < 50%
2. Sedang, jika jawaban ya, 50,99%-79,99%
3. Tinggi, jika jawaban ya > 80,00%.

Tabel 2.3 **Rekapitulasi Derajat Fasilitas Kerja**

	Jakarta	Makassar	Medan	Jayapura	Pontianak	Surabaya	Yogyakarta	TOTAL
Gaji Rutin	tinggi	sedang	sedang	tinggi	tinggi	tinggi	tinggi	tinggi
Asuransi	tinggi	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang	rendah	sedang
Jamsostek	tinggi	rendah	sedang	sedang	sedang	sedang	rendah	sedang
Tunjangan makan	sedang	sedang	rendah	tinggi	tinggi	tinggi	sedang	sedang
Tunjangan Transportasi	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang
Tunjangan transportasi malam	sedang	rendah	sedang	sedang	rendah	rendah	rendah	rendah
Cuti Tahunan	tinggi	tinggi	tinggi	tinggi	tinggi	tinggi	tinggi	tinggi
Cuti Hamil dan Melahirkan	tinggi	tinggi	tinggi	tinggi	tinggi	tinggi	tinggi	tinggi
Cuti Haid	rendah	rendah	sedang	rendah	rendah	rendah	rendah	rendah
Manajemen Laktasi	rendah	rendah	sedang	rendah	sedang	rendah	rendah	rendah
Ruang Menyusui	rendah	rendah	sedang	rendah	rendah	rendah	rendah	rendah
Penitipan Anak	rendah	rendah	rendah	rendah	rendah	rendah	rendah	rendah

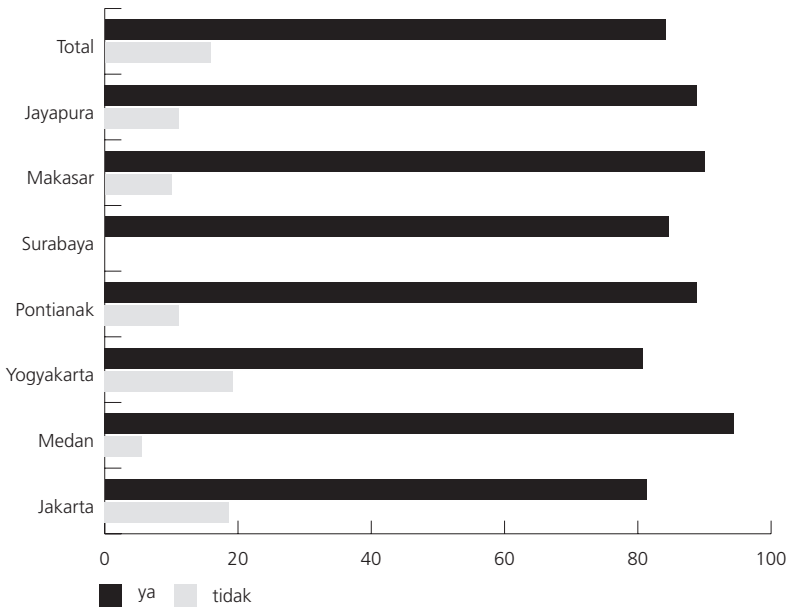
Pada tabel terlihat, dari 12 indikator hanya tiga indikator yaitu pemberian gaji rutin, cuti tahunan dan cuti hamil yang sudah diberikan secara mayoritas oleh lebih dari 80% media.

Sementara indikator asuransi, jamsotek, tunjangan makan, tunjangan transportasi sudah dilakukan oleh 50,00%-79,99% media di tanah air. Sementara itu, indikator tunjangan transportasi malam, cuti haid, manajemen laktasi, ketersediaan ruang menyusui dan ketersediaan ruang penitipan anak baru dilakukan kurang dari 50,00% media.

Jika dilihat per daerah, Jakarta tetap memegang peringkat tertinggi untuk banyaknya jumlah indikator dengan kategori tinggi, sementara Medan merupakan daerah dengan kategori sedang paling banyak dibandingkan daerah lain. Yogyakarta dapat disimpulkan sebagai daerah dimana medianya paling sedikit memberikan fasilitas dan tunjangan yang ditunjukkan dengan mayoritas indikator berada pada level rendah.

3.5 Kesempatan Pengembangan Diri

Jurnalis merupakan salah satu profesi yang diwajibkan untuk mengikuti perkembangan bidangnya. Karena itu, peluang untuk mengembangkan diri melalui pendidikan formal, nonformal dan informal sangat diperlukan untuk semua profesi. Selain itu secara internal, seperti halnya perusahaan lain, manajemen sebuah media seharusnya juga membuat kesempatan kenaikan jenjang secara struktural bagi para jurnalisnya. Pada survei ini, dua poin penting diatas menghasilkan output seperti dijelaskan di bawah ini.



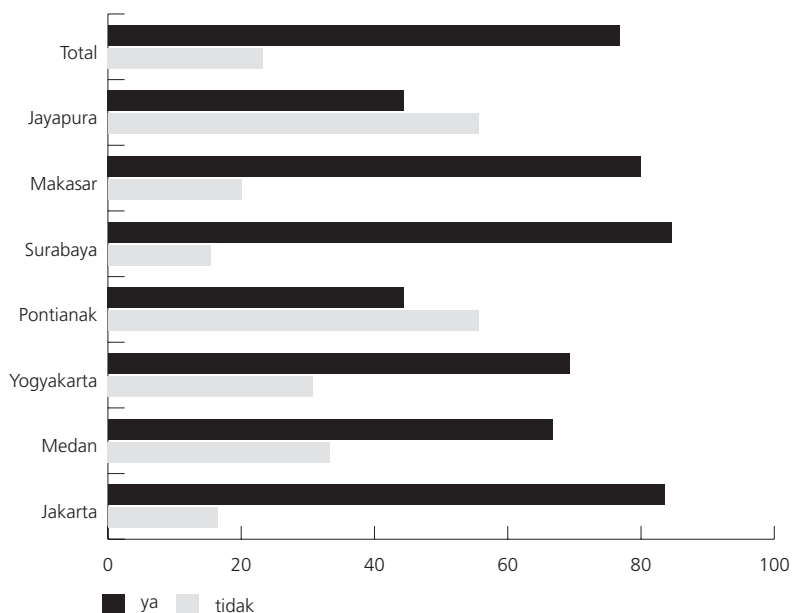
Grafik 2.19 **Kesempatan Mendapat Pendidikan Tambahan**

Pertama, ditanyakan kepada para jurnalis perempuan apakah di kantor mereka ada kesempatan untuk mendapatkan pendidikan tambahan (baik formal ataupun non formal) seperti studi lanjut, mengikuti pelatihan dan lain-lain. Ternyata 84,13% mengatakan ya dan hanya 15,87% yang mengatakan belum. Medan dan Makassar masing-masing 94,44% dan 90,00% menduduki peringkat tertinggi untuk pertanyaan ini. Berita baiknya ternyata di seluruh daerah kesempatan untuk mendapatkan pendidikan diakui sudah diberikan lebih dari 80% media. Hal ini tentu saja merupakan sinyal yang baik bagi dunia jurnalistik tanah air karena wartawan dengan kemampuan baik dan wawasan luas akan sangat menentukan kemajuan media di tanah air.

Ditambahkan pula dari hasil wawancara mendalam, media di tanah air kini tidak membedakan kesempatan untuk memperoleh pendidikan berdasarkan gender. Jurnalis laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama,

yang membedakan adalah kemampuan masing-masing jurnalis untuk mengembangkan diri setelah ilmu-ilmu baru itu terserap.

Sementara itu, untuk pertanyaan kedua tentang kesempatan peningkatan jenjang struktural pun dijawab seirama dengan pertanyaan sebelumnya, dimana 76,72% responden menjawab ya dan 23,28% menjawab tidak. Data selengkapnya ditampilkan pada grafik dibawah ini.



Grafik 2.20 **Kesempatan Jenjang Karir Struktural**

Hampir seluruh daerah mengatakan ya, kecuali Pontianak, dimana masih ada 55,56% media yang belum memberikan peluang peningkatan karir struktural. Untuk pertanyaan ini Surabaya menduduki peringkat pertama dimana 84,62% media disana sudah melakukan hal ini, disusul Jakarta (83,52%) dan Makassar (80%). Kondisi seperti ini juga merupakan indikasi yang baik bagi dunia kerja bahwa profesi jurnalis pun mempunyai jenjang karir yang jelas.

BAB III C

Harapan dan Kenyataan

Takhanya gaji yang memadai. Para Jurnalis perempuan juga berharap perusahaan tempat ia bekerja memberikan fasilitas yang baik bagi para jurnalisnya, seperti perlindungan kerja, transportasi yang nyaman di malam hari, juga tunjangan lain seperti asuransi dan uang makan yang memadai.

SEBENARNYA apa saja harapan para jurnalis perempuan di tempat mereka bekerja? Pertanyaan ini jarang ditujukan untuk jurnalis perempuan, karena umumnya media selalu menganggap bahwa kebutuhan jurnalis perempuan selalu sama dengan jurnalis laki-laki. Bab ini mengeluarkan sebuah pernyataan penting yaitu soalapa yang diharapkan para jurnalis perempuan di tempat mereka bekerja.

Temuan penelitian menyebutkan bahwa jurnalis perempuan belum puas dengan jam kerja yang panjang dan istirahat yang cukup. Selain itu yang masih jauh dari harapan adalah soal perlindungan kerja, cuti haid yang belum diberikan, juga ruang untuk menyusui dan penitipan anak yang masih sangat minim. Bahkan ketiga kebutuhan terakhir yaitu: cuti haid, ruang menyusui dan penitipan anak masih merupakan sesuatu

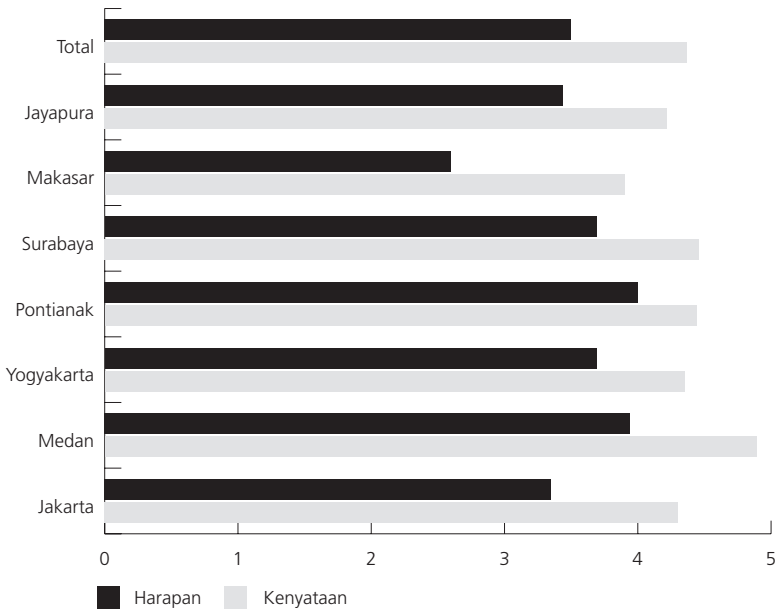
yang mewah bagi para jurnalis perempuan.

Para jurnalis perempuan mempunyai harapan besar soal ini. Agar perusahaan segera memberikan perlindungan bagi jurnalis perempuan, cuti haid, ruang menyusui dan penitipan anak. Soal perlindungan kerja dan fasilitas transportasi, AJI terus menerus mengkampanyekan agar jurnalis perempuan yang bekerja pada pukul 23.00 hingga 07.00 mendapatkan fasilitas transportasi.

Untuk harapan dan kenyataan pada penelitian ini, skala yang digunakan adalah 1-5, dimana semakin kecil nilainya berarti harapan atau kenyataan yang dirasakan responden juga makin kecil, begitu juga sebaliknya, semakin tinggi nilai yang diberikan maka akan menunjukkan harapan atau kondisi yang semakin tinggi pula. Metode ini diperlukan untuk melihat kesenjangan atau gap yang terjadi antara jurnalis perempuan dan laki-laki agar dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk kemajuan jurnalis perempuan. Selain itu secara tidak langsung sebagai referensi untuk melihat tingkat kepuasan jurnalis perempuan terhadap fasilitas yang ia terima dari media tempat ia bekerja.

3.1 Jam Kerja

Indikator pertama yang ditanyakan ke jurnalis perempuan adalah apakah harapan mereka terhadap jam kerja yang dijalani sekarang sudah cukup baik. Hasilnya secara total, seluruh responden berharap di angka 4,37 dari skala 5,00 sementara kenyataan yang sudah terjadi baru pada angka 3,50.



Grafik 3.1 **Harapan dan Kenyataan Jam Kerja**

Hampir seluruh daerah untuk indikator ini harapan respondennya tidak signifikan berbeda dengan kenyataan, yang ditunjukkan dengan selisih perbedaan yang tidak lebih dari 1,00 antara harapan dan kenyataan. Namun hal tersebut tidak terjadi di Makassar, dimana terjadi perbedaan cukup signifikan karena kenyataan yang dirasakan oleh jurnalis perempuan baru menyentuh angka 2,60 sementara harapannya mencapai 3,90. Hal ini memerlukan pengkajian lebih lanjut bisa saja salah satu faktornya disebabkan oleh jam kerja yang tidak seimbang dengan renumerasi yang diperoleh para jurnalis perempuan.

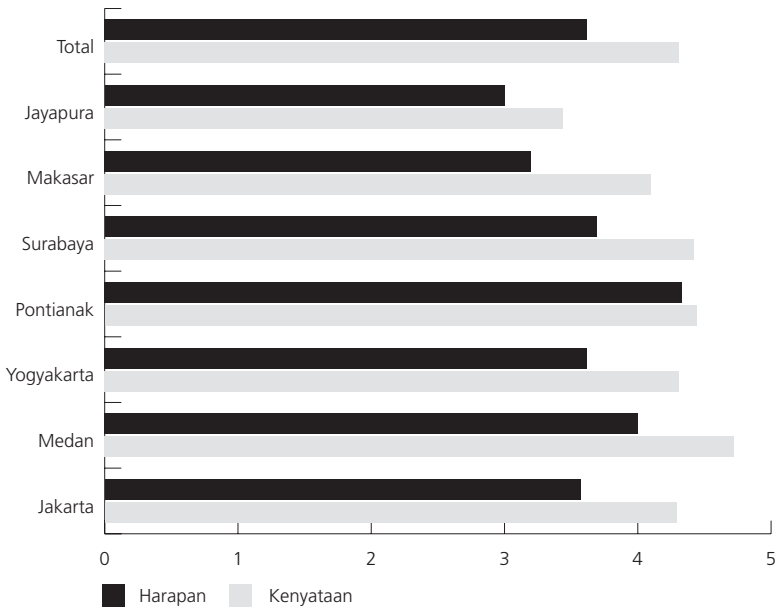
Tabel di bawah ini menampilkan persentase jurnalis perempuan untuk tiap jawaban di setiap lokasi.

Tabel 3.1 **Persentase Jumlah Responden untuk Harapan dan Kenyataan Jam Kerja**

Kota		1	2	3	4	5
Jakarta	<i>harapan</i>	0.00%	0.00%	15.38%	39.56%	45.05%
	<i>kenyataan</i>	4.40%	15.38%	36.26%	28.57%	15.38%
Makassar	<i>harapan</i>	0.00%	0.00%	50.00%	10.00%	40.00%
	<i>kenyataan</i>	20.00%	10.00%	60.00%	10.00%	0.00%
Medan	<i>harapan</i>	0.00%	0.00%	5.56%	0.00%	94.44%
	<i>kenyataan</i>	0.00%	5.56%	38.89%	11.11%	44.44%
Jayapura	<i>harapan</i>	0.00%	0.00%	22.22%	33.33%	44.44%
	<i>kenyataan</i>	0.00%	22.22%	33.33%	22.22%	22.22%
Pontianak	<i>harapan</i>	0.00%	0.00%	11.11%	33.33%	55.56%
	<i>kenyataan</i>	0.00%	11.11%	11.11%	44.44%	33.33%
Surabaya	<i>harapan</i>	0.00%	0.00%	7.69%	38.46%	53.85%
	<i>kenyataan</i>	0.00%	0.00%	38.46%	53.85%	7.69%
Yogyakarta	<i>harapan</i>	0.00%	0.00%	19.23%	26.92%	53.85%
	<i>kenyataan</i>	0.00%	15.38%	30.77%	23.08%	30.77%

3.2 Jam Istirahat

Setelah jam kerja, ditanyakan pula harapan mereka terhadap jam istirahat yang ideal. Hasilnya jurnalis perempuan berharap hingga 4,31 sementara kenyataan yang mereka rasakan ada di angka 3,62.



Grafik 3.2 **Harapan dan Kenyataan Jam Istirahat**

Pada pertanyaan ini di semua lokasi, kenyataan terhadap jam kerja nyaris tidak jauh berbeda dengan harapan setiap jurnalis perempuan, terbukti dengan selisih diantara keduanya yang tidak lebih dari 1,00. Makassar masih memegang selisih terbesar namun tidak signifikan dimana harapan responden rata-rata 4,10 sementara kenyataannya di level 3,20.

Tabel di bawah ini menampilkan persentase responden untuk tiap jawaban di setiap lokasi.

Tabel 3.2 **Persentase Jumlah Responden untuk Harapan dan Kenyataan Jam Istirahat**

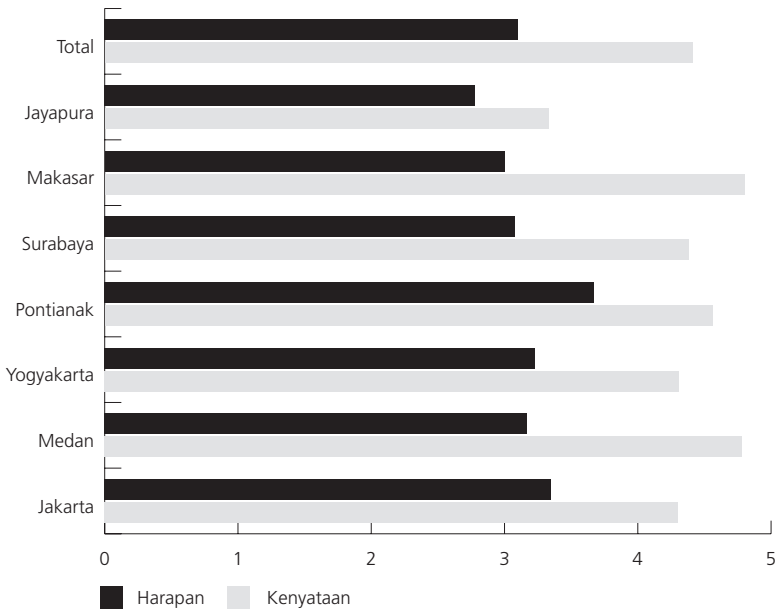
Kota		1	2	3	4	5
Jakarta	harapan	0.00%	0.00%	10.99%	49.45%	39.56%
	kenyataan	3.30%	7.69%	34.07%	38.46%	16.48%
Makassar	harapan	0.00%	0.00%	40.00%	10.00%	50.00%
	kenyataan	10.00%	10.00%	40.00%	30.00%	10.00%

Medan	harapan	0.00%	0.00%	5.56%	16.67%	77.78%
	kenyataan	0.00%	11.11%	22.22%	22.22%	44.44%
Jayapura	harapan	11.11%	0.00%	55.56%	0.00%	33.33%
	kenyataan	11.11%	22.22%	33.33%	22.22%	11.11%
Pontianak	harapan	0.00%	0.00%	11.11%	33.33%	55.56%
	kenyataan	0.00%	11.11%	0.00%	33.33%	55.56%
Surabaya	harapan	0.00%	0.00%	7.69%	42.31%	50.00%
	kenyataan	0.00%	11.54%	23.08%	50.00%	15.38%
Yogyakarta	harapan	0.00%	3.85%	15.38%	26.92%	53.85%
	kenyataan	3.85%	23.08%	11.54%	30.77%	30.77%

3.3 Perlindungan Kerja

Ditanyakan pula kepada jurnalis perempuan pendapat mereka tentang perlindungan kerja keseluruhan. Secara umum hasilnya menunjukkan harapan responden untuk indikator ini mencapai 4,41 sementara kenyataan yang mereka terima baru pada angka 3,10. Daerah yang paling tinggi gap-nya adalah Makassar karena kenyataan yang diterima responden adadi level 3,00 sementara mereka berharap hingga level 4,80. Kemudian disusul Medan dengan harapan 4,78 sementara kenyataan yang diterima masih 3,17.

Selisih paling kecil ada di Pontianak dengan harapan di angka 4,56 sementara kenyataannya sudah mencapai 3,67. Selanjutnya Jayapura dengan harapan 3,33 dan kenyataannya sudah mencapai 2,78.



Grafik 3.3 **Harapan dan Kenyataan Perlindungan Kerja**

Tabel di bawah ini menampilkan persentase responden untuk tiap jawaban di setiap lokasi.

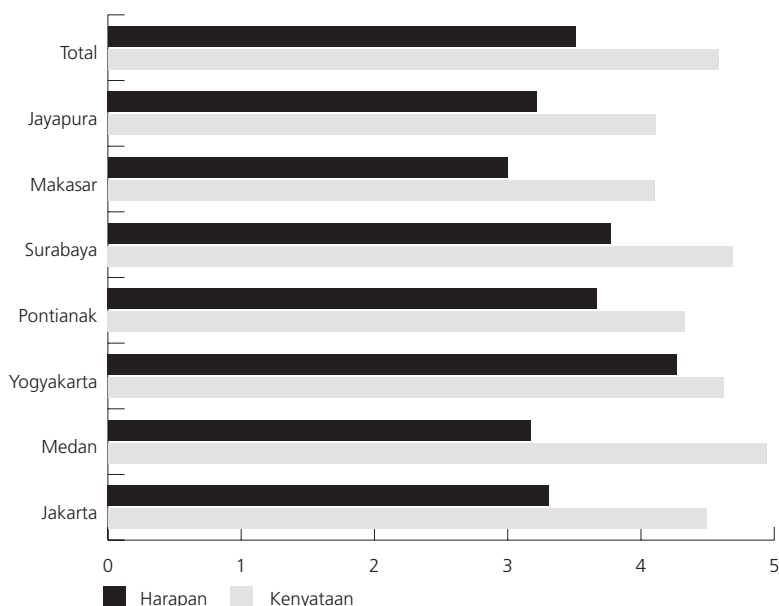
Tabel 3.3 **Persentase Jumlah jurnalis perempuan untuk Harapan dan Kenyataan Perlindungan Kerja**

Kota		1	2	3	4	5
Jakarta	<i>harapan</i>	0.00%	1.10%	4.40%	46.15%	48.35%
	<i>kenyataan</i>	6.59%	21.98%	40.66%	21.98%	8.79%
Makassar	<i>harapan</i>	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	80.00%
	<i>kenyataan</i>	30.00%	0.00%	30.00%	20.00%	20.00%
Medan	<i>harapan</i>	5.56%	0.00%	0.00%	0.00%	94.44%
	<i>kenyataan</i>	27.78%	11.11%	11.11%	16.67%	33.33%
Jayapura	<i>harapan</i>	22.22%	0.00%	33.33%	11.11%	33.33%
	<i>kenyataan</i>	22.22%	0.00%	55.56%	22.22%	0.00%
Pontianak	<i>harapan</i>	0.00%	0.00%	0.00%	44.44%	55.56%
	<i>kenyataan</i>	0.00%	33.33%	11.11%	11.11%	44.44%

Surabaya	harapan	0.00%	0.00%	7.69%	46.15%	46.15%
	kenyataan	3.85%	30.77%	30.77%	23.08%	11.54%
Yogyakarta	harapan	0.00%	7.69%	7.69%	30.77%	53.85%
	kenyataan	7.69%	30.77%	11.54%	30.77%	19.23%

3.4 Gaji Rutin

Indikator selanjutnya adalah tentang gaji yang mereka terima baik untuk jurnalis tetap maupun *freelance*. Secara total, dari skala 1-5, nilai rata-rata harapan seluruh responden mencapai 4,58 sementara pada kenyataannya yang baru diterima sebesar 3,51. Hasil selengkapnya seperti disajikan pada grafik di bawah ini.



Grafik 3.4 **Harapan dan Kenyataan Gaji Rutin**

Jurnalis perempuan di Yogyakarta yang mempunyai indeks harapan 4,62 dan indeks kenyataan yang paling mendekati yaitu sebesar 4,27. Sementara jurnalis di Makassar merasakan

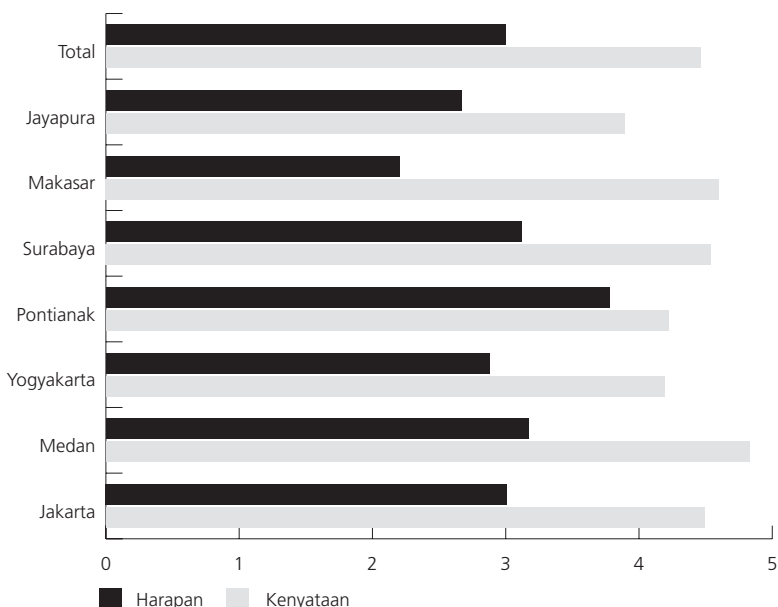
kesenjangan yang paling besar dengan kenyataannya di 3,00 dari harapan di 5,00. Di daerah lain juga terjadi gap dengan selisih berkisar 1,3-1,5 antara harapan dan kenyataan. Tabel di bawah ini menampilkan persentase responden untuk tiap jawaban di setiap lokasi.

Tabel 3.4 **Persentase Jumlah Responden untuk Harapan dan Kenyataan Gaji Rutin**

Kota		1	2	3	4	5
Jakarta	<i>harapan</i>	1.11%	0.00%	3.33%	34.44%	61.11%
	<i>kenyataan</i>	6.67%	20.00%	26.67%	25.56%	21.11%
Makassar	<i>harapan</i>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	<i>kenyataan</i>	10.00%	20.00%	20.00%	20.00%	30.00%
Medan	<i>harapan</i>	0.00%	0.00%	0.00%	5.56%	94.44%
	<i>kenyataan</i>	27.78%	11.11%	11.11%	16.67%	33.33%
Jayapura	<i>harapan</i>	0.00%	11.11%	11.11%	33.33%	44.44%
	<i>kenyataan</i>	0.00%	11.11%	66.67%	11.11%	11.11%
Pontianak	<i>harapan</i>	0.00%	0.00%	11.11%	44.44%	44.44%
	<i>kenyataan</i>	0.00%	11.11%	33.33%	33.33%	22.22%
Surabaya	<i>harapan</i>	0.00%	0.00%	0.00%	30.77%	69.23%
	<i>kenyataan</i>	3.85%	3.85%	15.38%	65.38%	11.54%
Yogyakarta	<i>harapan</i>	0.00%	3.85%	3.85%	19.23%	73.08%
	<i>kenyataan</i>	3.85%	0.00%	11.54%	34.62%	50.00%

3.5 Asuransi

Pada indikator asuransi, harapan total seluruh responden mencapai 4,46 sementara kenyataan yang mereka terima baru pada angka 3,00. Makassar kembali tercatat sebagai daerah dengan kesenjangan paling besar dengan harapan mencapai 4,60 tetapi kenyataannya masih di angka 2,00 disusul Medan dengan harapan 4,83 tetapi kenyataannya baru mencapai 3,17.



Grafik 3.5 **Harapan dan Kenyataan Asuransi**

Sementara itu, asuransi bagi jurnalis di Pontianak disimpulkan paling mendekati harapan dimana, dengan indeks 4,22 sementara kenyataannya sudah mencapai 3,78 diikuti Jayapura dengan indeks harapan 2,67 dan kenyataannya 3,89. Tabel di bawah ini menampilkan persentase responden untuk tiap jawaban di setiap lokasi.

Tabel 3.5 **Persentase Jumlah Responden untuk Harapan dan Kenyataan Asuransi**

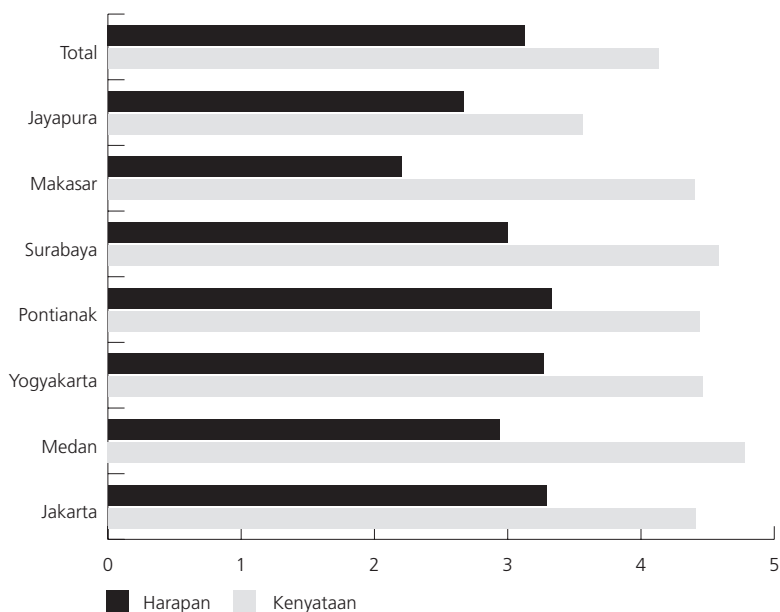
Kota		1	2	3	4	5
Jakarta	<i>harapan</i>	0.00%	0.00%	5.49%	39.56%	54.95%
	<i>kenyataan</i>	13.19%	16.48%	37.36%	21.98%	10.99%
Makassar	<i>harapan</i>	0.00%	0.00%	20.00%	0.00%	80.00%
	<i>kenyataan</i>	40.00%	10.00%	40.00%	10.00%	0.00%
Medan	<i>harapan</i>	0.00%	0.00%	5.56%	5.56%	88.89%
	<i>kenyataan</i>	27.78%	11.11%	11.11%	16.67%	33.33%

Jayapura	<i>harapan</i>	11.11%	0.00%	22.22%	22.22%	44.44%
	<i>kenyataan</i>	33.33%	0.00%	44.44%	11.11%	11.11%
Pontianak	<i>harapan</i>	11.11%	0.00%	0.00%	33.33%	55.56%
	<i>kenyataan</i>	11.11%	11.11%	11.11%	22.22%	44.44%
Surabaya	<i>harapan</i>	0.00%	0.00%	3.85%	38.46%	57.69%
	<i>kenyataan</i>	3.85%	38.46%	11.54%	34.62%	11.54%
Yogyakarta	<i>harapan</i>	3.85%	0.00%	26.92%	11.54%	57.69%
	<i>kenyataan</i>	15.38%	34.62%	19.23%	7.69%	23.08%

3.6 Jamsostek

Jamsostek yang merupakan kewajiban dari setiap perusahaan, dirasakan sudah memenuhi berada dengan indeks 3,13 sementara diharapkan oleh semua responden berada di 4,43. Kesenjangan paling besar dirasakan oleh jurnalis di Makassar dengan harapan mencapai 4,40 sementara kenyataannya mereka baru menerima 2,20. Disusul Medan dengan harapan sebesar 4,78 sementara kenyataannya baru pada 2,94. Sementara itu, jurnalis di Jayapura dan Jakarta tercatat yang paling puas untuk indikator ini, dengan indeks harapan dan kenyataan masing masing berturut turut 2,67 : 3,56 dan 3,29 : 4,41.

Hasil selengkapnya disajikan pada grafik di bawah ini.



Grafik 3.6 **Harapan dan Kenyataan Jamsostek**

Tabel di bawah ini menampilkan persentase responden untuk tiap jawaban di setiap lokasi.

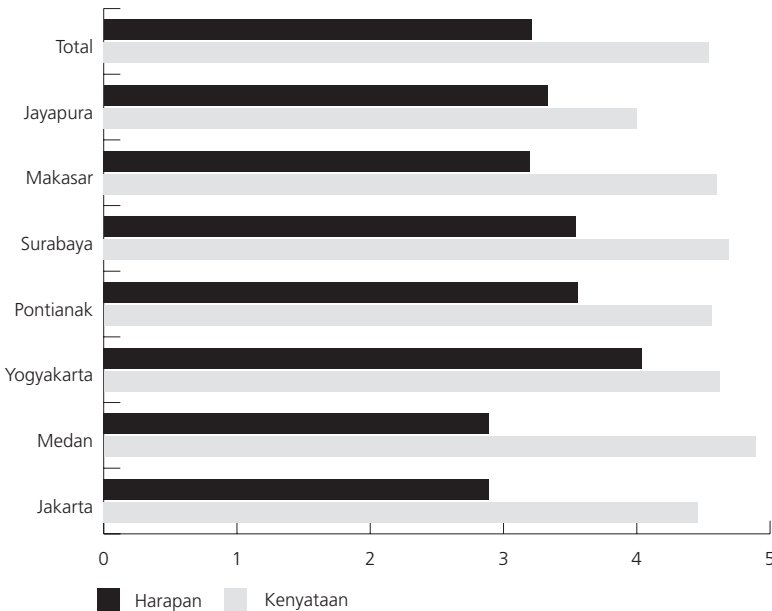
Tabel 3.6 **Persentase Jumlah Responden untuk Harapan dan Kenyataan Jamsostek**

Kota		1	2	3	4	5
Jakarta	harapan	0.00%	0.00%	5.49%	48.35%	46.15%
	kenyataan	7.69%	14.29%	30.77%	36.26%	10.99%
Makassar	harapan	0.00%	0.00%	20.00%	20.00%	60.00%
	kenyataan	50.00%	0.00%	40.00%	0.00%	10.00%
Medan	harapan	5.56%	0.00%	0.00%	0.00%	94.44%
	kenyataan	33.33%	11.11%	11.11%	16.67%	27.78%
Jayapura	harapan	22.22%	0.00%	22.22%	11.11%	44.44%
	kenyataan	33.33%	0.00%	44.44%	11.11%	11.11%

Pontianak	<i>harapan</i>	0.00%	0.00%	0.00%	55.56%	44.44%
	<i>kenyataan</i>	11.11%	22.22%	11.11%	33.33%	22.22%
Surabaya	<i>harapan</i>	0.00%	0.00%	3.85%	34.62%	61.54%
	<i>kenyataan</i>	7.69%	23.08%	42.31%	15.38%	11.54%
Yogyakarta	<i>harapan</i>	3.85%	3.85%	3.85%	19.23%	69.23%
	<i>kenyataan</i>	7.69%	38.46%	7.69%	11.54%	34.62%

3.7 Tunjangan Makan

Tunjangan jenis ini merupakan salah satu yang umum diberikan di setiap perusahaan. Secara total, harapan responden untuk tunjangan ini mencapai 4,54 sementara kenyataan yang diterima baru di angka 3,21.



Grafik 3.7 **Harapan dan Kenyataan Tunjangan Makan**

Responden di Jayapura dan Yogyakarta merasakan tunjangan makan sudah hampir memenuhi harapan mereka, di Jayapura harapan di angka 4,00 dan kenyataannya 3,33.

Sementara di Yogyakarta, harapan responden ada di 4,62 sementara kenyataannya sudah mencapai 4,04. Untuk indikator ini, Medan dan Jakarta ada di peringkat terbawah untuk kesenjangan yang paling besar, di Medan harapan mencapai 4,89 namun kenyataannya baru di angka 2,89, sementara Jakarta kenyataannya baru ada di angka 2,89 sementara harapannya mencapai 4,46.

Tabel di bawah ini menampilkan persentase responden untuk tiap jawaban di setiap lokasi.

Tabel 3.7 **Persentase Jumlah Responden untuk Harapan dan Kenyataan Tunjangan Makan**

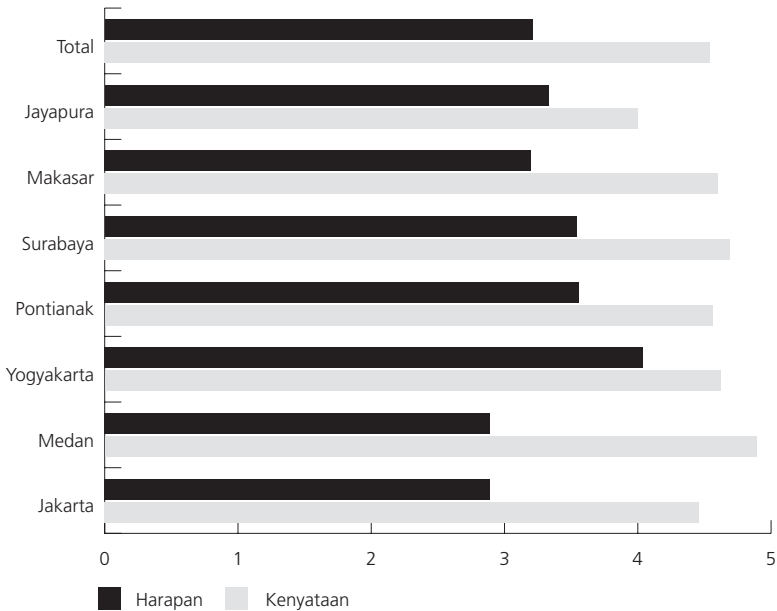
Kota		1	2	3	4	5
Jakarta	<i>harapan</i>	1.10%	1.10%	5.49%	35.16%	57.14%
	<i>kenyataan</i>	12.09%	23.08%	37.36%	18.68%	8.79%
Makassar	<i>harapan</i>	0.00%	0.00%	20.00%	0.00%	80.00%
	<i>kenyataan</i>	20.00%	0.00%	30.00%	30.00%	20.00%
Medan	<i>harapan</i>	0.00%	0.00%	0.00%	11.11%	88.89%
	<i>kenyataan</i>	27.78%	16.67%	16.67%	16.67%	22.22%
Jayapura	<i>harapan</i>	0.00%	0.00%	33.33%	33.33%	33.33%
	<i>kenyataan</i>	0.00%	0.00%	77.78%	11.11%	11.11%
Pontianak	<i>harapan</i>	0.00%	0.00%	11.11%	22.22%	66.67%
	<i>kenyataan</i>	0.00%	33.33%	22.22%	0.00%	44.44%
Surabaya	<i>harapan</i>	0.00%	0.00%	0.00%	30.77%	69.23%
	<i>kenyataan</i>	0.00%	11.54%	34.62%	42.31%	11.54%
Yogyakarta	<i>harapan</i>	0.00%	0.00%	15.38%	7.69%	76.92%
	<i>kenyataan</i>	0.00%	7.69%	23.08%	26.92%	42.31%

3.8 Tunjangan Transportasi

Tunjangan yang tidak kalah penting adalah tunjangan transportasi. Secara total harapan responden mencapai 4,52 sementara kenyataan yang ada baru di angka 3,19. Jayapura dan Yogyakarta menduduki peringkat pertama dan kedua

untuk daerah dengan kenyataan paling mendekati harapan bagi indikator ini. Di Jayapura, para jurnalis perempuan berharap pada angka 3,89 sementara menurut mereka kenyataannya sudah mencapai 3,22. Di Yogyakarta harapan terdata sebesar 4,54 dan kenyataannya sudah mencapai 3,62.

Sementara itu Jakarta dan Medan ada di peringkat terbawah yang kesenjangananya paling besar. Di Jakarta harapan responden mencapai 4,52 sementara kenyataannya baru di angka 2,91. Serupa dengan itu, di Medan harapan mencapai angka 4,83 sementara kenyataannya masih 3,28. Hasil selengkapnya disajikan pada grafik di bawah ini.



Grafik 3.8 **Harapan dan Kenyataan Tunjangan Transportasi**

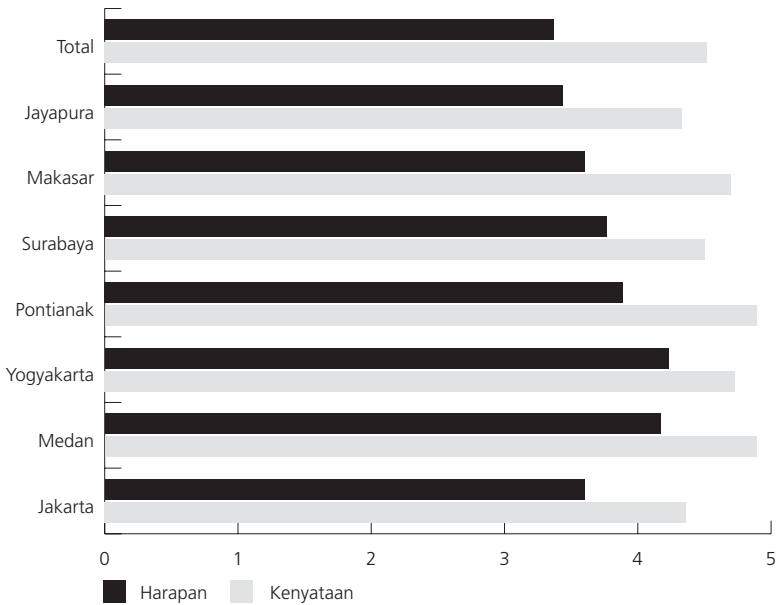
Tabel di bawah ini menampilkan persentase responden untuk tiap jawaban di setiap lokasi.

Tabel 3.8 **Persentase Jumlah Responden untuk Harapan dan Kenyataan Tunjangan Transportasi**

Kota		1	2	3	4	5
Jakarta	<i>harapan</i>	1.10%	0.00%	2.20%	39.56%	57.14%
	<i>kenyataan</i>	8.79%	26.37%	38.46%	17.58%	8.79%
Makassar	<i>harapan</i>	0.00%	0.00%	10.00%	0.00%	90.00%
	<i>kenyataan</i>	20.00%	0.00%	10.00%	40.00%	30.00%
Medan	<i>harapan</i>	0.00%	5.56%	0.00%	0.00%	94.44%
	<i>kenyataan</i>	27.78%	5.56%	11.11%	22.22%	33.33%
Jayapura	<i>harapan</i>	11.11%	0.00%	11.11%	44.44%	33.33%
	<i>kenyataan</i>	11.11%	0.00%	55.56%	22.22%	11.11%
Pontianak	<i>harapan</i>	0.00%	0.00%	0.00%	33.33%	66.67%
	<i>kenyataan</i>	0.00%	22.22%	11.11%	33.33%	33.33%
Surabaya	<i>harapan</i>	0.00%	0.00%	0.00%	38.46%	61.54%
	<i>kenyataan</i>	7.69%	19.23%	23.08%	34.62%	15.38%
Yogyakarta	<i>harapan</i>	0.00%	0.00%	11.54%	23.08%	65.38%
	<i>kenyataan</i>	3.85%	23.08%	19.23%	15.38%	38.46%

3.9 Cuti Tahunan

Cuti tahunan walaupun sudah merupakan hak bagi semua karyawan ternyata belum sepenuhnya memenuhi harapan jurnalis perempuan, hal ini bisa saja terjadi karena beberapa hal seperti prosedur pengambilan cuti, waktu pengambilan cuti yang sulit disesuaikan dengan kesibukan kerja dan persyaratan untuk cuti. Jurnalis perempuan masih mengeluhkan soal ini. Penelitian ini menunjukkan dari harapan yang mencapai 4,52 kenyataan yang diterima responden baru menyentuh angka 3,77 seperti dijelaskan pada grafik di bawah ini.



Grafik 3.9 **Harapan dan Kenyataan Tunjangan Cuti Tahunan**

Secara umum, perbedaan antara harapan dan kenyataan untuk kesempatan cuti tahunan di setiap daerah tidak terlalu berbeda signifikan dengan selisih yang tidak lebih dari 1,00. Hanya di Makassar dan Pontianak yang cukup tinggi, dimana di Makassar harapan responden mencapai 4,70 sementara kenyataannya baru 3,60. Sementara itu di Pontianak responden berharap hingga 4,89 sementara kenyataan yang mereka terima baru 3,89.

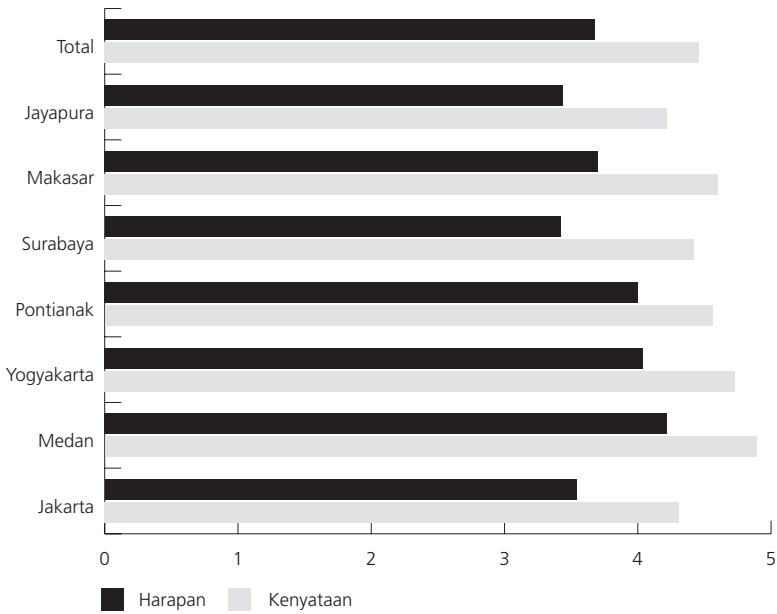
Tabel di bawah ini menampilkan persentase responden untuk tiap jawaban di setiap lokasi.

Tabel 3.9 **Persentase Jumlah Responden untuk Harapan dan Kenyataan Cuti Tahunan**

Kota		1	2	3	4	5
Jakarta	<i>harapan</i>	0.00%	0.00%	5.56%	47.78%	46.67%
	<i>kenyataan</i>	0.00%	14.44%	26.67%	38.89%	20.00%
Makassar	<i>harapan</i>	0.00%	0.00%	10.00%	10.00%	80.00%
	<i>kenyataan</i>	0.00%	20.00%	20.00%	40.00%	20.00%
Medan	<i>harapan</i>	0.00%	0.00%	5.56%	0.00%	94.44%
	<i>kenyataan</i>	5.56%	0.00%	22.22%	16.67%	55.56%
Jayapura	<i>harapan</i>	0.00%	0.00%	11.11%	44.44%	44.44%
	<i>kenyataan</i>	0.00%	0.00%	66.67%	22.22%	11.11%
Pontianak	<i>harapan</i>	0.00%	0.00%	0.00%	11.11%	88.89%
	<i>kenyataan</i>	0.00%	22.22%	22.22%	0.00%	55.56%
Surabaya	<i>harapan</i>	0.00%	3.85%	3.85%	30.77%	61.54%
	<i>kenyataan</i>	7.69%	7.69%	7.69%	53.85%	23.08%
Yogyakarta	<i>harapan</i>	0.00%	0.00%	3.85%	19.23%	76.92%
	<i>kenyataan</i>	0.00%	3.85%	15.38%	34.62%	46.15%

3.10 Cuti Hamil dan Melahirkan

Pada pertanyaan ini, secara total harapan jurnalis perempuan untuk mendapatkan cuti hamil dan melahirkan mencapai 4,46 sementara kenyataan yang mereka terima sudah di angka 3,68. Mengingat sifatnya yang sangat umum, cuti hamil dan melahirkan nyaris sudah memenuhi harapan seluruh responden di semua lokasi. Hasil selengkapnya ditampilkan pada grafik di bawah ini.



Grafik 3.10 **Harapan dan Kenyataan Tunjangan Cuti Hamil dan Melahirkan**

Tabel di bawah ini menampilkan persentase responden untuk tiap jawaban di setiap lokasi.

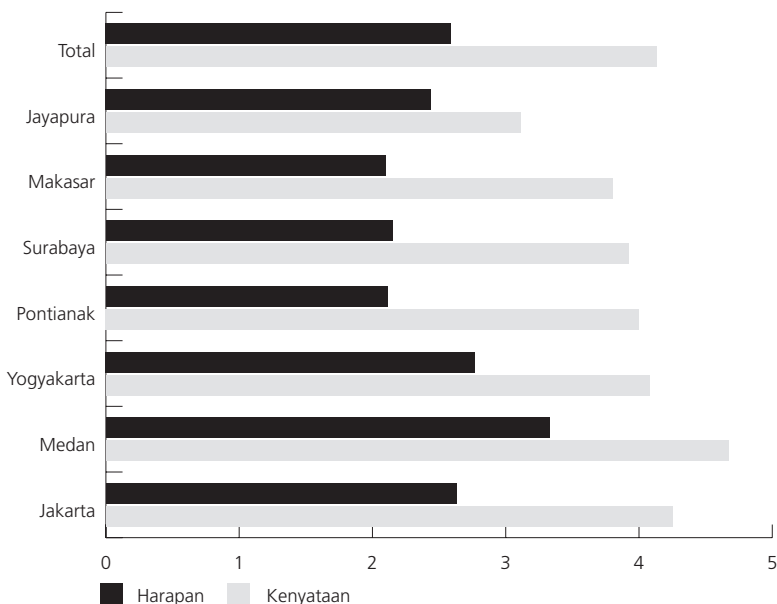
Tabel 3.10 **Persentase Jumlah Responden untuk Harapan dan Kenyataan Cuti Hamil dan Melahirkan**

Kota		1	2	3	4	5
Jakarta	<i>harapan</i>	0.00%	0.00%	3.41%	47.73%	48.86%
	<i>kenyataan</i>	2.27%	6.82%	34.09%	36.36%	20.45%
Makassar	<i>harapan</i>	0.00%	0.00%	20.00%	0.00%	80.00%
	<i>kenyataan</i>	10.00%	0.00%	30.00%	30.00%	30.00%
Medan	<i>harapan</i>	0.00%	0.00%	5.56%	0.00%	94.44%
	<i>kenyataan</i>	0.00%	11.11%	5.56%	33.33%	50.00%
Jayapura	<i>harapan</i>	0.00%	0.00%	22.22%	33.33%	44.44%
	<i>kenyataan</i>	0.00%	0.00%	66.67%	22.22%	11.11%
Pontianak	<i>harapan</i>	0.00%	0.00%	0.00%	44.44%	55.56%
	<i>kenyataan</i>	0.00%	11.11%	11.11%	44.44%	33.33%

Surabaya	<i>harapan</i>	0.00%	0.00%	3.85%	50.00%	46.15%
	<i>kenyataan</i>	7.69%	11.54%	30.77%	30.77%	19.23%
Yogyakarta	<i>harapan</i>	0.00%	0.00%	7.69%	11.54%	80.77%
	<i>kenyataan</i>	3.85%	7.69%	15.38%	26.92%	46.15%

3.11 Cuti Haid

Seperti dijelaskan pada bagian sebelumnya, cuti haid meskipun sudah masuk dalam UU Tenaga kerja, belum banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan media di Indonesia. Ternyata, harapan responden untuk fasilitas ini cukup besar yaitu 4,13 sementara pada kenyataannya baru ada di tingkat 2,59. Bahkan beberapa jurnalis perempuan menyatakan tidak tahu jika mereka bisa mendapatkan cuti haid. Ini artinya, media tempat mereka bekerja tidak pernah mengeluarkan informasi ini dalam peraturan ini. Hasilnya, informasi tentang cuti haid tidak begitu populer di kalangan jurnalis perempuan.



Grafik 3.11 **Harapan dan Kenyataan Tunjangan Cuti Haid**

Dari grafik terlihat, Surabaya dan Makassar mempunyai selisih paling besar. Di Surabaya harapan mencapai 3,92 sementara kenyataannya masih 2,15. Sementara itu di Makassar harapan mencapai 3,80 tetapi kenyataannya baru pada angka 2,10. Sebaliknya Jayapura dan Yogyakarta bisa dikatakan paling memenuhi harapan responden dimana di Jayapura harapan pada 3,11 sementara kenyataannya pada 2,44. Di Yogyakarta meski sedikit berbeda, harapannya mencapai 4,08 dan kenyataannya mencapai 2,77.

Tabel di bawah ini menampilkan persentase responden untuk tiap jawaban di setiap lokasi.

Tabel 3.11 **Persentase Jumlah Responden untuk Harapan dan Kenyataan Cuti Haid**

Kota		1	2	3	4	5
Jakarta	<i>harapan</i>	0.00%	0.00%	10.99%	52.75%	36.26%
	<i>kenyataan</i>	21.98%	24.18%	29.67%	17.58%	6.59%
Makassar	<i>harapan</i>	0.00%	0.00%	50.00%	20.00%	30.00%
	<i>kenyataan</i>	50.00%	10.00%	30.00%	0.00%	10.00%
Medan	<i>harapan</i>	0.00%	0.00%	11.11%	11.11%	77.78%
	<i>kenyataan</i>	11.11%	27.78%	11.11%	16.67%	33.33%
Jayapura	<i>harapan</i>	22.22%	0.00%	44.44%	11.11%	22.22%
	<i>kenyataan</i>	22.22%	11.11%	66.67%	0.00%	0.00%
Pontianak	<i>harapan</i>	0.00%	11.11%	11.11%	44.44%	33.33%
	<i>kenyataan</i>	22.22%	66.67%	0.00%	0.00%	11.11%
Surabaya	<i>harapan</i>	0.00%	7.69%	15.38%	53.85%	23.08%
	<i>kenyataan</i>	23.08%	53.85%	7.69%	15.38%	0.00%
Yogyakarta	<i>harapan</i>	0.00%	3.85%	30.77%	19.23%	46.15%
	<i>kenyataan</i>	26.92%	23.08%	15.38%	15.38%	19.23%

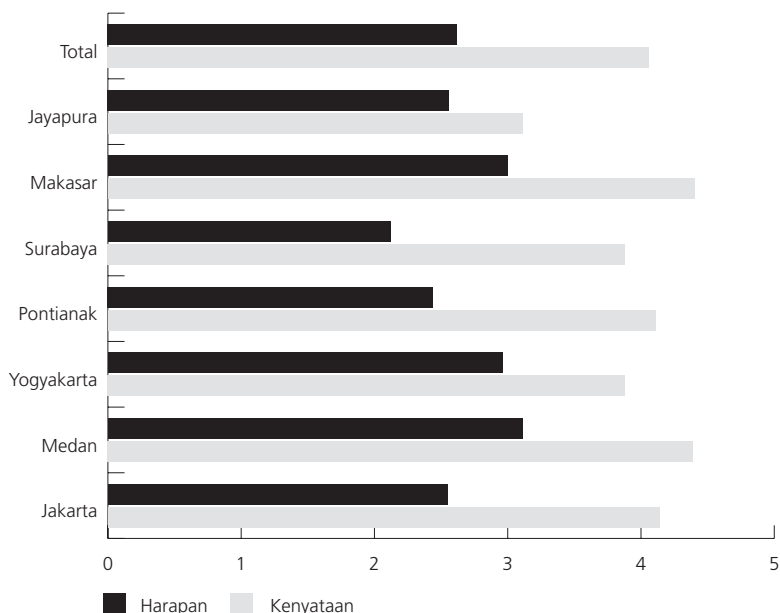
3.12 Manajemen Laktasi

Manajemen laktasi yang dimaksud dalam pertanyaan ini adalah kesempatan menyusui bayi di kantor. Secara umum,

harapan responden untuk hal ini mencapai 4,06 sementara kenyataannya baru pada angka 2,62. Responden di Jayapura dan Yogyakarta merasa harapannya terhadap hal ini sudah cukup terpenuhi dimana di Jayapura harapan responden 3,11 dan kenyataannya 2,56. Sementara itu di Yogyakarta harapan rata-rata mencapai 3,88 dan sudah dipenuhi sekitar 2,96.

Di lain pihak, responden si Surabaya dan Pontianak merasa harapannya terhadap kesempatan melakukan manajemen laktasi, cukup berbeda dibanding kenyataan yang ia terima. Jurnalis perempuan di Surabaya mengharapkan indikator ini di tingkat 3,88 sementara kenyataan yang mereka terima baru pada tingkat 2,12. Di Pontianak tidak jauh berbeda dimana harapannya mencapai 4,11 dan kenyataannya di tingkat 2,44.

Hasil selengkapnya disajikan pada grafik di bawah ini.



Grafik 3.12 **Harapan dan Kenyataan Manajemen Laktasi**

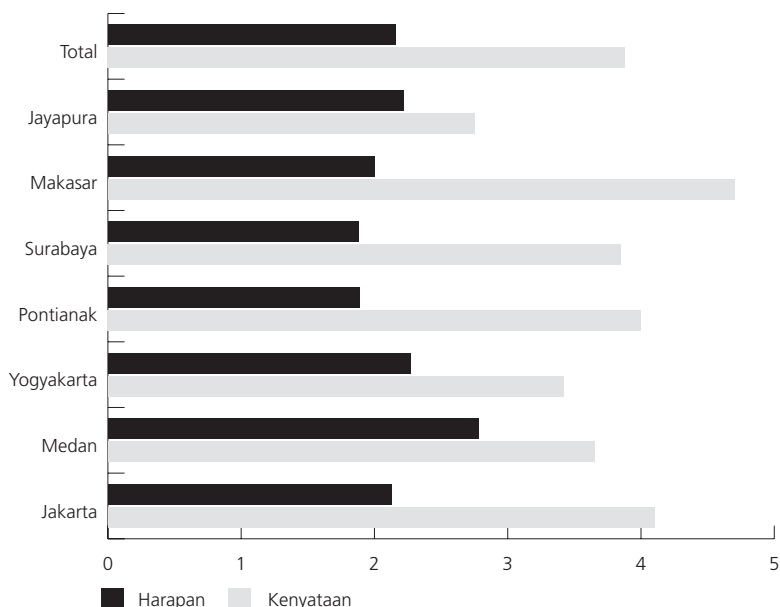
Tabel di bawah ini menampilkan persentase responden untuk tiap jawaban di setiap lokasi.

Tabel 3.12 **Persentase Jumlah Responden untuk Harapan dan Kenyataan Manajemen Laktasi**

Kota		1	2	3	4	5
Jakarta	<i>harapan</i>	0.00%	2.25%	7.87%	53.93%	35.96%
	<i>kenyataan</i>	13.48%	31.46%	38.20%	14.61%	2.25%
Makassar	<i>harapan</i>	0.00%	0.00%	30.00%	0.00%	70.00%
	<i>kenyataan</i>	20.00%	10.00%	40.00%	10.00%	20.00%
Medan	<i>harapan</i>	5.56%	0.00%	11.11%	16.67%	66.67%
	<i>kenyataan</i>	27.78%	5.56%	27.78%	5.56%	33.33%
Jayapura	<i>harapan</i>	22.22%	0.00%	44.44%	11.11%	22.22%
	<i>kenyataan</i>	22.22%	0.00%	77.78%	0.00%	0.00%
Pontianak	<i>harapan</i>	11.11%	0.00%	11.11%	22.22%	55.56%
	<i>kenyataan</i>	22.22%	33.33%	22.22%	22.22%	0.00%
Surabaya	<i>harapan</i>	0.00%	11.54%	7.69%	61.54%	19.23%
	<i>kenyataan</i>	26.92%	38.46%	30.77%	3.85%	0.00%
Yogyakarta	<i>harapan</i>	11.54%	0.00%	30.77%	3.85%	53.85%
	<i>kenyataan</i>	19.23%	19.23%	30.77%	7.69%	23.08%

3.13 Tempat Penitipan Anak

Tempat penitipan anak di kantor, memang belum umum di Indonesia, namun ternyata harapan responden pada penelitian ini cukup besar, terbukti dengan tingkat harapan mencapai 4,10 dari skala 5,00 sementara pada kenyataannya baru mencapai 2,13. Hasil selengkapnya ditampilkan pada grafik di bawah ini.



Grafik 3.13 **Harapan dan Kenyataan Tempat Penitipan Anak**

Tabel di bawah ini menampilkan persentase responden untuk tiap jawaban di setiap lokasi.

Tabel 3.13 **Persentase Jumlah Responden untuk Harapan dan Kenyataan Tempat Penitipan Anak**

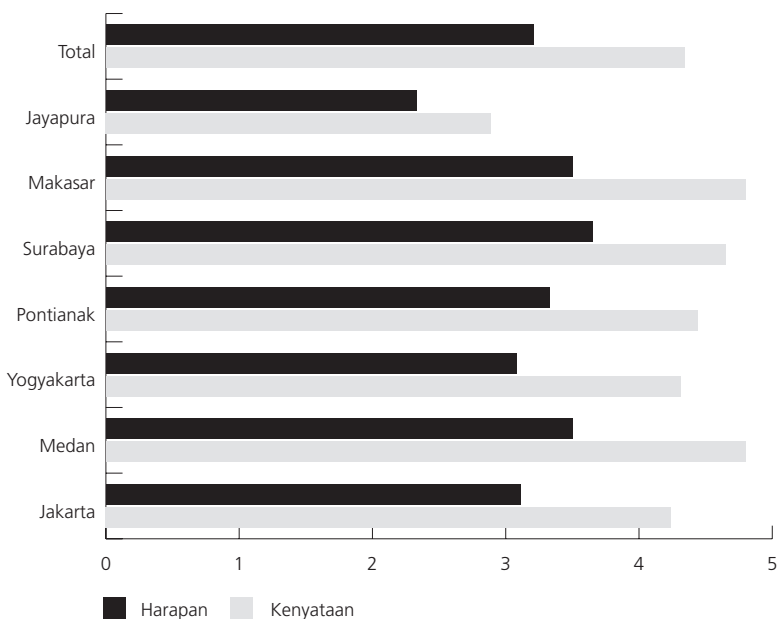
Kota		1	2	3	4	5
Jakarta	<i>harapan</i>	1.12%	1.12%	11.24%	53.93%	32.58%
	<i>kenyataan</i>	26.97%	37.08%	29.21%	4.49%	2.25%
Makassar	<i>harapan</i>	0.00%	0.00%	10.00%	10.00%	80.00%
	<i>kenyataan</i>	30.00%	40.00%	30.00%	0.00%	0.00%
Medan	<i>harapan</i>	22.22%	0.00%	11.11%	16.67%	50.00%
	<i>kenyataan</i>	27.78%	22.22%	16.67%	11.11%	22.22%
Jayapura	<i>harapan</i>	33.33%	11.11%	22.22%	22.22%	11.11%
	<i>kenyataan</i>	44.44%	0.00%	44.44%	11.11%	0.00%
Pontianak	<i>harapan</i>	0.00%	0.00%	22.22%	55.56%	22.22%
	<i>kenyataan</i>	22.22%	66.67%	11.11%	0.00%	0.00%

Surabaya	<i>harapan</i>	0.00%	11.54%	7.69%	65.38%	15.38%
	<i>kenyataan</i>	30.77%	53.85%	11.54%	3.85%	0.00%
Yogyakarta	<i>harapan</i>	11.54%	3.85%	42.31%	15.38%	26.92%
	<i>kenyataan</i>	30.77%	23.08%	38.46%	3.85%	3.85%

Dari grafik terlihat, terjadi perbedaan yang signifikan antara harapan dan kenyataan di seluruh daerah dengan nilai kenyataan rata-rata 2 kali lebih kecil dari harapan. Kecuali di Surabaya dan Pontianak yang selisihnya tidak sampai 2 kali. Kondisi seperti ini sudah dapat menjadi bahan pertimbangan para pengusaha media untuk menyediakan tempat penitipan anak bagi para karyawannya dengan tujuan akan meningkatkan konsentrasi para Ibu bekerja yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan.

3.14 Kesempatan Jenjang Pengambil Keputusan

Peningkatan karir merupakan harapan semua karyawan di semua profesi. Begitu pula halnya jurnalis perempuan, mereka pun berharap mendapatkan kesempatan untuk berada di jenjang pengambil keputusan (struktural). Harapan jurnalis yang menjadi responden pada penelitian ini mencapai 4,34 sementara pada kenyataannya kesempatan yang diberikan kepada mereka ada di tingkat 3,11. Hasil selengkapnya disajikan pada grafik di bawah ini.



Grafik 3.14 **Harapan dan Kenyataan Jenjang Karir Struktural**

Nampak dari gambar di atas, kesempatan jenjang karir struktural paling menjanjikan ada di Jayapura dan Surabaya. Di Jayapura, dari 2,89 harapan responden, sudah memenuhi kenyataan sebesar 2,33. Sementara di Surabaya dari harapan sebesar 4,65 sudah terpenuhi hingga 3,65.

Tabel di bawah ini menampilkan persentase responden untuk tiap jawaban di setiap lokasi.

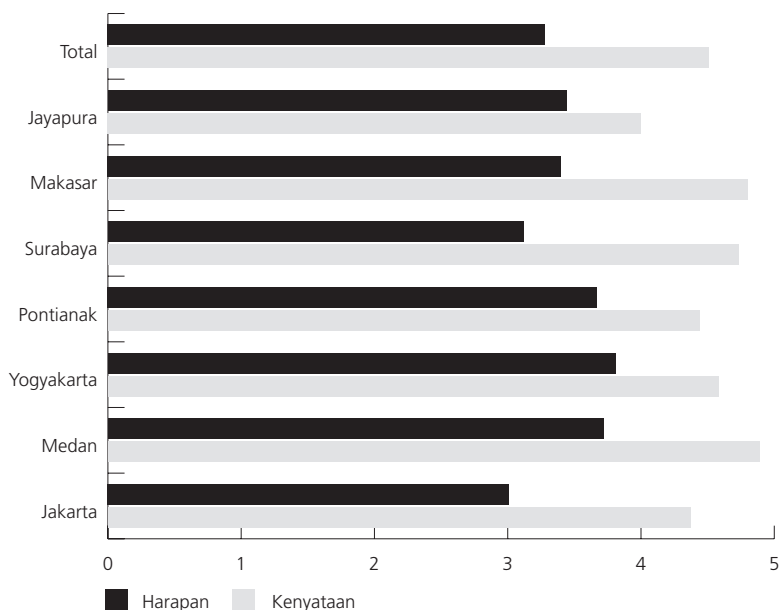
Tabel 3.14 **Persentase Jumlah Responden untuk Harapan dan Kenyataan Jenjang Karir Struktural**

Kota		1	2	3	4	5
Jakarta	harapan	0.00%	2.20%	8.79%	51.65%	37.36%
	kenyataan	5.49%	15.38%	49.45%	21.98%	7.69%
Makassar	harapan	0.00%	0.00%	10.00%	0.00%	90.00%
	kenyataan	10.00%	20.00%	10.00%	30.00%	30.00%

Medan	<i>harapan</i>	0.00%	0.00%	5.56%	5.56%	88.89%
	<i>kenyataan</i>	16.67%	5.56%	22.22%	22.22%	33.33%
Jayapura	<i>harapan</i>	33.33%	0.00%	33.33%	11.11%	22.22%
	<i>kenyataan</i>	33.33%	0.00%	66.67%	0.00%	0.00%
Pontianak	<i>harapan</i>	0.00%	0.00%	0.00%	55.56%	44.44%
	<i>kenyataan</i>	0.00%	33.33%	11.11%	44.44%	11.11%
Surabaya	<i>harapan</i>	0.00%	0.00%	0.00%	34.62%	65.38%
	<i>kenyataan</i>	0.00%	15.38%	19.23%	50.00%	15.38%
Yogyakarta	<i>harapan</i>	0.00%	3.85%	7.69%	42.31%	46.15%
	<i>kenyataan</i>	3.85%	26.92%	42.31%	11.54%	15.38%

3.15 Kesempatan Memperoleh Pelatihan

Selain kesempatan mendapatkan peningkatan karir, pelatihan dan sejenisnya juga merupakan fasilitas yang diharapkan oleh para jurnalis perempuan untuk meningkatkan kemampuan mereka baik *soft skill* maupun *hard skill*. Secara total harapan responden untuk indikator ini cukup besar mencapai 4,51 sementara kenyataan yang didapatkan baru di angka 3,01. Kondisi ini menyiratkan bahwa pemberian pelatihan kepada jurnalis khususnya jurnalis perempuan belum optimal. Gambaran selengkapnya disajikan pada grafik di bawah ini.



Grafik 3.15 **Harapan dan Kenyataan Kesempatan Mengikuti Pelatihan**

Dari grafik diatas, Jayapura, Yogyakarta dan Pontianak adalah daerah paling mendekati harapan jurnalisnya terhadap pelatihan. Sementara jurnalis perempuan di Jakarta dan Makassar dan Surabaya merasa harapan mereka terhadap upaya peningkatan kemampuan melalui pelatihan masih cukup jauh dari kenyataan yang diterima.

Tabel di bawah ini menampilkan persentase responden untuk tiap jawaban di setiap lokasi.

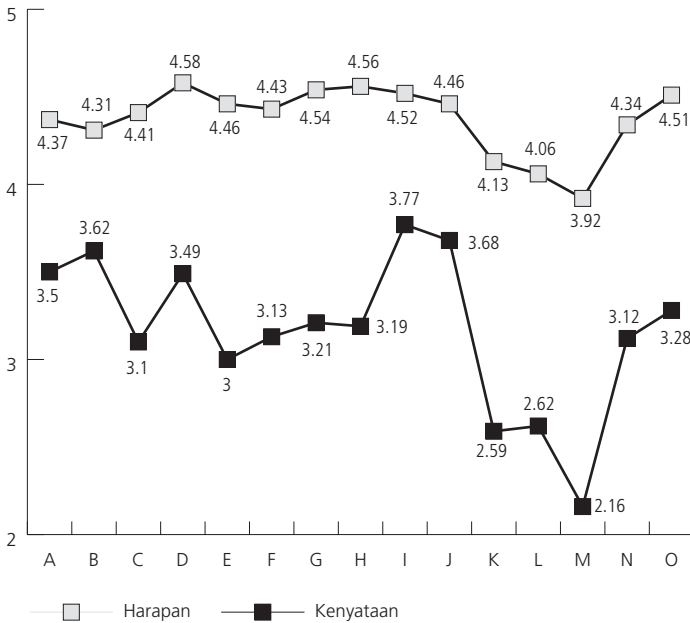
Tabel 3.15 **Persentase Jumlah Responden untuk Harapan dan Kenyataan Memperoleh Pelatihan**

Kota		1	2	3	4	5
Jakarta	harapan	0.00%	0.00%	5.49%	51.65%	42.86%
	kenyataan	8.79%	23.08%	34.07%	26.37%	7.69%
Makassar	harapan	0.00%	0.00%	10.00%	0.00%	90.00%
	kenyataan	0.00%	20.00%	40.00%	20.00%	20.00%

Medan	<i>harapan</i>	0.00%	0.00%	5.56%	0.00%	94.44%
	<i>kenyataan</i>	11.11%	0.00%	27.78%	27.78%	33.33%
Jayapura	<i>harapan</i>	0.00%	0.00%	44.44%	11.11%	44.44%
	<i>kenyataan</i>	0.00%	11.11%	55.56%	11.11%	22.22%
Pontianak	<i>harapan</i>	0.00%	0.00%	0.00%	55.56%	44.44%
	<i>kenyataan</i>	0.00%	22.22%	11.11%	44.44%	22.22%
Surabaya	<i>harapan</i>	0.00%	0.00%	0.00%	26.92%	73.08%
	<i>kenyataan</i>	7.69%	26.92%	19.23%	38.46%	7.69%
Yogyakarta	<i>harapan</i>	0.00%	0.00%	7.69%	26.92%	65.38%
	<i>kenyataan</i>	0.00%	15.38%	19.23%	34.62%	30.77%

3. 16 Importance Performance Analysis

Hasil dari semua indikator diatas, disatukan dalam satu rekap seperti ditampilkan pada grafik di bawah ini.



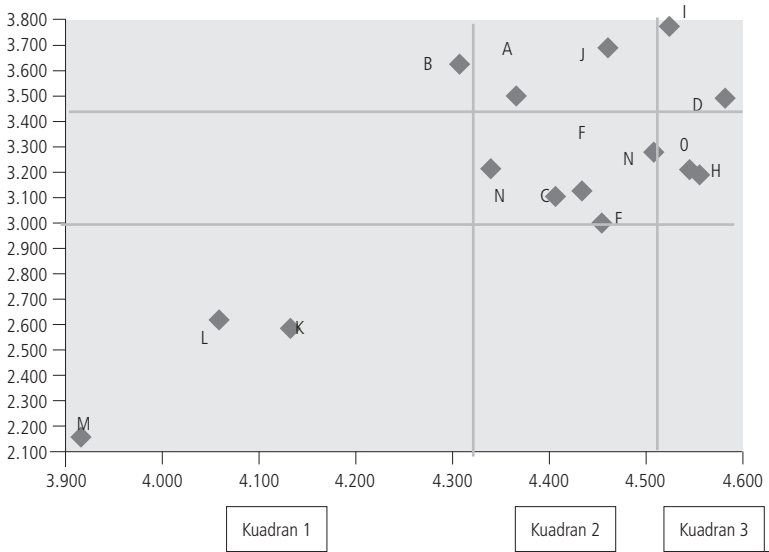
Grafik 3.16 **Total Harapan dan Kenyataan**

Dari grafik terlihat, di semua indikator seluruhnya masih cukup signifikan antara harapan dan kenyataan, dimana kesenjangan tertinggi terdapat pada indikator tempat penitipan anak (M), diikuti kebijakan cuti haid (K) dan kesempatan menyusui (L) dan pemberian jam istirahat (B) Bagian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi para manajemen media untuk mengevaluasi kebijakan yang sudah diambil agar dapat menghasilkan keputusan untuk memenuhi kebutuhan jurnalis perempuan.

Sementara itu, berdasarkan Indeks *Importance Performance Analysis*, tingkat kepentingan pembenahan dibagi ke dalam tiga kuadran yaitu:

1. **Kuadran 1:** indikator yang prioritas utama untuk dibenahi;
2. **Kuadran 2:** indikator yang menjadi pertimbangan kedua untuk dibenahi;
3. **Kuadran 3:** indikator yang sudah baik, meskipun masih perlu ditingkatkan

Berikut grafik IPA penelitian ini:



Grafik 3.17 Importance Performance Analysis

Dimana:

Kuadran 1	K	kondisi cuti haid
	L	kesempatan menyusui
	M	fasilitas penitipan anak
Kuadran 2	B	Kondisi jam istirahat
	A	Kondisi jam kerja
	C	fasilitas perlindungan kerja
	E	fasilitas asuransi
	F	fasilitas jamsostek
	J	kondisi cuti melahirkan
N	kesempatan sebagai pengambil kebijakan	

Kuadran 3	D	pengupahan /gaji rutin
	G	tunjangan uang makan
	H	tunjangan transportasi
	I	kondisi cuti tahunan
	O	kesempatan mendapatkan pendidikan tambahan

BAB III D

Potret Perempuan dan Media

Penelitian pada bab ini mencatat tentang rata-rata kepuasan jurnalis perempuan pada munculnya narasumber perempuan. Rata-rata para jurnalis perempuan menyatakan puas dengan makin banyak munculnya narasumber perempuan di media, walaupun seringkali narasumber perempuan yang muncul hanya menguasai isu-isu terkait perempuan dan belum banyak yang menguasai isu politik, ekonomi dan teknologi. Para jurnalis perempuan juga mencatat makin banyaknya rubrik khusus untuk perempuan di media. Sekitar 71,43% jurnalis perempuan juga berkontribusi dalam penulisan berita perempuan. Penelitian juga menunjukkan sebanyak 6,59% jurnalis perempuan mengalami diskriminasi dan 14,81% mengalami pelecehan ketika bertugas. Tak jarang narasumber mengajak berkencan jurnalis perempuan.

JIKA pada bab sebelumnya kita bertanya pada para jurnalis perempuan tentang apa yang sudah dilakukan perusahaan

media terhadap jurnalis perempuan, pada bab ini kita akan melihat apa yang bisa jurnalis perempuan lakukan untuk menggagas isu-isu perempuan di media. Lalu, bagaimana cara mereka memberikan ide-ide tentang penulisan perempuan di media?

Kepada para jurnalis perempuan di penelitian ini, ditanyakan beberapa hal tentang potret perempuan di media. Responden diminta menjawab tingkat kepuasan mereka dengan skala 1-5 dimana 1 sangat tidak puas dan 5 sangat puas.

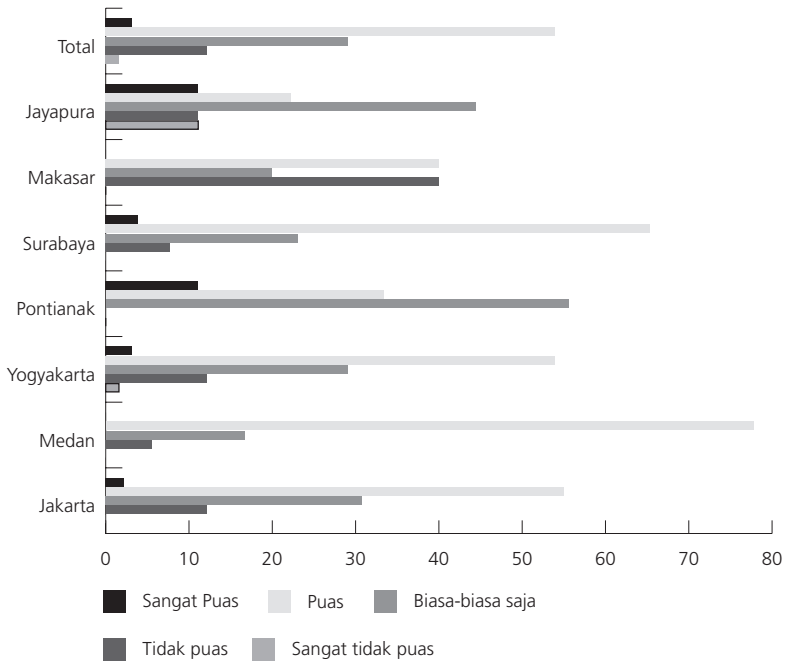
3.1 Gambaran Tentang Perempuan di Media Masing-Masing

Pertanyaan pertama, sebagai jurnalis perempuan apakah mereka sudah puas dengan gambaran tentang perempuan di medianya? Hasilnya secara rata-rata tingkat kepuasan responden di seluruh daerah mencapai 3,45. Tercatat responden di Medan dan Surabaya merasa paling puas terhadap hal ini dibandingkan daerah lain.

Tabel 4.1 **Tingkat Kepuasan Rata-Rata Terhadap Peliputan Tentang Perempuan di Media Masing-Masing**

Kota	Rata Rata Kepuasan
Jakarta	3.47
Makassar	3.00
Medan	3.72
Jayapura	3.11
Pontianak	3.56
Surabaya	3.65
Yogyakarta	3.23
Total	3.45

Sementara itu, jika diamati per tingkat kepuasan hasilnya disajikan pada grafik di bawah ini.



Grafik 4.1 **Tingkat Kepuasan Terhadap Gambaran Tentang Perempuan di Media Masing-Masing**

Secara total, tingkat kepuasan seluruh responden berada di angka 4 yang artinya puas (53,97% responden), diikuti biasa saja (29,10%), tidak puas (12,17%), sangat tidak puas (3,17%) dan ada 1,59% responden yang merasa sangat puas. Peringkat responden yang paling banyak memilih puas secara berturut Medan, Surabaya, Jakarta dan Yogyakarta. Makassar, Jayapura dan Pontianak tercatat memiliki tingkat kepuasan yang rendah.

3.2 Kehadiran Narasumber Perempuan

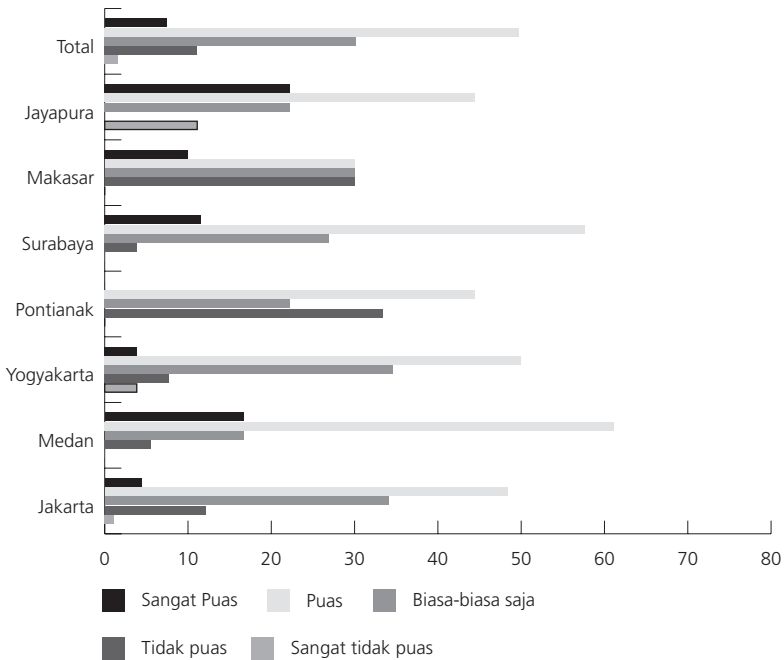
Narasumber perempuan sebenarnya sudah tidak asing lagi dalam dunia media, namun yang sering menjadi sorotan manakala media masih menganggap narasumber perempuan bukan narasumber yang valid atau *capable* untuk beberapa hal. Ini menjadi masalah penting, karena jurnalis perempuan harus berjuang cukup keras untuk memberikan ide soal narasumber perempuan.

Penelitian ini juga menanyakan hal tersebut kepada responden. Hasilnya secara rata-rata tingkat kepuasan responden rata-rata berada di angka 3,5 seperti dijabarkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.2 **Tingkat Kepuasan Rata Rata Terhadap Kehadiran Narasumber Perempuan**

Kota	Rata Rata Kepuasan
Jakarta	3.43
Makassar	3.20
Medan	3.89
Jayapura	3.67
Pontianak	3.11
Surabaya	3.77
Yogyakarta	3.42
Total	3.50

Kota Medan berada di peringkat tertinggi dengan tingkat kepuasan terhadap narasumber perempuan, yaitu 3,89 disusul Surabaya dengan 3,77 dan Jayapura dengan 3,67. Sementara itu hasil dalam persentase per tingkat kepuasan disajikan pada grafik di bawah ini.



Grafik 4.2 **Tingkat Kepuasan Terhadap Kehadiran Narasumber Perempuan**

Sebagian besar jawaban responden berada di tingkat puas (49,74%) diikuti biasa saja (30,16%), tidak puas (11,11%), sangat puas (7,41%) dan sangat tidak puas (1,59%). Jika diamati hampir seluruh daerah sebagian besar sudah memilih tingkat puas untuk pertanyaan ini. Hal ini menunjukkan media di daerah-daerah tersebut sudah semakin percaya dengan validitas dan kapabilitas narasumber perempuan. Namun masih ada bagian yang perlu ditingkatkan dengan menelaah lebih jauh alasan ketidakpuasan yang masih dijawab oleh sebagian kecil responden sebagai bahan *review*. Ketidakpuasan ini antara lain: masih minimnya jumlah narasumber perempuan yang menguasai isu-isu politik, ekonomi, teknologi. Umumnya narasumber perempuan hanya menguasai isu-isu tertentu saja. Dengan sedikitnya jumlah

narasumber perempuan di bidang tertentu ini, media makin meremehkan posisi narasumber perempuan dibandingkan narasumber laki-laki yang jumlahnya lebih banyak.

3.3 Penulisan Isu Tentang Perempuan di Media Masing-Masing

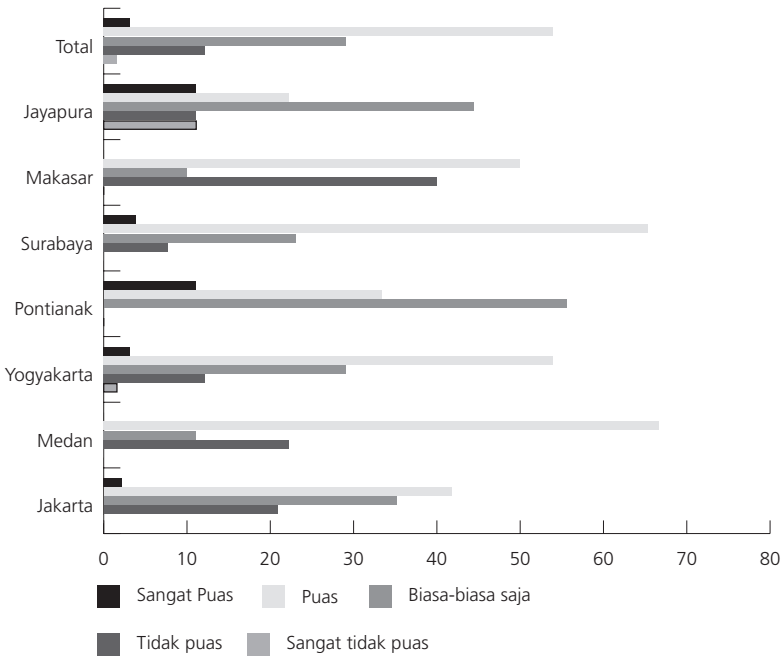
Tidak hanya masalah narasumber perempuan, penulisan berbagai artikel tentang perempuan pun perlu mendapat porsi yang cukup dalam sebuah media, meskipun media tersebut bukan media khusus perempuan.

Kini sudah banyak media mempunyai rubrik khusus tentang perempuan, namun belum banyak yang secara khusus meliput tentang perempuan berprestasi atau yang bisa menjadi teladan bagi perempuan lain. Paling tidak ini adalah jawaban dari para jurnalis perempuan dan pengamatan mereka selama ini. Hal tersebut juga ditanyakan kepada responden dalam penelitian ini. Rata-rata jawaban responden untuk pertanyaan ini adalah 3,30 dari skala 5 Artinya masih diperlukan penambahan baik kuantitas maupun kualitas untuk penulisan tentang perempuan. Hasil selengkapnya seperti dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3 **Tingkat Kepuasan Rata Rata Terhadap Penulisan Isu Perempuan**

Kota	Rata Rata Kepuasan
Jakarta	3.25
Makassar	3.10
Medan	3.44
Jayapura	3.33
Pontianak	3.56
Surabaya	3.69
Yogyakarta	2.92
Total	3.30

Selanjutnya grafik dibawah ini menjelaskan persentase di masing-masing jawaban responden per daerah.



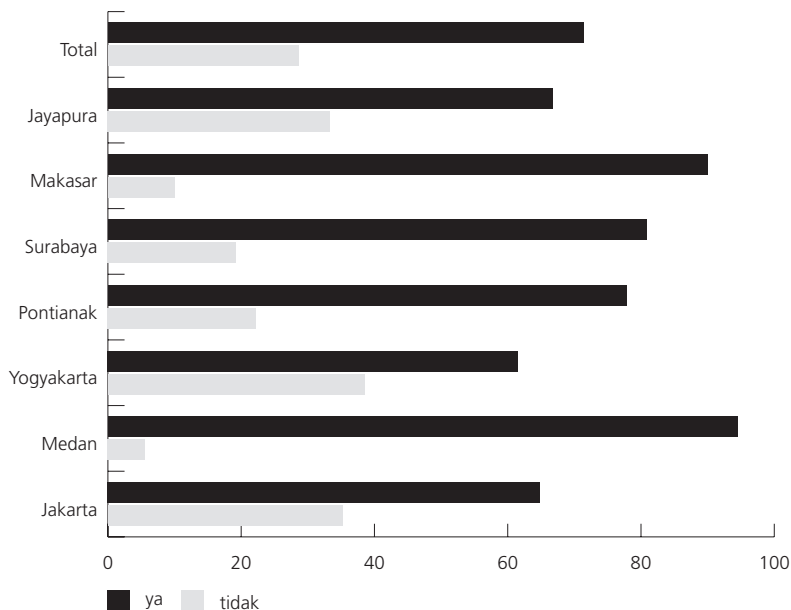
Grafik 4.3 **Tingkat Kepuasan Terhadap Penulisan Isu Perempuan**

Seperti indikator sebelumnya, untuk pertanyaan ini pun, sebagian besar jawaban responden berada di tingkat puas yang diakui oleh 44,97% responden diikuti biasa saja (30,16%), tidak puas (19,58%), sangat puas (3,70%) dan sangat tidak puas (1,59%). Pada pertanyaan ini jawaban puas paling banyak ditemui di Medan, Pontianak, Surabaya dan Makassar.

3.4 Kontribusi Penulisan Tentang Perempuan

Sebagai jurnalis perempuan, responden juga ditanyakan apakah mereka sudah berkontribusi dalam menulis artikel tentang perempuan di medianya masing-masing. Hasilnya 71,43% sudah melakukan hal tersebut dan masih ada 28,57%

responden yang belum secara khusus menulis artikel tentang perempuan. Medan memegang peringkat tertinggi dimana 94,44% jurnalis perempuannya menulis tentang perempuan sementara Yogyakarta berada di peringkat paling bawah meskipun persentasenya juga cukup besar (61,54%).

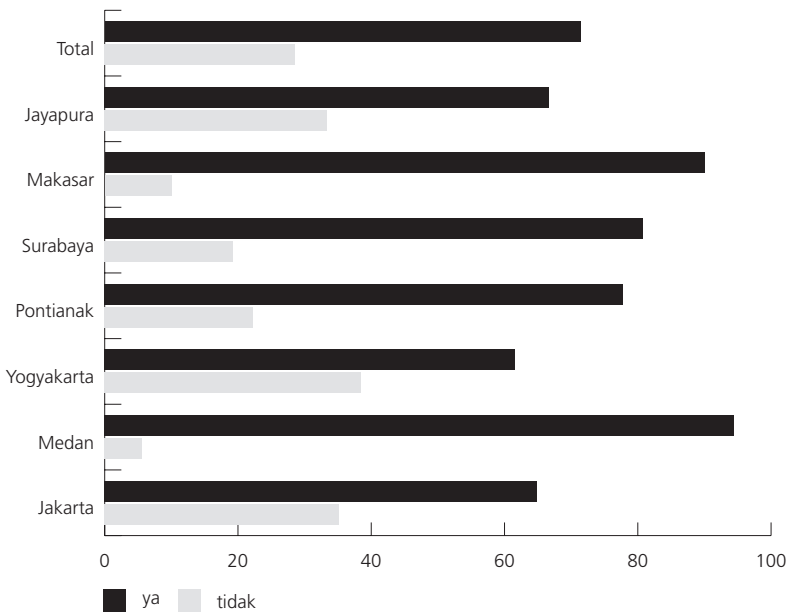


Grafik 4.4 **Kontribusi Penulisan Tentang Perempuan**

Jenis-jenis tulisan yang dikerjakan oleh para responden pun beragam mulai dari profil perempuan dengan kiprahnya, artikel kesehatan, gaya hidup, politik dan perempuan hingga artikel artikel yang khusus membahas perspektif gender. Gambaran di atas menunjukkan bahwa jurnalis perempuan dipercaya dapat menuliskan artikel tentang perempuan lebih baik dibandingkan jurnalis laki-laki yang secara jumlah lebih banyak daripada jurnalis perempuan.

3.5 Diskriminasi Dalam Tugas

Untuk melengkapi pendapat responden tentang posisi perempuan pada media, penelitian ini juga menanyakan ada tidaknya diskriminasi dalam menjalankan tugas, misalnya bagi jurnalis yang ditempatkan di daerah-daerah seperti Kantor Kepolisian dan TNI. Hasilnya secara nyata 93,14% jurnalis perempuan menyatakan tidak ada diskriminasi, hanya sebagian kecil 6,59% yang masih merasakan adanya diskriminasi. Hasil selengkapnya dijelaskan pada grafik di bawah ini.



Grafik 4.5 **Diskriminasi Dalam Tugas**

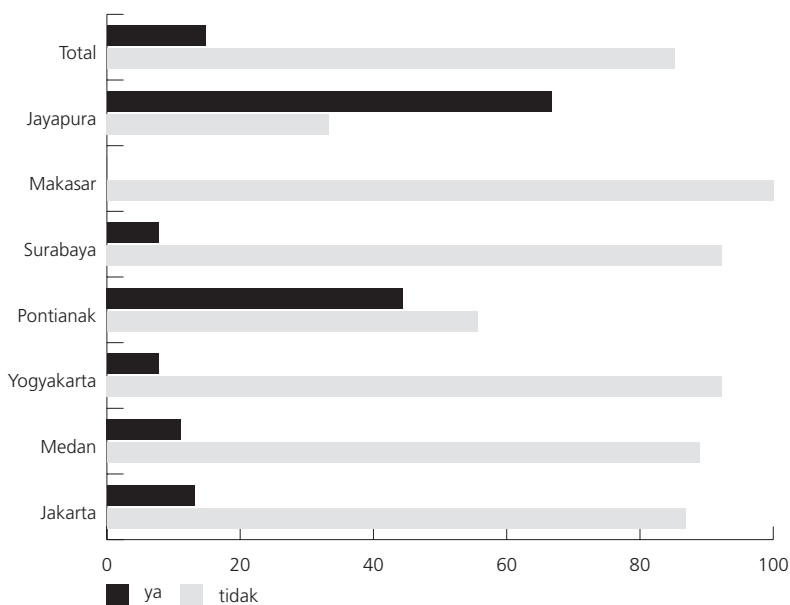
Sangat jelas terlihat, hampir di semua daerah secara rata-rata lebih dari 85% jurnalis perempuan tidak mendapatkan diskriminasi dalam bertugas, namun di Makassar masih ada 30% responden yang menyatakan masih merasakan diskriminasi ketika mereka melakukan peliputan di kepolisian dan Mabes polri. Beberapa jurnalis perempuan menyatakan bahwa sebagian orang masih melihat bahwa tempat-tempat

seperti kantor polisi dan kantor TNI merupakan tempat yang hanya layak diliput oleh laki-laki.

3.6 Pelecehan Seksual dalam Tugas

Beberapa pelecehan sering menimpa perempuan. Ada beberapa pelecehan yang diidentifikasi oleh UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Pelecehan dan kekerasan tersebut antarlain: Kekerasan Fisik, Kekerasan psikis, Ekonomi dan kekerasan seksual.

Apakah para jurnalis perempuan mengalami kekerasan atau pelecehan ketika mereka bertugas? Secara umum 85,19% responden mengaku tidak pernah mengalami hal ini. Namun 14,81% jurnalis perempuan masih mengalami pelecehan dan kekerasan dalam tugasnya.



Grafik 4.6 Pelecehan Seksual Dalam Tugas

Dari grafik diatas terlihat, persentase jurnalis yang tidak mengalami pelecehan melebihi 85% di hampir semua daerah, sementara yang masih mengalami berkisar antara 7-14%. Sangat disayangkan Pontianak dan Jayapura mengalami pelecehan cukup besar masing-masing 44,44% dan 66,67%. Bahkan di Jayapura dengan jumlah sebesar itu disimpulkan lebih dari separuh jurnalis perempuannya mengalami pelecehan seksual. Kedua daerah tersebut sepatutnya mendapat perhatian lebih besar terhadap faktor ini.

Di Jayapura misalnya, seorang jurnalis perempuan masih mengalami pelecehan dari narasumber ketika mereka melakukan peliputan di lapangan. Tak jarang narasumber yang melecehkan mereka maupun mengajak berkencan. Jurnalis perempuan di Jayapura juga lebih rawan dalam menjalankan tugasnya karena mereka berada seringkali bekerja di daerah yang sedang berkonflik. Pastinya hal ini harus diketahui media tempat para jurnalis perempuan ini bekerja, karena memberikan pengamanan pada jurnalis ketika sedang bekerja merupakan tanggungjawab dari perusahaan media. •

BAB III E

Kesimpulan

3.1 Kesimpulan Umum

1. Secara umum, jumlah jurnalis perempuan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah jurnalis laki-laki dengan perbandingan 1: 3 hingga 1:4
2. Walaupun tidak ada perbedaan gaji dan fasilitas yang diterima jurnalis perempuan dibandingkan jurnalis laki-laki, namun diskriminasi dan pelecehan/ kekerasan ketika dalam peliputan masih dialami para jurnalis perempuan. Penelitian juga menunjukkan sebanyak 6,59% jurnalis perempuan mengalami diskriminasi dan 14,81% mengalami pelecehan ketika bertugas. Tak jarang narasumber mengajak berkencan jurnalis perempuan.
3. Pelecehan seksual terhadap jurnalis perempuan masih dialami oleh jurnalis perempuan dengan kejadian terbanyak di Jayapura dan Pontianak.
4. Persoalan lain yang masih dialami jurnalis perempuan adalah belum banyaknya jumlah jurnalis perempuan yang duduk sebagai pengambil kebijakan di media. Padahal untuk merubah sebuah kebijakan, lebih baik

ada banyak jurnalis perempuan lagi yang menduduki posisi ini.

5. Soal kebijakan tertulis yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi jurnalis perempuan juga belum banyak dilakukan perusahaan media. Untuk persoalan istirahat bagi jurnalis perempuan yang sedang menyusui misalnya, media tempat mereka bekerja belum menganggap ini menjadi bagian yang penting. Jadi tidak ada kebijakan istirahat khusus bagi jurnalis perempuan yang sedang menyusui. Hal lain adalah masih minimnya kebijakan untuk cuti haid dan tersedianya ruangan untuk menyusui. Kebanyakan perusahaan media belum menjadikan ini sebagai kebijakan untuk jurnalis perempuan.
6. Penelitian juga menunjukkan bahwa hanya 17,46% jurnalis yang mendapatkan pelatihan gender dan hanya sekitar 33% yang masuk di organisasi jurnalis.
7. Penelitian juga menunjukkan bahwa sebanyak 51,8% jurnalis perempuan belum mendapatkan fasilitas peliputan di malam hari.

3.2 Kesimpulan soal Fasilitas

Dari sisi fasilitas yang sudah diberikan kepada jurnalis perempuan, secara keseluruhan dilakukan pengelompokan berdasarkan persentase jawaban Ya, atau fasilitas tersebut sudah diberikan. Untuk 12 indikator yang sudah dipaparkan pada bagian sebelumnya, pengelompokannya adalah sebagai berikut:

1. Rendah (Jawaban Ya < 50%) untuk tunjangan transportasi tugas malam, cuti haid, manajemen laktasi (kesempatan menyusui), ruang menyusui dan tempat

penitipan anak;

2. Sedang (Jawaban Ya 50,99%-79,99%) untuk asuransi, Jamsostek, tunjangan makan, dan tunjangan transportasi;
3. Tinggi (Jawaban Ya > 80,00%) untuk gaji rutin, cuti tahunan dan cuti melahirkan.

Fasilitas dalam kelompok rendah perlu mendapat perhatian lebih lanjut dari manajemen media dan pihak-pihak yang *concern* terhadap profesi jurnalis.

Dilihat perlokasi responden riset, Jakarta merupakan daerah tertinggi yang fasilitas bagi jurnalis perempuan paling banyak dipenuhi oleh medianya, disusul Medan, Jayapura, dan Pontianak di peringkat kedua. Di posisi selanjutnya tercatat Surabaya, sementara Makassar dan Yogyakarta fasilitas jurnalisnya tergolong paling sedikit dibandingkan daerah lain.

3.3 Harapan dan Kenyataan

Dari skala 5, untuk semua indikator, harapan responden ada di angka 4,37 sementara kenyataannya baru pada level 3,17. Dilihat per daerah, Pontianak tercatat sebagai daerah yang kesenjangan antara harapan dan kenyataannya paling tipis dibandingkan dari lain, diikuti Yogyakarta dan Surabaya.

Berdasarkan Indeks *Importance Performance Analysis* urutan indikator-indikator yang harus dibenahi adalah:

1. Prioritas 1: cuti haid, kesempatan untuk menyusui, tempat penitipan anak dan pemberian waktu istirahat;
2. Prioritas 2: kondisi jam kerja, perlindungan kerja, asuransi, jamsostek, cuti melahirkan dan kesempatan menjadi pengambil kebijakan;

3. Prioritas 3: gaji rutin, tunjangan makan, tunjangan transportasi, cuti tahunan dan kesempatan mendapatkan pendidikan tambahan.

3.4 Potret Perempuan dan Media

1. Rata-rata para jurnalis perempuan sudah cukup puas terhadap liputan tentang perempuan di medianya masing-masing dimana tingkat kepuasannya mencapai 3,45 dari skala 5. Namun mereka memang mengakui masih diperlukan penambahan tulisan tentang perempuan tidak hanya menyangkut isu gender tetapi juga tentang topik-topik lain seperti perempuan berprestasi dan lain-lain;
2. Kehadiran narasumber perempuan mendapatkan tingkat kepuasan 3,50 dari skala 5. Secara umum responden perempuan sudah dipandang sama dengan responden laki-laki. Tidak ada perbedaan, karena pada akhirnya pemilihan responden didasarkan pada kompetensinya bukan gender. Meski demikian, responden mengakui jumlah narasumber perempuan yang kompeten jumlahnya masih sedikit dibandingkan narasumber laki-laki;
3. Kepuasan terhadap penulisan artikel tentang perempuan ada di angka 3,30 dari skala 5. Responden mengakui saat ini makin banyak muncul rubrik khusus untuk perempuan di media.
4. Dari sisi kontribusi penulisan artikel tentang perempuan, 71,43% responden mengakui sudah sering menulis tentang perempuan dengan berbagai topik mulai dari isu gender, profil, artikel kesehatan serta perempuan di kancah politik. •

BAB IV

Jejak para Jurnalis Perempuan (Penelitian Kualitatif)

“Secara umum, para jurnalis perempuan memilih untuk lebih fokus dalam karirnya, namun banyak jurnalis perempuan yang kemudian juga fokus untuk menuliskan persoalan perempuan di medianya. Hanya beberapa jurnalis perempuan yang memilih untuk bergiat di organisasi atau serikat pekerja untuk mengatasi persoalan yang dialami para jurnalis perempuan di tempat kerja”.

BERKIPRAH di dunia jurnalistik, bukanlah merupakan hal baru bagi para perempuan di dunia. Jepang misalnya, pernah mempunyai seorang jurnalis perempuan bernama Yayori Matsui. Jurnal Perempuan pernah menulis, Yayori Matsui adalah seorang jurnalis yang mempunyai komitmen tinggi terhadap kemanusiaan. Berbagai persoalan perempuan di Asia pernah ia tulis, dari soal perdagangan anak, isu globalisasi

hingga dampaknya bagi perempuan.¹

Jurnalis perempuan lain yang patut dicatat kiprahnya adalah Susan Faludi. Susan Faludi bahkan pernah mendapatkan penghargaan Pulitzer ketika ia memfokuskan diri untuk menuliskan isu-isu perempuan di media.

Nama jurnalis perempuan lainnya adalah Tawakul Abdus Salam Karman dari Yaman. Di Yaman ia dikenal sebagai jurnalis muslim yang dikenal sangat kritis. Ia juga dikenal sebagai aktivis politik dan hak asasi manusia. Di bidang jurnalistik, Tawakul Karman kemudian memimpin kelompok jurnalis perempuan yang menyoroti berbagai hak asasi manusia. Atas kiprahnya ini, ia kemudian diberikan penghargaan Nobel Perdamaian di tahun 2011.²

Di Indonesia sendiri, sejarah telah mencatat kiprah besar para jurnalis perempuan di media. Seorang antropolog Belanda dan pemerhati persoalan Indonesia, Elsbeth Locher-Scholten juga mencatat bahwa gerakan massa untuk emansipasi perempuan di Indonesia dimungkinkan karena dorongan dari surat kabar. Peran surat kabar yang banyak menuliskan soal perempuan ini kemudian menjadi penunjang sekaligus menjadi bagian yang menentukan pada periode kebangkitan nasional di sekitar abad 20.³

Di masa kolonial, media banyak digunakan oleh organisasi perempuan untuk menuliskan ideologi, sekaligus fakta historis. Bahkan Pramoedya Ananta Toer menyatakan, tanpa media, organisasi yang hidup pada masa itu tidak bisa menyampaikan agitasi dan propaganda organisasi secara otomatis.⁴

1 *Perempuan dan Media*, Jurnal Perempuan, Edisi 28, Jakarta, 2003

2 "Tawakul Karma, Peraih Nobel Perdamaian", dalam <http://headlines.vivanews.com/news/read/274090-tawakul-karman--peraih-nobel-perdamaian>, diakses tanggal 15 Juni 2012.

3 Elsbeth Locher-Scholten, *Women and the Colonial State*, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2000

4 Pramoedya Ananta Toer, *Sang Pemula*, Hasta Mitra, Jakarta, 1995.

Ide tentang media perempuan kemudian muncul seiring dengan ide tentang emansipasi. Emansipasi perempuan memasuki Indonesia melalui bacaan yang datang dari Eropa pada tahun 1900. R.A. Kartini merupakan angkatan pertama perempuan di Jawa yang mendapatkan pendidikan dari Barat. Dalam tulisan-tulisan di media, Kartini dan para istri bupati banyak menuliskan tentang kebutuhan perempuan untuk mendirikan sekolah bagi para perempuan di Indonesia.

Di masa selanjutnya, banyak perempuan jurnalis yang kemudian berkiprah untuk menulis di koran *Poetri Hindia* di tahun 1908. Seluruh awak redaksi yang didirikan Tirto Adhi Soerjo ini digawangi oleh perempuan. Di *Poetri Hindia*, banyak perempuan menulis tentang apa yang mereka alami di masa-masa kolonial Belanda.⁵

Dua tahun setelah perkembangan *Poetri Hindia*, muncullah surat kabar khusus untuk perempuan *Soenting Melajoe* yang lahir pada 10 Juli 1912. Dengan dipimpin oleh Roehanna Koeddoes dan Ratna Djuwita, *Soenting Melajoe* kemudian menjadi koran pertama yang mengupas persoalan-persoalan yang dialami para perempuan. Bahkan koran ini membuat sejarah besar di Indonesia, yaitu sebagai koran pertama yang dibuat khusus untuk perempuan.

Sejarah juga mencatat, tulisan-tulisan para jurnalis perempuan lain yang hidup di masa-masa setelah itu bermunculan. SK Trimurti merupakan jurnalis perempuan kebanggaan Indonesia. Ia pernah menjadi wartawan tiga jaman. Trimurti menjadi jurnalis di *Majalah Pikiran Rakyat*, *Pesat*, *Bedung* dan *Genderang*. Tulisan-tulisannya di *Harian Rakyat* tentang perempuan sangat memperjelas bagaimana keberpihakan SK Trimurti pada isu-isu perempuan.

5 Luviana, *Identitas Perempuan Indonesia Dalam Koran dan Majalah*, Jurnal Perempuan, Edisi 52, Jakarta, 2007

Di samping SK Trimurti, beberapa jurnalis perempuan lain kemudian juga melahirkan majalah Berita Gerwani dan Api Kartini. Mereka antara lain Sudjinah, Sri Supanggih dan Suharti. Kedua media ini kemudian banyak menuliskan tentang persoalan yang dialami para petani dan buruh perempuan di Indonesia.

Masuknya Industri Media, tak membuat perempuan berhenti berkiprah. Sebut saja sejumlah nama seperti Siti Latifah Herawati Diah yang di tahun 1955 sudah menulis dan mengelola Indonesian Observer. Ia juga berkiprah mendirikan majalah Keluarga di tahun 1940. Hingga saat ini nama Herawati Diah masih membubuhkan sejarah panjang dalam dunia jurnalistik di Indonesia.

Lalu bagaimana kiprah jurnalis perempuan di masa sekarang?

Penelitian ini juga melakukan wawancara mendalam pada beberapa jurnalis perempuan yang bekerja di sejumlah media di Indonesia. Tak cukup hanya dengan menyajikan berbagai persoalan yang dialami jurnalis perempuan. Namun, selanjutnya, sangat penting untuk mengetahui apa yang para jurnalis perempuan sudah lakukan di medianya masing-masing. Dan dengan cara apa mereka merespon isu perempuan di media.

Sejumlah jurnalis perempuan berikut ini memaparkan apa saja yang mereka alami dan perjuangkan di media. Karena menyelesaikan persoalan yang mereka alami di media merupakan salah satu tolak ukur bahwa jurnalis perempuan tak pernah tinggal diam. Mereka bergerak, baik secara sendiri maupun bersama-sama untuk mencoba menuntaskan persoalan perempuan sekaligus persoalan yang mereka alami di media.

Kami memilih sejumlah jurnalis perempuan yang bekerja di

sejumlah media, baik di media cetak, radio dan media online. Para jurnalis perempuan ini rata-rata sudah bekerja lebih dari 10 tahun dan saat ini duduk sebagai pengambil keputusan di medianya masing-masing. Dengan membaca pengalaman mereka, kita akan dituntun untuk memahami persoalan yang dialami para jurnalis perempuan di media.

Maria Hartiningsih adalah sesosok jurnalis yang mengukir sejarah dalam tulisannya tentang isu perempuan dan hak asasi manusia di Indonesia. Perjuangan Maria melalui tulisannya membuahkan hasil bagi perempuan dan korban HAM di Indonesia. Maria kemudian juga mendapatkan penghargaan Yap Thiam Hien di tahun 2003. Hermien Kleden, jurnalis perempuan senior dari Majalah Tempo juga mencatatkan prestasinya. Berkat kerja kerasnya di dunia jurnalistik, Hermien Kleden kemudian mendapatkan penghargaan SK Trimurti dari AJI. Hermien juga dikenal sebagai wartawan politik dan wartawan investigasi yang handal di Indonesia. Dan ada lagi Fransiska Ria Susanti yang sudah meniti karir jurnalistiknya sejak ia remaja. Di masa mudanya, kini ia sudah memimpin Harian Sinar Harapan dengan menjadi Wakil Pemimpin Redaksi. Ada pula Iin Yumiyanti. Iin adalah salah satu jurnalis perempuan pertama yang bekerja di era new media di Indonesia. Jabatannya saat ini sebagai redaktur pelaksana di Detik.com. Beberapa jurnalis perempuan yang sengaja kami wawancarai menceritakan kisah mereka, soal pilihan-pilihan mereka, persoalan dan harapan mereka ketika menjadi jurnalis perempuan:

1. Maria Hartiningsih (Wartawan Senior Kompas)

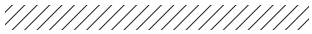
MARIA Hartiningsih memulai karir sebagai jurnalis sejak tahun 1984. Ia sebelumnya telah bekerja sebagai analis kimia di PT. Sucofindo sesuai dengan pendidikannya dari SMA di

bagian Farmasi. Dunia jurnalis menurutnya bisa diibaratkan sebagai gerbang menuju dunia yang baru. Ia menggambarkan semua dunianya tak lebih dari laboratorium. Tapi setelah itu, kehidupan jurnalis membuatnya bertemu dengan banyak orang dan melakukan banyak perjalanan. Pada Desember 1986, Maria sebenarnya memiliki pilihan untuk pindah ke Belanda dan bergabung dengan Radio Nederland Wereldomroep (RNW). Ia sempat cuti dari Kompas dan melakukan perjalanan ke Belanda. Saat itu, ia selangkah lagi menuju RNW dan hanya perlu menandatangani kontrak. Tapi saat menunggu waktu pertemuan, Maria datang terlalu pagi, ia mendengar kata hatinya yang menyuruh ia untuk pulang.

Sejak awal bergabung dengan Kompas, Maria telah menunjukkan kalau ia bukan jurnalis biasa. Enam bulan bekerja di Kompas, ia telah mendapatkan penghargaan dari Ikatan Penerbit Indonesia. Ia kemudian banyak bergelut dengan isu-isu hak asasi manusia (HAM). Maria misalnya melakukan kerja jurnalistik mendalam dengan menjadi sukarelawan di pusat pelayanan kemanusiaan pimpinan Bunda Theresa, di Calcutta, India pada awal 1990-an. Tak hanya itu, pergelutannya dalam penulisan tentang Hak Asasi Manusia membuat ia kemudian menerima penghargaan Yap Thiam Hien pada tahun 2003. Sebuah penghargaan yang menjadi pengakuan akan konsistensinya menyuarakan isu HAM dan kemanusiaan. Dewan Juri Yap Thiam Hien Award 2003 menjelaskan penghargaan itu diberikan karena Maria melalui tulisan-tulisannya yang konsisten memperjuangkan ide-ide kemanusiaan dan hak asasi manusia. Maria dinilai juga secara sungguh-sungguh mendorong jurnalisme damai dan menjadi wartawan yang mampu mendayagunakan peran dan pribadinya dalam tugas penyebarluasan ide kemanusiaan dan hak manusia yang asasi.

Selama ini Maria juga adalah seorang jurnalis yang ikut pula mendorong jurnalisme damai yang belum banyak diikuti

oleh jurnalis lainnya. Isu lain yang juga ia geluti antara lain kekerasan terhadap perempuan, pluralisme, kepedulian terhadap perilaku remaja, HIV/ AIDS, perdagangan anak dan perempuan, kekerasan pemilu, hingga ihwal demokrasi, dan masyarakat sipil.



Dewan Juri Yap Thiam Hien Award 2003 menjelaskan penghargaan itu diberikan karena Maria melalui tulisan-tulisannya yang konsisten memperjuangkan ide-ide kemanusiaan dan hak asasi manusia.

Sebelumnya, Maria memilih jalur non karir di keredaksian Kompas. Ketika Kompas membenahi redaksi dan mengharuskan semua awak berada di dalam struktur, Maria lalu berada di desk investigasi hingga saat ini. Ia banyak menghasilkan tulisan *in-depth* mengenai topik-topik terkait kemanusiaan. Kesempatan promosi selama ini juga diberikan berdasarkan prestasi, bukan karena dia laki-laki atau perempuan. Banyak pekerja perempuan di Kompas yang

sekarang menjadi kepala desk. Maria mengatakan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan juga terbuka lebar. Semua berpulang pada si pekerja sendiri; apakah ia mau meneruskan pendidikan atau mengambil pelatihan. Perusahaan juga memberikan asuransi. Maria melihat kekurangan yang diberikan asuransi yang ada saat ini hanyalah layanan yang belum meliputi pengobatan herbal dan akupunktur. Padahal saat ini, pengobatan model ini telah berkembang dan Maria juga lebih memilih untuk menjalani program ini.

Di Kompas, cuti tahunan diberikan selama 12 hari. Perempuan yang melahirkan diberikan hak cuti selama tiga bulan. Cuti haid juga diperbolehkan diambil untuk pekerja perempuan. Catatan Maria adalah pada cuti melahirkan. Karena mengambil jeda terlalu lama, produktivitas perempuan

pada masa itu berkurang. Hal ini akan berpengaruh terhadap penilaian. Penurunan produktivitas akan menyebabkan berkurangnya penilaian yang didapat pekerja perempuan.

Kompas kini telah memiliki ruang menyusui. Ruangan ini baru saja disediakan setelah kantor Kompas di Palmerah direnovasi. Hanya saja Kompas tidak memiliki tempat penitipan anak.

Terhadap isu-isu perempuan, selama ini menurutnya Kompas sangat terbuka terhadap isu-isu perempuan. Maria menyebutkan ia misalnya secara konsisten menulis mengenai perkosaan Mei 1998. Setiap tahun, pada Mei, sejak 1999-2009, Maria memberikan perhatian khusus terhadap isu ini. Ia berhenti menulis mengenai peristiwa Mei pada 2010, karena beranggapan isu ini akan ditulis oleh jurnalis yang lebih muda. Sayang ternyata, perkiraannya ini meleset. Mulai tahun ini, Maria bertekad untuk kembali menulis. Dia berusaha agar sejarah masa lalu tidak hilang.

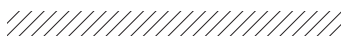
Kompas sendiri juga sempat memiliki Swara, yang disediakan khusus untuk mengangkat isu-isu perempuan. Pada 1999-2000, Swara beredar dalam format tabloid dan disisipkan di harian Kompas. Setelah itu alokasi Swara dipangkas menjadi hanya dua lembar dan berkurang lagi menjadi hanya satu lembar. Swara kemudian menjadi hanya setengah lembar. Dan setahun kemarin, tempatnya akhirnya tergusur. Maria mengatakan industri media juga mempertimbangkan iklan yang mendukung hidupnya halaman. Kalau ada iklan, Swara juga mendapatkan halaman. Kendati tak lagi mendapatkan *space* khusus, Maria mengatakan ide-ide tentang isu perempuan tetap dapat tersaji di beragam halaman, sesuai dengan tema besar yang ditulis.

2. Fransiska Ria Susanti (Wakil Pemimpin Redaksi Sinar Harapan)

MENJADI jurnalis bukan satu-satunya cita-citanya dulu. Yang jelas, sejak ia menginjak masa SMA di Yogyakarta, dunia tulis-menulis kemudian dilirikinya. Santi, begitu ia biasa disapa, telah menjadi jurnalis sejak ia duduk di bangku SMA. Ketika itu ia masuk menjadi salah satu jurnalis muda untuk mengelola rubrik: Gema (sebuah rubrik khusus untuk anak-anak remaja) di Harian Bernas di Yogyakarta. Disitulah kemudian ia ditempa untuk menjadi jurnalis. Ketika ia meneruskan kuliah, dunia jurnalistik ditinggalkannya sementara. Ia memilih bergabung dengan organisasi PRD (Partai Rakyat Demokratik). Disini ia memegang divisi politik. Santi kemudian banyak belajar tentang pembelaannya terhadap masyarakat terutama perempuan di organisasinya ini. Beberapa buku tentang perempuan kemudian ditulisnya. Seperti buku berjudul “Kembang-kembang Genjer” yang menuliskan tentang perjuangan para perempuan Gerwani dalam memperoleh haknya.

Setelah lama berorganisasi, Santi kemudian kembali menekuni dunia jurnalistik. Ia kemudian menjadi jurnalis di Media Indonesia. Tak lama kemudian, Media Indonesia ditinggalkannya. Lalu ia menjadi jurnalis di Sinar Harapan Jakarta. Sinar Harapan ditinggalkannya untuk sementara waktu, ia kemudian pindah ke Hongkong. Di Hongkong, Santi bekerja sebagai jurnalis untuk sebuah koran untuk warga negara Indonesia yang bekerja di sana. Banyak tulisan tentang suka-duka warga Indonesia yang hidup di Hongkong terutama para TKI lahir di tangan Santi.

Sekembali dari Hongkong, Santi kembali masuk ke Sinar Harapan hingga menempati posisi sebagai Wakil Pemimpin Redaksi di usianya yang ke-38 tahun saat ini. Banyak waktu yang ia habiskan di Sinar harapan dengan tugas barunya ini. Dari memimpin rapat di kantor hingga mendatangi berbagai acara.



Saya ingat peristiwa itu. Saya dilecehkan karena saya perempuan". Ia sadar, untuk liputan di daerah konflik atau bencana, posisi jurnalis perempuan menjadi lebih rawan dibandingkan laki-laki.

Selain sebagai organisatoris di PRD, Santi juga dikenal sebagai wartawan politik. Bertahun-tahun dirinya terasah untuk memegang desk politik dan nasional. Walaupun keberpihakan terhadap perempuan dan hak asasi manusia bukan menjadi bagian baru bagi hidupnya. Maka tak heran, di media tempat ia bekerja, ia lalu merintis pendirian

sebuah Serikat Pekerja. Di Serikat pekerja Sinar Harapan inilah ia bersama teman-temannya banyak memperjuangkan isu perempuan. Karena beberapa jurnalis perempuan, dulu masih mendapatkan perlakuan diskriminatif, seperti: belum mendapatkan asuransi karena dianggap bukan kepala keluarga. Inilah yang mengakibatkan beberapa jurnalis perempuan jadi kesulitan ketika anaknya sakit, padahal jurnalis perempuan ini telah berpisah dengan suaminya. Persoalan perempuan lain yang sering ia lihat adalah banyaknya pelecehan yang terjadi di kalangan jurnalis. Walaupun hanya sebatas gurauan di tempat kerja, namun gurauan ini kadang mengandung pesan yang melecehkan. Namun seringkali ini tak terselesaikan karena tak banyak yang merasakan ini sebagai sebuah persoalan. Dulu, Santi juga pernah mengalami pelecehan ketika ia sedang bertugas. Ketika itu ia sedang pergi ke Aceh untuk melakukan liputan Tsunami di tahun 2005. Ada seorang laki-laki yang melakukan pelecehan terhadapnya."Saya ingat peristiwa itu. Saya dilecehkan karena saya perempuan". Ia sadar, untuk liputan di daerah konflik atau bencana, posisi jurnalis perempuan menjadi lebih rawan dibandingkan laki-laki.

Selain berjuang untuk tulisan tentang gender dalam pemberitaannya dan membangun kembali Serikat Pekerja

yang sempat mati suri karena ditinggalkan para pengurusnya, kini Santi juga berjuang agar jumlah jurnalis perempuan sebanding dengan jurnalis laki-laki. Perjuangannya ini kini membuah hasil. Banyak jurnalis perempuan yang kini masuk di Sinar Harapan. Menurutnya, dunia jurnalistik tak pernah membedakan soal perempuan dan laki-laki. Semua berhak bekerja sebagai jurnalis.

3. Hermien Kleden (Redaktur Utama Tempo)

HERMIEN Kleden merupakan seorang jurnalis perempuan senior yang cukup disegani di dunia jurnalistik di Indonesia. Ia merupakan wartawan politik sekaligus wartawan investigasi yang handal. Banyak jurnalis-jurnalis muda telah belajar banyak padanya.

Hermien merintis karir sebagai jurnalis sejak 1987 dengan bekerja sebagai kontributor sebuah majalah internasional dari Perancis. Sejak 1998 ia menduduki jabatan sebagai Chief Editor di Tempo yang membawahi 10 orang jurnalis di Tempo Indonesia dan empat orang jurnalis untuk Tempo berbahasa Inggris. Pendidikan jurnalis didapatkan sejak ia kuliah di UGM (Universitas Gajah Mada) Yogyakarta dan berbagai pelatihan selama lebih dari 20 tahun karirnya di dunia ini. Namun ia sendiri mengakui belum pernah mengikuti pendidikan jurnalisme dengan perspektif gender.

Hermien terbiasa bekerja keras setiap harinya. Ia bekerja minimal 14 jam sehari bahkan sering pula hingga 48 jam nonstop. Kesibukannya sangat padat mulai dari berbagai meeting redaksi, mengecek laporan jurnalis, memeriksa data hingga memastikan *setting* majalah untuk siap naik cetak. Secara jujur ia mengakui terkadang juga memerlukan waktu untuk pribadi, karena sebagian besar waktunya sudah sangat

tersita oleh pekerjaan. Waktu istirahat yang diberikan oleh kantornya sekitar satu jam, namun itu pun sangat fleksibel seperti halnya pekerja media lain.

Konsistensinya di dunia jurnalistik kemudian membuahkan hasil. Pada tahun 2009 Hermien mendapatkan penghargaan SK Trimurti dari AJI. Sebuah penghargaan yang memberikan apresiasi kepada kaum perempuan yang telah berjuang memperkokoh prinsip-prinsip demokrasi secara umum dan kebebasan berekspresi di berbagai ranah profesi.

Tentang persoalan yang dialami jurnalis perempuan, Hermien mengatakan lima tahun lalu memang sempat ada perbedaan antara jurnalis laki-laki dan perempuan di media tempatnya bekerja, tetapi kini sudah tidak ada lagi. Jamsostek juga diberikan sama antar semua karyawan yang besarnya sesuai dengan gaji masing-masing.

Selain itu Tempo juga memberikan tunjangan transportasi yang besarnya disesuaikan dengan gaji. Tentang tunjangan perlindungan kerja seperti pulang malam, diakuinya ini memang tidak ada di Tempo. Menurut Hermien pekerjaan jurnalis memang mengandung resiko dan itu harus disadari oleh semua jurnalis. Jadi meskipun tunjangan jenis seperti itu tidak ada, ini tak pernah menjadi masalah baginya.

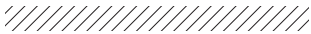
Hermien juga menyatakan, cuti haid yang merupakan cuti khusus untuk perempuan, umumnya belum populer di kalangan jurnalis perempuan, tak seperti cuti melahirkan. Kekurangpopuleran cuti haid sama seperti kurang populernya ruangan untuk menyusui. Hingga kini tak banyak media mempunyai ruang untuk menyusui. Hermien berharap dua isu ini bisa diperjuangkan bersama-sama dengan para jurnalis lainnya.

Jika membicarakan tentang peningkatan kualitas jurnalis, menurut Hermien, Tempo adalah media yang sangat peduli

terhadap peningkatan wawasan kecerdasan jurnalisnya. Semua karyawan mendapatkan kesempatan yang sama sesuai kemampuannya dan itu sangat dianjurkan. Pada akhirnya kemampuan yang meningkat akan membuka peluang untuk meraih jabatan yang lebih tinggi di kantor seperti masuk dalam jenjang struktural pengambil keputusan.

Hingga kini, Hermien sangat menikmati pekerjaannya sebagai jurnalis. Baginya kedudukan jurnalis perempuan dan laki-laki itu sama saja. Ia tidak pernah mengalami diskriminasi dalam menjalankan tugas.

Selama ini, Hermien merasa Tempo sudah cukup banyak menyajikan berita tentang perempuan. Namun karena 'kiblat' majalah Tempo adalah *public interest*, maka isunya bukan dilihat dari sisi gender tapi dari sisi publik secara umum seperti kezaliman terhadap perempuan. Topik seperti ini sering sekali ditangani oleh Hermien. Ia juga secara khusus pernah menulis profil Ibu Shinta Wahid ketika masih mendampingi Gusdur menjadi Presiden RI.



Konsistensinya di dunia jurnalistik kemudian membuahkan hasil. Pada tahun 2009 Hermien mendapatkan penghargaan SK Trimurti dari AJI.

Walaupun secara topik, Hermien merasa cukup puas, namun dari sisi jumlah narasumber ia merasa masih kurangnya jumlah narasumber perempuan. Kondisi ini seharusnya bisa lebih baik lagi agar isu tentang perempuan dapat ditampilkan secara berimbang. Hermien juga berharap medianya akan lebih banyak mengangkat isu tentang perempuan di kemudian hari.

Di Tempo sendiri, Hermien mengakui jumlah perempuan yang masuk dalam pengambil keputusan di jajaran redaksi masih sangat sedikit. Sejujurnya Hermien merasa jumlah

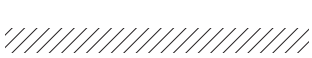
tersebut belum cukup memuaskan, karena itu masih perlu dicari bibit baru yang mampu duduk dalam manajemen. Hermien berharap perempuan lebih banyak lagi bekecimpung di industri media karena industri media berkaitan dengan penulisan dan perempuan lebih terampil dalam hal penulisan. Perempuan juga lebih tahan terhadap tekanan apapun dan dia bisa lentur dalam menghadapi tantangan.

4. Adek Berry (Fotografer AFP)

ADEK Berry pernah mengalami pelecehan seksual ketika ia melakukan peliputan. Peristiwa itu terjadi ketika kerusuhan Mei 1998 di Jakarta. Ketika ia akan mengambil gambar, massa yang saat itu berada di lokasi ingin merabara-bara bagian tubuhnya, “Kalau saya melihat, ini konteksnya adalah karena saya adalah seorang perempuan”, kata Adek. Karena pelecehan yang sama tidak dialami oleh jurnalis laki-laki temannya. Menjadi fotografer, tugasnya kadang jauh lebih berat dibandingkan menjadi jurnalis yang menulis (reporter). Adek pernah dikirim ke daerah-daerah perang seperti Pakistan dan Afganistan. Dalam konteks yang luas, memang tidak ada diskriminasi yang terjadi padanya, namun tak jarang beberap kali ia mendapatkan penolakan dari aparat keamanan ketika ia bertugas di saat konflik terjadi. “Perempuan jangan disini”, begitu ia pernah dihardik aparat keamanan. Untuk peristiwa seperti itu, biasanya Adek langsung membalas: “Memang kenapa?! Sama-sama tugas kok”. Diskriminasi ini terjadi menurut Adek karena ia adalah jurnalis perempuan.

Terlahir di Bengkulu di tahun 1971, selepas kuliah di Universitas Jember, Adek kemudian menjadi jurnalis di Majalah Tiras di tahun 1997. Inilah cikal bakal ia menjadi seorang fotografer hingga sekarang. Setelah dari Majalah Tiras, Adek sempat bekerja di majalah Tajuk dan kemudian bergabung

sebagai fotografer AFP hingga kini. Adek Bery adalah salah satu contoh dari sedikit jurnalis foto di tanah air. Ia saat ini berkarir di Agence France Presse (AFP) untuk perwakilan Indonesia sejak tahun 2000. Di kantornya, sebagai karyawan tetap ia bekerja sama dengan tiga orang jurnalis perempuan dan satu orang jurnalis laki-laki. Adek pernah mengenyam



Dalam konteks yang luas, memang tidak ada diskriminasi yang terjadi padanya, namun tak jarang beberapa kali ia mendapatkan penolakan dari aparat keamanan ketika ia bertugas di saat konflik terjadi.

pendidikan jurnalistik selama enam bulan ketika pertama menjadi reporter pada Majalah Tiras. Sedangkan untuk pelatihan dengan perspektif gender, secara resmi memang belum pernah diikuti oleh Adek. Menurutnya isu gender harus banyak dipelajari oleh para jurnalis perempuan untuk mengembangkan kapasitas para jurnalis perempuan di media. Selain itu Adek juga tergabung dalam organisasi Pewarta Foto Indonesia (PFI).

Tentang jam kerja, Ade mengatakan kalau wartawan tidak ada jam pasti cuma untuk libur ada dua hari dalam seminggu. Kalau dalam satu hari rata-rata antara delapan sampai sepuluh jam tergantung kegiatan di lapangan. Terkadang ia langsung ke lapangan, tidak ke kantor. Dari lapangan ke kantor, mengedit foto, rapat apa yang akan diliput besok, dan menyerahkan hasil liputan. “Saya senang-senang saja, memang begitu jamnya wartawan”. Sementara untuk waktu istirahat Ade menuturkan, “Jamnya tidak tentu karena kita bukan pegawai Bank, mau istirahat seharian juga tidak apa-apa bila tidak ada acara peliputan, apalagi wartawan foto tidak tentu jamnya”. Sejauh ini Ade sangat menikmati pekerjaannya meski kegiatannya padat. Atas jerih payahnya, Ade beberap kali mendapatkan beberapa penghargaan di bidang fotografi.

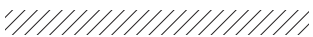
5. Donna Sita

(Jurnalis/ Direktur Produksi Majalah Wanita Indonesia)

DONNA Sita Indria saat ini bekerja sebagai Direktur Produksi di Tabloid Wanita Indonesia (WI), tabloid yang sudah cukup ternama di tanah air ini. Ia berkarir media ini sejak 1989, sejak ia menjadi reporter. Donna lahir di Padang Panjang, 22 April 1952. Sebelum ia bekerja di WI, Donna pernah bekerja menjadi jurnalis di Majalah Ideal, Dewi dan Sarinah. Ia memulai karirnya sebagai jurnalis di Majalah Ideal sejak tahun 1980. Di Wanita Indonesia, Donna merintis karirnya dari menjadi reporter hingga menjadi Pemimpin Redaksi. Saat ini di Wanita Indonesia, ia memegang posisi sebagai Direktur Produksi. Majalah Wanita Indonesia adalah majalah yang diterbitkan khusus untuk perempuan. Berbagai artikel ada disini, mulai dari prestasi perempuan, kasus-kasus dimana perempuan menjadi korban, hingga artikel seperti *fashion*, memasak, gaya hidup dan prestasi perempuan. Jumlah jurnalis perempuan yang bekerja di wanita Indonesia cukup dominan yaitu delapan orang, dibandingkan jurnalis laki-laki yang hanya dua orang. Ia pernah memegang berbagai pos liputan seperti *life style*, *human interest* hingga liputan wisata. Dengan pengalaman lebih dari 30 tahun di dunia jurnalistik yang sebagian besar membidik segmen perempuan, Donna sudah sering mengenyam pelatihan jurnalistik, walaupun dalam kurun waktu cukup lama tersebut ia belum pernah sekalipun mendapatkan pendidikan jurnalistik khusus dengan perspektif gender. Selama berkarir sebagai jurnalis ia pernah mendapatkan penghargaan atas karya jurnalistik yang pernah dibuat. Saat menjadi wartawan Majalah Sarinah, ia mendapat piala PWI Jaya pada Hadiah Penulisan Jurnalistik Adinegoro tahun 1987. Sebagai Pemimpin Redaksi Tabloid Wanita Indonesia, mengkoordinasi penulisan yang mendapat hadiah jurnalistik Adinegoro Utama, atas nama Khairul Pulungan di tahun 1992. Dari sisi organisasi profesi, Donna pernah bergabung dalam PWI selama menjadi jurnalis. Dalam

kesehariannya, kini Donna rata-rata bekerja delapan jam sehari namun bersifat fleksibel dengan jam istirahat resmi satu jam setiap hari. Masalah waktu kerja dan waktu istirahat ini, berlaku untuk semua karyawan.

Meski tidak lagi terlibat penuh dalam penulisan, aktivitas sehari-harinya kini difokuskan pada produksi, tabloid dan memeriksa beberapa data. Secara umum, ia merasa puas dengan kondisi pekerjaan yang menurutnya juga sebanding dengan gaji yang ia terima, ia pun menegaskan dalam soal gaji tidak ada perbedaan antara jurnalis laki-laki dan perempuan di medianya tempat ia bekerja. Semuanya dilihat dari besarnya tanggung jawab dan jabatan. Sebagai pekerja media yang mempunyai mobilitas tinggi, tunjangan transportasi sudah merupakan satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengusaha media. Di WI, menurut Donna, tunjangan ini sudah ada sejak WI berdiri, ia tidak merinci apakah tunjangan ini diberikan tergantung status karyawan (tetap atau kontrak). Selain itu,



Selama berkarir sebagai jurnalis ia pernah mendapatkan penghargaan atas karya jurnalistik yang pernah dibuat. Saat menjadi wartawan Majalah Sarinah, ia mendapat piala PWI Jaya pada Hadiah Penulisan Jurnalistik Adinegoro tahun 1987.

mengingat sifat pekerjaan jurnalis yang tidak mengenal waktu, WI memfasilitasi jurnalisnya untuk antar jemput dengan tugas di luar jam kerja normal (seperti malam atau dini hari). Selain itu paket tunjangan makan juga diberikan oleh WI kepada semua karyawannya. Donna menegaskan semua perlindungan tersebut, sama sekali tidak membedakan jenis kelamin. Cuti tahunan merupakan hal lumrah yang diberikan perusahaan kepada karyawannya, begitu juga WI.

Khusus untuk perempuan diberikan cuti melahirkan

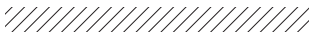
hingga tiga bulan dan cuti haid yang ternyata sudah umum di WI. Jika karyawan sudah bekerja minimal lima tahun, maka ia berhak mendapatkan cuti besar selama satu bulan. Selain hak cuti, semua karyawan di WI menurut Donna juga berhak mendapatkan pendidikan tambahan terkait dengan profesinya. Ia tidak menjelaskan secara rinci jenis pendidikan tersebut namun hal itu menurutnya sudah lumrah diberikan oleh perusahaan. Begitu pula halnya dengan jenjang karir untuk masuk ke jajaran pengambil keputusan di perusahaan. Semua hal tersebut didasarkan pada prestasi karyawan dan kesempatan yang sama baik kepada laki-laki maupun perempuan.

Walaupun WI merupakan media yang khusus untuk perempuan, namun ternyata fasilitas bagi karyawannya sebagai Ibu belum dipenuhi. Sebagai contoh, memberikan ASI di kantor belum merupakan hal umum karena memang tidak ada kesempatan untuk itu. Ruang menyusui dan penitipan anak pun belum tersedia karena isu tentang ruang menyusui dan cuti haid belum merupakan isu yang umum di manajemen.

6. Citra Dyah Prastuti (Editor KBR 68H)

CITRA Dyah Prastuti bekerja sebagai Jurnalis di KBR (Kantor Berita Radio) 68H di Jakarta sejak tahun 2002 sebagai editor. Sebagai jurnalis radio ia melakukan proses perbaikan pada narasi berita yang akan disampaikan di radio maupun portal berita yang dimiliki oleh radio ini. Sehari-harinya ia bekerja sama dengan 10 jurnalis perempuan dan 15 orang jurnalis laki-laki. Sebelum menjadi editor, Citra juga pernah memegang beberapa pos peliputan seperti Politik dan Keamanan. Ilmu jurnalisme didapatkan Citra sejak ia masih duduk di bangku kuliah S1 yang kemudian dilanjutkannya ketika ia mengambil S2 di Inggris dan dengan berbagai pelatihan sejak resmi menjadi jurnalis. Namun, hingga kini ia

belum pernah mengikuti pelatihan khusus tentang perspektif gender.



Di media tempatnya bekerja, Citra sering berkontribusi untuk menuliskan berbagai liputan investigasi tentang perempuan. Salah satu contohnya adalah tentang TKI.

Citra bekerja sekitar delapan jam bahkan bisa lebih dengan satu jam istirahat setiap hari. Rutinitas setiap hari yang ia kerjakan di kantor adalah mengedit berita dan juga mengikuti berbagai rapat perencanaan serta rapat evaluasi. Citra mengatakan, “Untuk rutinitas yang saya jalankan, saya hanya bisa bilang baik-baik saja karena pekerjaan saya tidak mengharuskan saya bekerja sampai malam hari”. Ritme pekerjaan disini sangat pas ia rasakan ketika ia harus membagi tugas dengan suaminya dalam mengurus satu anaknya. Tak ada masalah dalam soal pemberian gaji maupun tunjangan kesehatan di media tempat ia bekerja. Bahkan di media tempat ia bekerja sudah ada Serikat Pekerja untuk mengadopsi usulan dan persoalan yang dialami para jurnalis. Cuti tahunan diberikan dengan jumlah total 12 hari, sementara cuti hamil diberikan selama tiga bulan dan bagi laki-laki yang istrinya melahirkan diberikan cuti untuk mendampingi istrinya selama lima hari. Peraturan ini diterapkan sudah lama, sejak radio ini berdiri. Sementara itu, cuti haid sudah diterapkan sejak 2004. Hal ini mengacu pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disusun oleh anggota Serikat Pekerja di tempat ia bekerja. Citra mengusulkan, agar media secara umum cepat membangun ruang khusus untuk manajemen laktasi. Ini penting untuk memenuhi kebutuhan jurnalis perempuan yang sedang menyusui, begitu juga dengan ruang khusus untuk penitipan anak.

Di media tempatnya bekerja, Citra sering berkontribusi untuk menuliskan berbagai liputan investigasi tentang

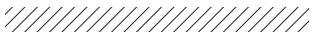
perempuan. Salah satu contohnya adalah tentang TKI. Tema-tema perempuan dan tema *human interest* merupakan sesuatu yang layak diperjuangkan melalui media. Bagi Citra, melakukan peliputan khusus tentang isu-isu ini sama menantanginya dengan isu lain. Namun sayang, Citra mengakui untuk narasumber perempuan hingga kini masih sering luput, seringnya banyak narasumber perempuan yang muncul di media hanya untuk topik dimana perempuan sebagai korban. Citra berharap akan semakin banyak narasumber perempuan yang berprestasi di bidangnya yang diliput di media. Untuk itu, Citra mengharapkan agar banyak narasumber perempuan bisa tampil agar para jurnalis bisa membidiknya.

7. Fira Basuki

(Pemimpin Redaksi Majalah Cosmopolitan)

NAMA Fira Basuki sejatinya tidak asing lagi bagi dunia penulisan populer di tanah air. Fira dikenal karena aktif menulis berbagai novel populer *best seller* serta artikel di berbagai media. Ia sendiri sebenarnya sudah lebih dari 16 tahun berkecimpung di media dimulai dari bekerja sebagai Kontributor Morning Sun di tahun 1994. Lalu di Majalah Dewi dan Harper's Bazaar Indonesia, kini Fira menduduki posisi Pemimpin Redaksi Majalah Cosmopolitan, sebuah majalah *franchise* dari Amerika Serikat yang membidik segmen perempuan dewasa dan mapan. Fira bekerja di majalah ini sejak 2007 setelah sebelumnya juga sempat menjadi Pemimpin Redaksi di Majalah Spice. Pilihannya pada dunia jurnalistik juga dipengaruhi oleh tempat ia sekolah dan menimba ilmu. Setelah lulus dari Sarjana S1 Antropologi Universitas Indonesia, ia kemudian melanjutkan ke Pittsburg State University di Amerika Serikat untuk mengambil jurusan Jurnalistik. Terakhir, Fira melanjutkan kuliahnya di S2 Public Relation Wichita State University Amerika Serikat dengan mengambil jurusan Public Relation.

Tak heran, jika Fira kemudian lebih banyak menjadi penulis dan kontributor beberapa media luar negeri. Di majalah Cosmpolitan saat ini, posisi Fira sebagai Pemimpin Redaksi. Ia membawahi 15 orang jurnalis perempuan dan delapan orang jurnalis laki-laki. Sebagai Pemred ia bertanggung jawab penuh dalam semua operasional redaksi.



**Di majalah
Cosmpolitan
saat ini, posisi
Fira sebagai
Pemimpin Redaksi.
Ia membawahi
15 orang jurnalis
perempuan dan
delapan orang
jurnalis laki-laki.
Sebagai Pemred ia
bertanggung jawab
penuh dalam semua
operasional redaksi.**

Walaupun belum pernah mendapatkan pendidikan jurnalis khusus dengan perspektif gender, Fira sangat paham dengan masalah perempuan mengingat segmen medianya memang perempuan. Waktu kerja Fira menurutnya sangat fleksibel, tergantung jadwal kegiatannya. Terkadang memang dari pagi sampai sore namun juga tidak jarang dari pagi hingga malam. Kepadatan jadwalnya ini dimulai saat sidang redaksi untuk persiapan penerbitan, mengecek isi majalah dan kegiatan kegiatan redaksional lainnya. Bagi jurnalis di medianya, sebenarnya tidak

ada patokan jam kantor yang baku, karena tergantung dari kegiatan liputan di lapangan, namun demikian mereka tetap diwajibkan untuk datang ke kantor setiap hari. Oleh karena itulah jam istirahat pun tidak ada standar baku. Sebagai Pemred, Fira mengaku cukup puas dengan gaji yang ia terima. Ia rutin mendapatkan gaji bulanan sejak awal bekerja di kantor ini. Selain itu Fira juga mendapatkan asuransi kesehatan dan Jamsostek seperti halnya perusahaan lain. Cosmpolitan juga melengkapi karyawannya dengan tunjangan transportasi dan tunjangan makan sejak awal mereka bekerja. Sedangkan tentang perlindungan kepada jurnalis misalnya untuk tugas malam, Fira mengatakan jika memang harus pulang larut

malam karena tugas, akan diantar oleh kendaraan kantor. Semua gaji dan tunjangan tersebut tidak memiliki perbedaan antara jurnalis laki-laki dan perempuan. Menurutnya, baik cuti tahunan, cuti melahirkan maupun cuti haid sudah ada di *Cosmopolitan*.

Namun sayangnya ruang menyusui dan tempat penitipan anak belum tersedia. Sejauh ini pun memang belum ada upaya untuk mengadakan fasilitas tersebut. Fasilitas pemberian pendidikan tambahan pun sangat diperhatikan oleh *Cosmopolitan*, ketentuan ini bahkan sudah diterapkan sejak lama. Begitu juga halnya dengan kesempatan untuk meningkatkan karir dan masuk dalam jenjang struktural manajemen. Semuanya tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Dari pengalamannya selama belasan tahun di dunia jurnalistik, Fira belum pernah mengalami diskriminasi ataupun pelecehan seksual. Menurutnya saat ini perempuan sudah dipandang sama dengan laki-laki. Secara pribadi, Fira mengatakan puas dengan medianya yang memang menyajikan berita tentang eksistensi wanita, begitu pun responden yang diwawancarai sebagian besar memang perempuan. Baginya ini merupakan bukti bahwa perempuan semakin diakui perannya. Apalagi di kantornya yang sebagian besar mempunyai awak perempuan, suara perempuan sangat didengar. Fira menambahkan, saat ini pemberitaan media di Indonesia terhadap perempuan sudah obyektif dan berimbang. *Cosmopolitan* mempunyai berbagai rubrik tentang perempuan dari berbagai sisi, mulai dari profil perempuan berprestasi hingga gaya hidup. Fira sendiri berupaya mendorong semakin banyak perempuan yang diliput oleh media, agar keberadaannya semakin dilihat dunia luas tidak kalah dengan laki-laki, tentu saja dalam konteks yang proporsional. Dorongan seperti ini tidak hanya dilakukan Fira melalui medianya, tetapi juga dalam novel-novelnya.

8. Linda Tangdiala (Pemimpin Redaksi Kabar 24 Bisnis Indonesia)

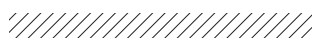
SEBELUM menjadi pemimpin Redaksi di kabar 24, sebuah situs bisnis milik Harian Bisnis Indonesia pada awal tahun 2012, Linda Tangdiala berkarir sejak 1987 di Harian Bisnis Indonesia. Awalnya ia adalah seorang reporter biasa hingga ia berada di posisi Wakil Pemimpin redaksi. Ketika masih di Bisnis Indonesia Sehari-harinya Linda membawahi sekitar 90 jurnalis dimana 30 orang diantaranya adalah jurnalis perempuan.

Selama ini Linda sudah berpindah-pindah pos peliputan, dari menulis sekaligus bertanggungjawab di Halaman Kota, Internasional, Ekonomi hingga *Life Style*. Linda sendiri sudah memperoleh pendidikan jurnalisme sejak ia masih menyandang status mahasiswa dan beberapa pelatihan lain setelah ia benar-benar menjadi jurnalis. Ia juga pernah memperoleh pelatihan jurnalistik berperspektif gender yang diadakan oleh Komnas Perempuan selama dua hari beberapa waktu lalu. Linda juga pernah aktif di PWI, meskipun karena kesibukan sekarang ia sudah tak punya waktu lagi.

Setiap hari, Linda bekerja hingga sepuluh jam di kantor, mulai dari rapat, mengecek laporan jurnalis, memeriksa data hingga melakukan *setting* koran untuk naik cetak. Ia puas dengan tingkat kesibukan yang hampir tidak mengenal waktu tersebut. Ia menyadari konsekuensi bekerja di media memang membutuhkan komitmen tinggi untuk bekerja di luar jam kerja normal seperti pekerja kantor lainnya. Jam istirahat di Bisnis Indonesia dikatakan oleh Linda sangat fleksibel, jika di kantor rata-rata diberikan waktu satu jam untuk beristirahat. Masalah pembagian tugas, jam kerja dan waktu istirahat, katanya tidak ada perbedaan antara jurnalis laki-laki dan perempuan, semua berdasarkan tanggung jawab dan jabatan. Setiap bulan, Linda menerima gaji rutin yang cukup. Baginya ini sebanding dengan

jam kerja dan kontribusi yang ia berikan. Ia juga menerima asuransi kesehatan dan jamsostek. Selain itu ia menerima pula tunjangan transportasi, dimana jumlah tunjangan ini berbeda untuk setiap karyawan tergantung dari jabatannya. Sementara uang makan yang ia terima sama dengan karyawan lainnya. Jurnalis Bisnis Indonesia juga mendapatkan tunjangan atau fasilitas pada saat harus berdinas di malam hari. Linda sendiri mendapatkan tunjangan mobil pribadi. Linda menegaskan semua perlindungan tersebut, sama sekali tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki. Cuti tahunan selama 12 hari sudah merupakan hal yang umum di dunia kerja yang diberikan setelah karyawan yang bersangkutan bekerja satu tahun. Begitu juga dengan halnya cuti melahirkan selama tiga bulan bagi perempuan.

Di Bisnis Indonesia kaum laki-laki bahkan diberikan cuti khusus tiga hari untuk mendampingi istrinya yang akan melahirkan. Sementara untuk cuti haid, Linda menjawab dengan kurang meyakinkan: “Seharusnya sih, ada, tapi mungkin kurang disosialisasikan ya”, katanya.



**Ia menyadari
konsekuensi bekerja
di media memang
membutuhkan
komitmen tinggi
untuk bekerja di luar
jam kerja normal
seperti pekerja
kantoran lainnya.**

Sebagai jurnalis yang bekerja tak mengenal waktu, Linda tetap *concern* terhadap tanggung jawab ibu bagi anak. Misalnya untuk kesempatan memberikan ASI. Linda mengaku cukup prihatin banyak ibu-ibu yang memeras ASI di toilet kantor yang jelas tidak steril. Jika ruang khusus manajemen laktasi saja susah apalagi ruang untuk menyusui tentu tidak ada. Linda juga melihat tempat penitipan anak

cukup penting, setidaknya dalam satu manajemen gedung, meskipun dilakukan sistem sewa bagi karyawan dari kantor

lain. Ia berharap manajemen peduli terhadap masalah ini. Linda pun pernah mengajukan usulan ini kepada pihak-pihak tersebut meskipun hingga kini belum mendapat jawaban yang positif. Untuk itu, Linda akan terus memperjuangkan hal tersebut bersama teman-temannya. Sebagai awal media bisnis, Linda sudah cukup puas dengan gambaran tentang perempuan di medianya. Ia sering mengangkat sosok perempuan sukses atau berpengaruh di dunia bisnis. Namun sayangnya dari segi kuantitas narasumber, ia belum puas karena jumlah narasumber perempuan masih sedikit dibandingkan narasumber laki-laki. Ia juga merasa sebenarnya masih banyak isu perempuan yang bisa diangkat, namun melihat segmentasi medianya, memang belum memungkinkan semua isu tersebut direpresentasikan saat ini. Linda dan timnya sendiri berusaha dapat menampilkan sosok atau profil pengusaha perempuan yang dapat menjadi acuan pengusaha lain minimal satu kali dalam seminggu. Beberapa tulisan tentang perempuan pernah ditulis Linda. Karena media tempat ia bekerja adalah media bisnis, maka tulisannya selalu terkait dengan isu ekonomi.

Linda pernah melahirkan tulisan panjang tentang pelecehan seksual terhadap buruh migran perempuan. Ia selalu mengingatkan agar liputan seperti ini selalu dituliskan, bukan saja dari angka-angka ekonomi, namun dari sisi kemanusiaan.

9. Evi Mariani

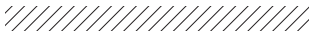
(Kepala Desk Nasional The Jakarta Post)

AKTIF di pers mahasiswa, merupakan pilihan Evi Mariani ketika ia menjadi mahasiswa di UGM Yogyakarta dulu. Dalam pendapatnya, jurnalisme adalah sebuah ilmu yang harus ditekuni dan secara terus menerus digeluti. Jurnalisme adalah salah satu wahana baru untuk melihat dunia secara lebih lebar. Menjadi jurnalis akhirnya menjadi pilihan bagi Evi. Tempaan di dunia pers mahasiswa membuatnya tak mudah berpaling

dari dunia jurnalistik. Berbekal keinginan menjadi jurnalis, akhirnya Evi langsung diterima sebagai reporter di The Jakarta Post sejak tahun 2002 selepas kuliah. Evi tak hanya mendalami isu-isu politik, namun juga isu-isu sosial perkotaan. Baginya, isu sosial perkotaan merupakan sesuatu yang nyata. Problem nyata masyarakat yang tinggal di kota Jakarta. Tak hanya menuliskan tentang isu ini, Evi pun kemudian mendapatkan beasiswa untuk kuliah S2 tentang Urban Studies di Universtaet Van Amsterdam di Belanda. Baginya, pendidikan ini membuatnya untuk mengasah soal kepekaannya pada isu-isu sosial dan lingkungan hidup. Tak hanya itu, ia juga berusaha memperjuangkan isu-isu gender dan hak pekerja di medianya ini.

Pemberian cuti di Harian The Jakarta Post tempat ia bekerja menurut Evi Mariani, sama seperti perusahaan lain dimana yang pasti ada cuti tahunan selama 12 hari yang diberikan ke semua karyawan (baik tetap maupun kontrak) dan cuti melahirkan selama tiga bulan untuk karyawan perempuan. Sementara untuk cuti haid, sebenarnya ada, tetapi jarang ada yang mengambil. Evi sendiri juga jarang menggunakan fasilitas ini. Ia menyayangkan ada beberapa rekan kerjanya yang jurnalis perempuan yang sering memanfaatkan cuti haid untuk tidak masuk kerja, padahal kondisinya tidak begitu parah. Menurutny ini wajar digunakan jika memang kondisi haidnya berat. Tentang manajemen laktasi, hal ini sempat menjadi isu bagi karyawan perempuan di Jakarta Post. Akhirnya setelah diperjuangkan, manajemen memberikan sebuah ruang untuk menyusui di lantai tiga, sayangnya semua karyawan bekerja di lantai dua. Akibatnya ruang tersebut juga jarang digunakan, karena menurut mereka repot untuk naik turun tangga. Sedangkan untuk fasilitas penitipan anak, sampai sekarang memang belum perlu. Beberapa kondisi memang membuat karyawan sering membawa anaknya ke kantor. Ini berlaku tidak hanya untuk karyawan perempuan, tetapi juga beberapa karyawan laki-laki. Umumnya karyawan

yang membawa anaknya bekerja terjadi pada waktu kerja akhir pekan yakni hari Sabtu. Tapi biasanya anak yang dibawa pun sudah cukup besar sehingga bisa dilepas bermain sendiri. Fasilitas ini sempat diperjuangkan, namun sepertinya untuk balita yang masih membutuhkan pengawasan, kantor juga perlu menyediakan pengasuh dan itu membuat manajemen keberatan.



Ia pernah mengalami diskriminasi ras, mengingat Evi berdarah Tionghoa (China). Soal pelecehan seksual Evi memang tidak pernah mengalaminya, namun ia pernah menemui beberapa narasumber polisi yang kurang ramah dan menyepelkan perempuan.

Selain cuti dan fasilitas yang sudah disebutkan di atas, Jakarta Post juga mendirikan Training Center yang mengelola semua pelatihan dan semua pendidikan tambahan bagi karyawannya. Pada dasarnya semua berhak mendapatkan pendidikan tambahan sejak ia masuk, bahkan jika berprestasi bagus, karyawan yang bersangkutan (yang sudah bekerja diatas tiga tahun) sangat didukung untuk disekolahkan ke luar. Untuk itu, ia tetap mendapatkan gaji pokok dengan ikatan dinas selama waktu tertentu. Selain pendidikan, kesempatan untuk menduduki posisi jenjang struktural juga

sangat terbuka di Jakarta Post baik untuk laki-laki maupun perempuan dengan peluang yang sama tergantung dari prestasinya. Sekarang saja di bawah Pemimpin Redaksi ada dua orang perempuan dan satu orang laki-laki. Selama berkarir sebagai jurnalis, Evi tidak pernah merasakan diskriminasi. Ia pernah bertugas di Polda selama satu tahun, ia mendapatkan perlakuan yang sama seperti halnya jurnalis lain. Namun ia pernah mengalami diskriminasi ras, mengingat Evi berdarah Tionghoa (China). Soal pelecehan seksual Evi memang tidak

pernah mengalaminya, namun ia pernah menemui beberapa narasumber polisi yang kurang ramah dan menyepelekan perempuan.

Sedangkan untuk topik tentang perempuan, Evi mengakui terkadang masih ada friksi antara editor laki-laki dan perempuan. Sebagai contoh pada kasus operasi payudara Malinda Dee, menurut editor perempuan itu bukan topik yang menarik lagi, namun buat kaum laki-laki masih cukup menarik untuk diangkat. Meski demikian, menurut Evi, Jakarta Post berusaha mengangkat isu gender dengan obyektif dan memberi ruang yang cukup baik untuk itu. Di mediana, dengan komposisi jurnalis perempuan lebih banyak dari laki-laki, Evi merasa suara perempuan sangat didengar oleh manajemen, berbeda dengan 15 tahun lalu dimana posisi manajemen didominasi oleh laki-laki. Namun, ia berpikir untuk posisi eksekutif yang baru diduduki oleh dua orang perempuan, masih harus ditambah jumlahnya, agar friksi seperti contoh di atas lebih berimbang dalam suara. Contoh lain masalah artikel tentang ASI eksklusif, jika di jajaran pengambil keputusan itu laki-laki semua, mereka tidak terlalu menganggap hal itu penting, akan tetapi jika di situ ada perempuannya tentunya akan lain. Setidaknya mendapat tempat di pemberitaan walaupun kecil yang nantinya akan melahirkan isu-isu baru.

Evi juga dia mengakui dari sisi pemberitaan narasumber perempuan masih minim. “Untuk sekarang ini belum, untuk isu politik dan korupsi memang lebih dominan laki-laki di banding perempuan. Akan tetapi ada juga beberapa narasumber untuk masalah politik dari perempuan seperti Siti Zuhro (Peneliti LIPI) walau tidak sebanyak kaum laki”, ungkap Evi.

Evi sungguh-sungguh memperjuangkan isu-isu tentang perempuan dalam redaksi. Ia berharap media ini bisa membela yang lemah. Sekarang ini memang perempuan sudah kuat tapi dalam hal tertentu perempuan masih lemah. Media selayaknya

tidak hanya mengejar skandal untuk menaikkan oplah, tetapi harus juga mendengar yang lemah yang suaranya jarang terdengar atau terangkat. Beberapa tulisan panjang pernah dituliskan Evi, yaitu tulisan tentang kekerasan terhadap perempuan, lingkungan dan perempuan serta kondisi perempuan di daerah yang kesulitan air bersih.

10. Neni Ridarineni

(Wartawan Senior Republika, Yogyakarta)

MENJADI Reporter adalah cita-cita Neni sejak dulu. Dari dunia jurnalistik inilah kemudian ia menjadi terbuka pada banyak hal. Posisi sebagai redaktur tak diincarnya, karena ia menyatakan sangat enjoy menjadi reporter. Profesi sebagai reporter pencari berita ini sudah ditekuninya sejak 19 tahun lalu. Neni adalah jurnalis Republika yang bekerja di kantor perwakilan Yogyakarta. Ia melakoni profesi ini sejak tahun 1993. Di kantor perwakilan yang bertanggungjawab untuk daerah Yogyakarta dan Jawa Tengah, Neni bekerja dengan satu orang jurnalis perempuan dan empat orang jurnalis laki-laki.

Pendidikan jurnalis sempat diperoleh Neni melalui pelatihan dari kantornya. Sayangnya menurut Neni, pelatihan lebih banyak diberikan kepada jurnalis di kantor pusat Republika di Jakarta. Neni juga sudah tiga kali mengikuti pelatihan jurnalistik dengan perspektif gender, dua kali di Jakarta dan satu kali di Yogyakarta. Seingatnya pelatihan tersebut dilaksanakan oleh LP3Y (Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerbitan Yogyakarta), Population Council, BKKBN (Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Neni pun pernah aktif di organisasi, yaitu di PWI (1999-2007), namun sekarang

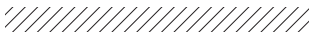
tidak lagi. Dulu menurutnya, jika tidak ikut organisasi agak sedikit mendapat perlakuan yang berbeda dalam profesi ini, namun sekarang pembedaan perlakuan ini sudah tidak ada lagi.

Selama karirnya yang sudah mencapai 19 tahun ini, Neni pernah mendapatkan penghargaan dari Menteri kesehatan RI tahun 2002, 2004 dan 2005 untuk tulisan mengenai pelayanan kesehatan dan dari Iwapi Yogya mengenai kualitas hidup perempuan dan dari Population Council tahun 2000 mengenai kesehatan reproduksi. Neni sangat menikmati profesinya ini, sehingga dia tidak mempermasalahakan tentang jenjang karir seperti menjadi Redaktur. Ia mengungkapkan bahwa menjadi reporter lebih enjoy, dan semakin senior, reputasinya semakin diperhitungkan oleh narasumbernya.

Dengan jam kerja yang bebas dan diatur sendiri Neni bisa menjalankan tugasnya hingga sore bahkan hingga larut malam. Terkadang dalam akhir pekan pun ia harus masuk kantor menyelesaikan tugas. Namun disisi lain, jika sedang tidak sibuk, Neni mempunyai waktu yang banyak untuk keluarganya.

Republika juga melengkapi jurnalisnya dengan asuransi kesehatan dan Jamsostek. Ada pula tunjangan pendidikan untuk anak yang diberikan tiga bulan sekali. Neni menjelaskan secara umum tidak ada perbedaan antara gaji dan tunjangan yang diperoleh jurnalis perempuan dan laki-laki, namun jurnalis perempuan tidak mendapatkan tunjangan untuk suaminya. Jurnalis perempuan umumnya hanya memperoleh asuransi untuknya secara personal dan untuk anaknya saja. Sebaliknya jurnalis laki-laki, dapat menyertakan istrinya dalam tunjangan kantor. Bersama teman-temannya, ia pernah memperjuangkan tunjangan pendidikan untuk anak.

Akhirnya perjuangan ini berhasil dan para jurnalis mendapatkan dana tunjangan untuk anaknya. Sebagai perempuan yang sedang menyusui ketika itu, Neni juga pernah mempunyai pengalaman melakukan manajemen laktasi di kantor. Ketika masih di kantor pusat Jakarta, Neni menyewa kontrakan yang dekat dari kantor, sehingga memudahkannya ketika harus



Selama karirnya yang sudah mencapai 19 tahun ini, Neni pernah mendapatkan penghargaan dari Menteri kesehatan RI tahun 2002, 2004 dan 2005 untuk tulisan mengenai pelayanan kesehatan dan dari Iwapi Yogya mengenai kualitas hidup perempuan dan dari Population Council tahun 2000 mengenai kesehatan reproduksi.

memerah ASI. Hingga kini baik ruang menyusui maupun tempat penitipan anak memang belum tersedia di kantornya (terutama kantor Yogya). Karena belum ada ruang khusus, Neni dan teman-temannya “mengakali” dengan mengatur jam kerja, seperti pulang ke rumah pada saat waktu memerah ASI atau menyusui.

Berkarir lebih dari 15 tahun sebagai reporter di Republika, membuat Neni makin memahami lapangan. Ia pernah bertugas di berbagai liputan dari bencana banjir hingga pertandingan bola. Neni sangat bersyukur semua itu bisa dilewati tanpa merasakan diskriminasi apalagi pelecehan seksual. Di tempatnya bekerja hampir tidak ada perbedaan jenis liputan bagi jurnalis laki-

laki maupun perempuan, semua harus siap jika dibutuhkan. Neni mengungkapkan satu pengalamannya meliput di Pasar Kembang, Yogyakarta, dimana memang awalnya sempat dipandang sebelah mata oleh orang, namun ketika mengetahui dirinya wartawan semua menjadi baik-baik saja. Sempat juga

ia merasa was-was ketika terjadi kerusuhan Mei 1998, Namun ia memaklumi karena kondisi saat itu memang rawan wajar jika terjadi kekerasan. Saat ini jika harus meliput hingga malam hari, ia meminta supir kantor minimal untuk menemani.

11. Rika Suartiningasih

(Koordinator Jurnalis Radio KIS FM Medan)

MENDAPATKAN cuti melahirkan yang hanya 40 hari membuat para jurnalis perempuan sesama teman kerja Rika Suartiningasih, harus berbuat sesuatu. Karena seharusnya perempuan mendapatkan cuti melahirkan selama tiga bulan. Namun perjuangan ini belum menampakkan hasil. Masalah asuransi juga merupakan persoalan lain yang tengah ia perjuangkan bersama teman-teman jurnalisnya.

Bekerja sebagai jurnalis, memang merupakan pekerjaan yang diimpikan oleh Rika. Pekerjaan ini sesuai dengan ilmu jurnalistik yang ia ambil di masa kuliah. Ia berkarir di bidang ini sejak 1996 di beberapa media cetak hingga akhirnya berlabuh di Radio Kis FM Medan sejak 1998. Saat ini ia sudah berstatus karyawan tetap dengan jabatan Koordinator Jurnalis. Ia mensupervisi empat orang jurnalis perempuan dan dua orang jurnalis laki-laki. Sebagai koordinator jurnalis ia bertanggung jawab dalam berbagai liputan sebagai contohnya masalah hukum (kepolisian dan pengadilan, agama serta pendidikan).

Selain pelatihan jurnalisisme secara umum, Rika juga sering mengikuti pelatihan jurnalisisme dengan perspekti gender yang diadakan oleh beberapa LSM, biasanya selama 1-3 hari. Saat inipun Rika juga aktif di AJI Medan. Jabatan terakhirnya, sebagai ketua AJI Medan.

Bagi Rika pekerjaannya cukup menyenangkan karena waktunya sangat fleksibel. Setiap hari ia bersama para

//////
**Mendapatkan
 cuti melahirkan
 yang hanya 40
 hari membuat
 para jurnalis
 perempuan sesama
 teman kerja Rika
 Suartiningsih, harus
 berbuat sesuatu.
 Karena seharusnya
 perempuan
 mendapatkan
 cuti melahirkan
 selama tiga bulan.
 Namun perjuangan
 ini belum
 menampakkan hasil.**

jurnalis mencari berita dengan terjun langsung ke lapangan dan kemudian dianalisis mana yang layak disiarkan di radionya. Selain menyiapkan naskah ia juga mengecek beberapa data. Ia mengatakan belum puas dengan gaji yang diperolehnya, karena pada dasarnya tidak sebanding dengan peningkatan harga berbagai kebutuhan. Sementara itu untuk asuransi, di KIS FM memang tidak ada asuransi jiwa dan kesehatan namun jika karyawan sakit, biaya pengobatannya bisa diklaim hingga batas maksimal Rp 5 juta per tahun termasuk di dalamnya biaya pengobatan istri dan anak walaupun bagi istri dan anak, hanya diganti sebesar 50%

dari jumlah klaim. Sebagai catatan; karyawan perempuan (istri) tidak dapat menanggung suaminya.

Uang transportasi sudah diberikan oleh KIS FM, namun yang sifatnya tambahan terkait dengan perlindungan misalnya karena bekerja di luar jam kerja normal, hingga saat ini memang belum ada. Uang makan juga belum ada, namun ini sering dimasukkan dalam klaim lembur oleh karyawan KIS FM Medan. Semua poin di atas tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Sementara itu, walaupun belum mempunyai ruang khusus untuk menyusui, KIS FM selama ini memberi kesempatan kepada karyawannya untuk memberikan ASI kepada bayinya di kantor. Ruang penitipan anak juga belum ada, namun semua kondisi ini masih dapat dimaklumi oleh karyawannya. Bagi Rika, dengan adanya ruang penitipan anak dapat membuat biaya juga

semakin meningkat karena berarti harus ada *baby sitter* yang menunggu anak-anak.

Lepas dari cuti dan fasilitas di atas, karyawan KIS FM juga kerap mendapatkan pendidikan tambahan namun inisiatifnya berdasarkan undangan dari pihak luar seperti LSM. Bagi Rika ini bukan sebuah masalah, mengingat sebelum bekerja mereka sudah lebih dulu mendapatkan training. Sementara itu, kesempatan untuk masuk ke jenjang pengambil keputusan juga terbuka bagi karyawan KIS, namun semuanya pasti disesuaikan dengan prestasi kerja. Sebagai jurnalis perempuan, Rika merasa cukup puas atas gambaran perempuan di medianya, karena fungsi dan kedudukannya tidak dibedakan dengan jurnalis laki-laki. Masalah pemberitaan dan narasumber perempuan sudah sering diangkat oleh KIS FM, walaupun memang tidak mudah menampilkan sosok perempuan melalui siaran radio, karena informasinya harus sangat lengkap, beda dengan media cetak yang bisa menghadirkan foto. Walaupun KIS FM tidak secara khusus membidik segmen perempuan, namun Rika dan tim-nya selalu mencoba mengangkat perempuan terutama pada kejadian atau peringatan khusus seperti Hari Kartini dan Hari Ibu.

12. Sunarti Sain

(Redaktur Harian Fajar, Makassar)

SUNARTI Sain sudah berkarir di Harian Fajar, Makassar sejak 1996, sebagai Reporter. Kini ia sudah menjabat sebagai Redaktur di Harian itu. Dengan status sebagai karyawan tetap, sehari-harinya Sunarti bekerja sama dengan 40 orang jurnalis laki-laki dan 12 orang jurnalis perempuan. Dalam sehari, rata-rata ia bekerja selama delapan jam mulai dari rapat redaksi melakukan editing dan memeriksa berbagai macam data untuk publikasi. Sementara itu untuk jam istirahat yang diberikan oleh kantornya tidak ada ketentuan khusus, karena jam kerja

jurnalis yang berbeda dengan jam kerja normal. Di Harian Fajar juga ada waktu piket yang dilakukan secara bergiliran, dimana jurnalis laki-laki wajib hingga jam 12 malam sementara perempuan hanya hingga jam 10 malam.

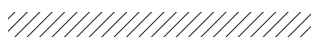
Menurut Sunarti ia pernah mendapatkan pendidikan jurnalistik secara umum serta jurnalistik dengan perspektif gender seperti dari FPMP selama dua minggu dan dari AJI selama tiga hari. Bahkan ia pernah menjadi pelatih dalam pelatihan perspektif gender. Hingga kinipun Sunarti masih tercatat sebagai salah satu anggota dari AJI Makassar.

Kiprah Sunarti juga dimantapkan dengan keberhasilannya menjuarai beberapa lomba tulisan jurnalistik seperti juara 2 lomba penulisan ekonomi syariah, juara 2 penulisan tentang telkomsel dan juara 2 penulisan tentang perspektif yang diadakan sebuah lembaga di Makassar.

Ia dan beberapa kawan di kantornya akan terus memperjuangkan soal kenaikan gaji. Selain gaji setiap bulannya jurnalis yang sudah berstatus karyawan tetap mendapatkan tunjangan transportasi dan voucher makan siang dua kali dalam sehari yang diberikan sejak awal mereka bekerja di ke Harian Fajar. Sementara itu, menurut Sunarti media tempatnya bekerja belum memberikan fasilitas atau tunjangan untuk mengantar pulang ketika berdinis di malam hari. Poin ini sudah pernah diperjuangkan, tetapi belum terealisasi. Baik gaji maupun tunjangan di atas tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin perempuan maupun laki-laki. Kesempatan memberikan ASI, ruang penitipan anak dan sejenisnya hingga kini belum ada di Harian Fajar. Meski sebagian besar karyawan menginginkan itu dan pernah diperjuangkan, namun hingga kini hasilnya belum nampak. Sebagai perempuan di media, Sunarti merasa belum puas atas isu tentang perempuan di medianya. Menurutnya kaum laki-laki banyak yang kurang *concern* terhadap masalah perempuan karena mereka umumnya menganggap masalah

perempuan harus diselesaikan sendiri oleh perempuan.

Namun adakalanya isu tentang perempuan memerlukan keterlibatan kedua belah pihak, baik laki-laki dan perempuan. Ia menambahkan, secara kuantitas isu perempuan yang diangkat Harian Fajar juga masih kurang, belum lagi masalah perempuan sering hanya ditampilkan di halaman belakang yang membuatnya berkesan *stereotype*.



Sunarti juga berharap lebih banyak lagi perempuan yang terjun di dunia jurnalis sehingga bisa membantu mengangkat masalah-masalah perempuan.

Walau begitu, Sunarti cukup puas terhadap kehadiran narasumber perempuan di medianya, karena dari mereka sering didapatkan pemikiran-pemikiran baru dari sudut pandang perempuan yang pasti lebih mewakili perempuan. Sunarti juga menyayangkan, dalam manajemen Harian Fajar, dengan jumlah karyawan perempuan yang jauh dibawah laki-laki, banyak suara perempuan

yang belum terwakili.

Secara pribadi, Sunarti mencoba mengangkat masalah perempuan misal dengan menulis profil politikus perempuan dan contoh perempuan sukses di berbagai bidang yang diharapkan bisa menginspirasi pembaca perempuan. Sunarti juga berharap lebih banyak lagi perempuan yang terjun di dunia jurnalis sehingga bisa membantu mengangkat masalah-masalah perempuan.

13. Nunung Rusmiaty

(Pemimpin Redaksi Majalah Honai, Jayapura)

BEKERJA di media baru di Jayapura, membuat Nunung harus melakukan berbagai persiapan sekaligus pembenahan. Namun posisinya sebagai pemimpin redaksi membuatnya lebih leluasa dalam mengatur manajemen yang ia pimpin. Honai sendiri merupakan majalah baru di Jayapura. Perusahaan ini didirikan oleh beberapa orang yang berpengalaman di bidang media baik dari sisi jurnalistik maupun marketing media. Total kini Nunung membawahi lima orang di redaksi.

Nunung adalah salah satu sosok jurnalis perempuan yang cukup eksis di Jayapura. Ia sudah mendalami profesi ini sejak 1987 berawal dari seorang penulis *freelance* hingga kini menjadi Pemimpin Redaksi Majalah Honai. Walaupun belum pernah mendapatkan pelatihan jurnalistik secara umum maupun yang berperspektif gender, Nunung adalah salah satu jurnalis daerah yang patut diperhitungkan. Salah satu buktinya adalah

////////////////////

Bekerja di media baru di Jayapura, membuat Nunung harus melakukan berbagai persiapan sekaligus pembenahan. Namun posisinya sebagai pemimpin redaksi membuatnya lebih leluasa dalam mengatur manajemen yang ia pimpin.

pada tahun 2008 ia menerima penghargaan dari Telkomsel untuk salah satu tulisannya. Nunung juga sejak lama aktif di organisasi jurnalistik. Pada 1990-1996 ia aktif di PWI Bandung dan kemudian pernah aktif di AJI Jayapura.

Nunung melakukan aktivitasnya sebagian besar dari pukul 08.30 hingga pukul 17.00. Namun jam tersebut tidak mutlak bisa saja mengikuti pola aturan tersebut, sebagaimana sifat pekerjaan jurnalis pada umumnya. Aktivitas Nunung

sebagai pemimpin redaksi yaitu meliputi pengecekan data, laporan hingga melakukan penulisan berita.

Sebagai media baru, gaji dan tunjangan yang diterima Nunung dan rekan-rekannya bisa dibilang masih minim. Apalagi kantornya belum mempunyai program asuransi maupun Jamsostek bagi karyawannya. Sejauh ini yang mereka dapatkan baru terbatas tunjangan uang makan dan uang transportasi. Sementara untuk tunjangan menyangkut perlindungan karyawan juga belum ada. Kondisi ini masih terus diramu dan diperjuangkan oleh Nunung dan teman-temannya. Di media barunya ini Nunung berupaya mengangkat isu perempuan. Bahkan kini Majalah Honai sudah punya rubrik khusus untuk perempuan yang bernama Rubrik Emansipasi. Rubrik ini saat ini berisi tentang kiprah para perempuan, seperti memuat tentang perempuan yang berhasil dibidang politik, ekonomi dan sebagainya, juga para aktivis perempuan. Di rubrik lain seperti Rubrik Dorang Bicara, Nunung menyatakan, setidaknya harus ada perwakilan dari perempuan yang mengemukakan pendapatnya.

14. Meladina Sari

(Redaktur Akcaya Pontianak Post)

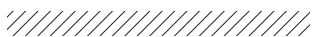
MENJADI satu-satunya redaktur perempuan di Akcaya Pontianak Post, membuat Meladina kemudian dipercaya mengelola rubrik perempuan “For Her”. Melalui rubrik ini, ia dan beberapa jurnalis perempuan lainnya kemudian mengangkat berbagai hal tentang perempuan dan permasalahannya. Dalam *For Her*, ia memasukkan isu-isu perempuan yang dikupas dengan dalam, seperti perempuan-perempuan yang teraniaya, KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) serta profil aktivitas atau tokoh-tokoh perempuan yang eksis baik di parlemen maupun di dunia bisnis.

Meladina sudah bekerja di Akcaya Pontianak Post (AP Post) sejak 1999. Ia merintis karir sebagai jurnalis junior dan kini sudah duduk di deretan Redaktur AP Post. AP Post adalah surat kabar yang cukup besar di Pontianak. Saat ini mereka mempunyai 15 orang jurnalis laki-laki dan empat orang jurnalis perempuan. Meladina sendiri memegang pos peliputan kriminal, pemerintahan kota dan ekonomi.

Untuk menunjang pekerjaannya, ia pernah mengikuti beberapa pendidikan jurnalistik bahkan jurnalistik dengan perspektif gender. Khusus yang terakhir diadakan oleh Dewan Pers selama dua hari dan oleh Jurnalis Perempuan selama setengah hari. Ia juga aktif di organisasi jurnalis seperti AJI dan IPPM (Ikatan Perempuan Pelaku Media). Meladina bekerja rata-rata 12 jam per hari. Mulai dari rapat dengan redaksi, jurnalis, mengedit berita hingga memastikan setting berita. Ia menggunakan waktu 2-3 jam untuk beristirahat yang fleksibel menyesuaikan dengan pekerjaannya.

Karena ketekunannya, Meladina pernah mendapatkan beberapa penghargaan diantaranya; juara 1 Penulisan HIV/AIDS oleh BKKBN Kalbar tentang penyeludupan bayi di Serawak dan juara 2 penulisan Telkomsel untuk area Papua Maluku Sulawesi Kalimantan.

Gaji rutin yang diterima Meladina masih dilengkapi dengan askes dan jamsostek, AP Post juga melengkapi karyawannya dengan tunjangan transportasi dalam kota, sedangkan untuk liputan luar kota sifatnya klaim. AP Post juga memfasilitasi jurnalisnya dengan uang makan yang diberikan sejak awal bekerja. Sementara itu, berbicara tentang tunjangan untuk perlindungan seperti penjemputan pada dinas malam, Meladina mengatakan, hal tersebut tidak ada di AP Post, baginya pekerjaan sebagai jurnalis memang menanggung resiko dan itu adalah konsekuensi pekerjaan. Namun sejujurnya ia mengakui, masalah perlindungan ini perlu mendapat perhatian



Menjadi satu-satunya redaktur perempuan di Akcaya Pontianak Post, membuat Meladina kemudian dipercaya mengelola rubrik perempuan "For Her". Melalui rubrik ini, ia dan beberapa jurnalis perempuan lainnya kemudian mengangkat berbagai hal tentang perempuan dan permasalahannya.

ekstra dari manajemen media. Begitu pula halnya dengan ruang penitipan anak, saat ini belum diperlukan mengingat pada saat bekerja semua karyawan tidak ada yang membawa anak. Semua fasilitas yang ada itu, menurut Meladina tidak pernah diperjuangkan karena memang belum dibutuhkan. Kesempatan untuk memperoleh pendidikan jurnalistik di media tempatnya sangat tinggi.

Namun meladina menyatakan, sejumlah jurnalis perempuan kadang memberikan kesempatan ini pada laki-laki jurnalis karena kesibukan mereka yang juga harus mengelola persoalan domestik. Walaupun menyayangkan, namun kadang ia tak bisa berbuat sesuatu

karena itu ketentuan antara laki-laki dan perempuan dalam relasi rumah tangga mereka.

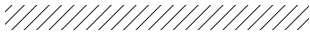
15. Heti P Yunani

(Redaktur harian Radar Surabaya)

BAGI Heti melakukan peliputan tentang *life style* merupakan sesuatu yang paling disukainya. Entah apa sebabnya, jika meliput *life style*, pasti Heti langsung mengingat tentang perempuan. Karena menurut Heti, selama ini di media, perempuan masih identik dengan *life style*. Jadi liputan tentang perempuanpun masih identik dengan gaya hidup seperti pakaian baru, makanan, dan sebagainya.

Namun untuk liputan persoalan-persoalan perempuan, seperti perempuan TKI, korban KDRT atau isu-isu perempuan lainnya, Heti justru jarang melakukannya.

Heti mengawali karir jurnalistiknya dalam usia yang sangat muda, 19 tahun sebagai reporter di Surabaya Post dan ia bertahan di media tersebut selama tujuh tahun (1995-2002). Sejak 2003 Heti sudah menempati posisi Redaktur di Harian Radar Surabaya. Dalam kesehariannya Heti yang sudah berstatus kayawan tetap ini, bekerja sama dengan 20 orang jurnalis laki-laki dan empat orang jurnalis perempuan di kantornya. Di pekerjaannya, Heti bertanggung jawab proses editing tulisan reporter dalam hampir semua pos penulisan. Walaupun tidak mempunyai pos khusus, Heti mengakui ia lebih kuat di beberapa liputan seperti *lifestyle*, pendidikan dan kriminal.



Meski terlihat cukup repot, Heti puas dengan pola kerjanya karena pada dasarnya ia dapat mengatur sendiri jam kerjanya.

Jam kerja Heti sehari-harinya cukup padat. Ia terbiasa bekerja dari pagi hingga pukul 22.00.

Rutiniasnya selalu dimulai di siang hari dari mengecek tulisan reporter, melakukan editing hingga mengecek berita dari media nasional secara online. Pukul 17.00. Heti mengikuti meeting redaksi, kemudian dilanjutkan dengan mengedit laporan hingga

pukul 22.00 yang terkadang melebar hingga pukul 24.00 jika laporan yang dicek cukup banyak. Meski terlihat cukup repot, Heti puas dengan pola kerjanya karena pada dasarnya ia dapat mengatur sendiri jam kerjanya. Begitu pula dengan jam istirahat yang memang tidak mempunyai aturan baku di Radar Surabaya. Sementara itu, Heti mengungkapkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan tambahan di Radar Surabaya

masih cukup sulit, walaupun ia juga mengakui hal tersebut belum diperjuangkan. Namun media ini masih memberikan kesempatan untuk masuk ke dalam jajaran pengambil keputusan yang didasarkan pada prestasi dan kemampuan masing-masing individunya. Sekali lagi semua kondisi diatas tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan.

16. Iin Yumiyanti

(Wakil Pemimpin Redaksi Majalah Detik.com)

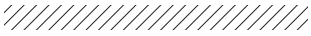
IIN Yumiyanti merupakan salah satu perempuan pertama yang bekerja di portal di Indonesia. Karirnya melesat hingga sekarang. Ia memang tergolong merupakan jurnalis generasi awal di portal Detik.com.

Kerja keras ia lakukan ketika ia mulai masuk di portal ini di tahun 1999. Maklum, sebagai media baru di Indonesia, semua kru harus bekerja ekstra dibanding media yang manajemennya sudah jauh lebih stabil. Saat ponsel belum berkembang seperti saat sekarang, Iin harus menyampaikan laporannya melalui warung telepon (Wartel). Ini merupakan keunikan sendiri ketika ia pertamakali melakukannya di pertengahan tahun 1999. Jika di media cetak ia bisa menuliskan laporan berita di kantor, namun kala itu karena harus melaporkannya secara cepat, maka ia harus ke wartel untuk cepat-cepat menyampaikan hasil liputannya. Kala itu ia tak membayangkan jika perkembangan informasi harus disampaikan secepat mungkin ke khalayak pembaca. Dari sinilah, ia banyak belajar untuk mengolah berita secara cepat. Kecepatan adalah langkah pertama dan kemudian tentu saja harus diimbangi dengan keakuratan.

Tak mudah bagi Iin melakukannya. Namun pengalamannya ketika masih bekerja di Harian Monitor membuatnya cepat untuk menyesuaikan diri. Di saat awal, Iin banyak melakukan peliputan pada desk politik dan keamanan seperti di Mabes

Polri hingga di Kejaksaan Agung dan DPR RI.

Takterlalu lama menjadi reporter, ia lalu diminta manajemen redaksi untuk menjadi penulis. Pekerjaannya menerima laporan dari reporter di lapangan.



Iin Yumiyanti merupakan salah satu perempuan pertama yang bekerja di portal di Indonesia. Karirnya melesat hingga sekarang. Ia memang tergolong merupakan jurnalis generasi awal di portal Detik.com.

Setelah itu, jenjang karirnya terus meningkat. Ia kemudian dipromosikan menjadi koordinator liputan. Namun Iin tak lama mengemban jabatan ini. Karena anak pertamanya masih balita, maka Iin kemudian meminta mundur dari jabatannya sebagai koordinator liputan, dan memilih menjadi penulis kembali karena ingin memiliki waktu lebih banyak untuk anaknya. Keputusan ini murni merupakan pemikirannya sendiri tanpa ada paksaan dari suaminya yang

juga bekerja sebagai produser berita di salah satu TV swasta nasional di Jakarta.

Pekerjaan menjadi penulis memberinya waktu luang yang lebih karena jam kerja yang lebih teratur, yaitu dimulai sekitar pukul 09.00 hingga pukul 18.00 WIB. Ini berbeda dengan ritme kerja sebagai koordinator liputan. Ketika bertugas sebagai koordinator liputan, tak jarang ia harus memikirkan banyak isu, dan harus terus berkoordinasi dengan reporter selepas jam kerja. Di rumahpun, Iin tetap bekerja hingga malam, terutama jika ada berita besar.

Namun kendati pernah meminta mundur dari jabatan koordinator liputan, manajemen redaksi Detik tetap memberikan promosi. Iin kemudian diminta untuk menjadi redaktur pelaksana kanal Detik Portal.

Setelah perwajahan Detik berganti dan Detik Portal ditiadakan, Iin lalu dipindah menjadi koordinator liputan Detik News. Kanal ini menjadi tulang punggung portal Detik karena di segmen ini berita-berita umum biasa tersaji. Di desk inilah karir Iin terus membaik, hingga akhirnya ia menjadi Redaktur Pelaksana untuk Detik News.

Setelah itu, Iin mengajukan pengunduran diri kembali dari posisi redaktur pelaksana. Ia kemudian memilih untuk menjadi penulis. Ia mengkhususkan diri pada penulisan panjang, layaknya *feature* pada media cetak. Ini dilakukan karena beberapa saat kemudian, Detik punya portal khusus untuk koran dan majalah.

Benar saja. Pada akhir tahun 2010, ia diminta pemimpin redaksi Detik untuk mempersiapkan majalah Detik. Selepas peliputan haji pada Desember 2010, Iin mendapat tanggung jawab baru, memimpin tim laporan khusus. Tim ini membuat tulisan panjang, seperti layaknya format penulisan majalah, yang terbit dua pekan sekali.

Mulai awal 2012 hingga saat ini Iin menjabat sebagai wakil pemimpin redaksi majalah Detik. Media ini terbit sekali dalam sepekan. Majalah ini terdiri dari laporan utama, hukum, internasional, ekonomi, gaya hidup, wawancara, seni dan hiburan.

Apakah ada perbedaan gender antara pemberian fasilitas dan gaji di detik.com? Iin menyatakan bahwa gaji di Detik tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Iin menyebutkan kinerja tetap menjadi tolak ukur. Tiap-tiap karyawan juga memperoleh asuransi, berupa rawat inap dan rawat jalan. Jika satu tahun tidak digunakan, asuransi ini dapat diuangkan. Umumnya berupa satu kali gaji. Karyawan juga memperoleh jamsostek, uang makan, dan transportasi. Komponen lain yang didapat adalah tunjangan jabatan (bagi jurnalis yang memiliki jabatan struktural), komunikasi, dan operasional. Karyawan

yang telah berkeluarga juga mendapatkan tunjangan anak.

Untuk kenaikan gaji karyawan selalu terjadi setiap tahun. Selain kenaikan gaji tahunan, besaran kenaikan gaji juga ditentukan oleh kinerja karyawan. Penilaian karyawan dilakukan satu tahun tiga kali.

////////////////////

**Dengan Serikat
pekerja, lin yakin
akan mawadahi
kegelisahan
para karyawan
terkait dengan
kesejahteraan dan
persoalan mereka,
terutama juga
persoalan yang
dialami para jurnalis
perempuan.**

Di Detik.com, Cuti tahunan diberikan selama 12 hari. Perempuan yang melahirkan diberikan hak cuti selama tiga bulan. Cuti haid juga diperbolehkan diambil untuk pekerja perempuan. Untuk setiap pekerja disediakan voucher taksi jika pulang di atas pukul 22.00 WIB. Jurnalis juga dapat mengklaim biaya transportasi jika mereka pulang ke rumah langsung dari tempat peliputan. Sayangnya hingga saat ini, Detik belum menyediakan fasilitas

penitipan anak. Begitu juga dengan fasilitas ruang menyusui. Alhasil para pekerja perempuan sering memompa ASI bagi bayinya di toilet.

Bagaimana dengan isu perempuan di media? Lin menyatakan bahwa semua jurnalis di Detik harus tunduk terhadap Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Untuk berita mengenai perempuan umumnya akan masuk ke kanal Detik news, karena Detik tidak memiliki kanal khusus untuk berita-berita seputar perempuan. Lin menyebutkan berita di mana perempuan menjadi korban, seperti kasus perkosaan, akan berpihak kepada korban. Cara penulisan mengenai kekerasan seksual juga tidak boleh vulgar. Kendati bukan pembekalan khusus reportase mengenai kekerasan terhadap perempuan, reporter dan penulis pernah

menjalani pelatihan agar berita disajikan dengan baik.

Iin mengatakan dia pernah memberikan perhatian besar untuk peliputan mengenai Syekh Puji yang menikahi gadis di bawah umur. Isu ini sempat tidak mendapat perhatian dari redaksi karena dianggap tidak memiliki nilai berita. Tapi Iin melihat ini layak mendapat fokus karena menyangkut pernikahan di bawah umur.

Begitu juga dengan kasus tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi, Sumiyati. Iin, yang saat itu meliput penyelenggaraan haji secara langsung di Arab, juga berpandangan kalau kasus ini perlu mendapat perhatian. Di sela-sela reportase pelaksanaan haji, Iin juga terus menulis mengenai Sumiyati. Akhirnya kasus ini mendapat sorotan dari media nasional.

Mengenai pemilihan narasumber, Iin menyebutkan tidak ada pembatasan bahwa jurnalis harus mengedepankan narasumber laki-laki ketimbang perempuan. Pemilihan narasumber lebih didasarkan pada kapabilitas. Kondisi di Indonesia saat ini lebih banyak narasumber laki-laki.

Saat ini bersama teman-temannya di Detik.com, Iin sedang berusaha menghidupkan kembali Serikat pekerja Detik.com yang sempat mati suri karena ditinggalkan para pengurusnya. Dengan Serikat pekerja, Iin yakin akan mewartakan kegelisahan para karyawan terkait dengan kesejahteraan dan persoalan mereka, terutama juga persoalan yang dialami para jurnalis perempuan. •

BAB V

Fakta yang terungkap, Mulai dari Wajib Dandan sampai Dirayu Narasumber (Hasil *Focus Group Discussion*)

APA saja persoalan lain yang dialami jurnalis perempuan? Beberapa pengalaman ini selanjutnya kami dapatkan pada saat kami melakukan FGD (Focus Group Discussion). Metode FGD sengaja kami lakukan karena kelebihanannya dalam memberikan kemudahan dan peluang bagi peneliti untuk menjalin keterbukaan, kepercayaan, dan memahami persepsi, sikap, serta pengalaman yang dimiliki informan/ narasumber.

FGD kami lakukan dalam empat kali kesempatan secara berbeda dengan empat kelompok jurnalis yang berbeda. Dalam FGD terakhir, kami juga menghadirkan para aktivis perempuan dan pengamat media juga aktivis buruh untuk memberikan masukan tentang kondisi yang dialami jurnalis perempuan. Hal ini memungkinkan kami para peneliti dan narasumber penelitian berdiskusi intensif dan tidak kaku dalam membahas isu-isu yang sangat spesifik. Kami mendapatkan sejumlah data berikut:

1. Wajib dandan dan kriteria cantik bagi Jurnalis Televisi

Jurnalis perempuan yang bekerja di televisi mendapatkan problematika yang agak berbeda dengan jurnalis perempuan yang bekerja di media cetak dan radio maupun online. Beberapa pertanyaan mendasar tentang mitos-mitos seputar perempuan bahkan kami tanyakan: apakah benar jika jurnalis perempuan selalu identik dengan *make-up* dan kosmetik? Jika benar, apakah jurnalis laki-laki juga diwajibkan untuk berdandan? Ternyata kriteria ini tidak berlaku bagi jurnalis laki-laki. Jika jurnalis perempuan televisi wajib untuk berdandan, jurnalis laki-laki hanya diwajibkan agar tampil rapi saja. Tak harus berdandan. Tak harus memakai *make-up* atau kosmetik. Komentar ini kami dengarkan dari para jurnalis perempuan di televisi. Berdandan seperti wajib hukumnya jika mereka mau melakukan siaran langsung. Tak hanya urusan *make-up*, rambutpun harus selalu rapi. Sedangkan jurnalis laki-laki yang bekerja di televisi hanya diwajibkan untuk tampil rapi saja.

Kondisi ini kadang menyulitkan para jurnalis perempuan televisi yang harus berpanas-panas dulu mencari berita di lapangan. Jika berita sudah terkejar, maka persiapan selanjutnya adalah menggunakan *make-up*. Satu lagi, mereka harus tampil segar. Seprima mungkin jika harus tampil di depan layar. Karena pembawa berita diyakini akan sangat mempengaruhi isi berita.

Barangkali, yang dialami para jurnalis televisi ini tak dialami jurnalis media cetak. Para jurnalis media cetak dan radio, cukup menuliskan isi berita atau melaporkannya, maka selanjutnya berita segera siap untuk dibaca.

Beberapa jurnalis televisi mengakui, walaupun ketentuan untuk berdandan ini jarang dilakukan secara tertulis di perusahaan tempat mereka bekerja, namun ini sepertinya sudah menjadi ketentuan umum yang kerap berlaku. Jadi,

selalu berdandan jika sedang tampil live/siaran langsung merupakan ketentuan yang tak bisa dihindarkan para jurnalis perempuan di televisi. Jadi apakah benar jika tampil segar akan membuat pemirsa mereka senang? Ketika ditanyakan tentang ini, mereka tak banyak yang tahu jawabnya.

Sejumlah jurnalis televisi kemudian juga mengungkapkan jika perusahaan di tempat mereka bekerja memberikan fasilitas kecantikan dan kebugaran seperti untuk pergi ke salon atau SPA. Fasilitas ini tak lain agar jurnalis televisi selalu terlihat cantik dan segar jika berada di depan layar televisi. Oleh sejumlah peserta FGD dikatakan bahwa hal ini merupakan bentuk yang adil yang dilakukan perusahaan. Jadi perusahaan media tak hanya menuntut agar para jurnalisnya tampil cantik, namun mereka juga memberikan fasilitas untuk mendukung tampil di depan layar.

Dari fasilitas ini kami juga mendapatkan data bahwa para jurnalis televisi harus menjaga penampilan mereka, lebih-lebih jurnalis perempuannya yang harus tampil dengan *make-up*, di lapangan ketika melakukan peliputan sekalipun.

Persoalan lain yang dialami jurnalis perempuan televisi adalah pada saat mereka berproses reproduksi. Jurnalis perempuan televisi yang sedang hamil misalnya, tak boleh tampil sesering mungkin tampil di depan layar kaca. Ini artinya, ada bagian tubuh mereka yang harus disembunyikan. Tak jelas apa alasannya, apakah kehamilan akan memperburuk layar kaca atau dianggap tak sedap untuk dipandang mata, namun beginilah yang kemudian banyak terjadi.

Kondisi ini tentu saja tak dialami jurnalis televisi laki-laki. Mereka tak pernah mendapatkan perlakuan berbeda. Walaupun tampil rapi tetap saja menjadi hal yang harus dilakukan.

Tuntutan penampilan inilah yang menyebabkan sejumlah stasiun televisi menerapkan kebijakan seperti pra-syarat

menjadi jurnalis televisi. Beberapa pra-syarat yang sering ditulis adalah: wajah menarik.

Beberapa jurnalis televisi mengungkapkan, banyak jurnalis televisi baru yang kemudian diambil dari mantan model. Walaupun ketentuan ini kadang tidak tertulis, namun mereka menyatakan bahwa penampilan merupakan syarat utama untuk tampil di layar televisi. Beberapa persoalan spesifik inilah yang kami dapatkan ketika kami melakukan FGD dengan jurnalis perempuan yang bekerja di televisi.

Mariana Amiruddin dalam Jurnal Perempuan edisi 67, menulis bahwa mitos kecantikan khususnya di televisi telah mengalami mutasi. kini banyak industri televisi yang memproduksi habis-habisan mitos “Jurnalis pembaca berita yang muda dan modis”. Mitos ini selanjutnya dipercaya dapat melayani selera penonton maupun narasumber. Fenomena ini seperti tidak ada bedanya dengan pembawa acara gosip maupun fashion show.¹

Dalam FGD misalnya terungkap sejumlah pernyataan bahwa media mau tidak mau tak pernah lepas dari kepentingan industri, jadi wajar jika di televisi yang merupakan arena visual harus menampilkan wajah yang menarik. Walaupun dikatakan menarik itu menjadi relatif karena disesuaikan dengan kepentingan jaman. Sejumlah data menunjukkan bahwa jurnalis televisi banyak yang kemudian diambil dari mantan model-model di Indonesia atau mantan juara lomba putri di Indonesia.

Namun sejumlah peserta FGD kemudian juga memaparkan, bahwa wajah cantik saja tak cukup, ini harus diimbangi dengan kecerdasan otak juga. Walaupun peserta FGD lain juga kurang setuju dengan pernyataan ini. Jika cantik menjadi ukuran, maka

1 Mariana Amiruddin, *Apa Kabar Media Kita?*, Jurnal Perempuan edisi 67, Jakarta, 2011.

banyak jurnalis perempuan yang dianggap tidak cantik akan merasa terdiskriminasi. Ini sejalan dengan banyaknya temuan yang mengatakan bahwa industri telah berhasil memecah-belah kriteria terhadap perempuan. Karena, jika melihat perempuan dari sisi kecantikannya saja, hal ini juga merupakan salah satu bentuk pelecehan terhadap perempuan.

Hal yang sama ternyata juga dialami di beberapa majalah khusus untuk perempuan ataupun pemilihan narasumber perempuan di media cetak. Sulit untuk menolak persyaratan bahwa yang tampil di media haruslah cantik. Karena umumnya mereka mengatakan bahwa ini menjadi permintaan dari pembaca. Jika tidak cantik, maka mereka harus menarik. Dalam FGD diakui memang, jika industri memang sudah memberikan kriteria ini selama bertahun-tahun lamanya. Sulit untuk menghindari kriteria yang sudah diminta oleh industri dan pasar.

Maka para peserta FGD selanjutnya setuju jika yang harus dilakukan adalah bagaimana cara bersiasat, misalnya: kriteria cantik tak harus menjadi urutan pertama. Yang menjadi urutan pertama adalah tetap kecerdasan, baru kemudian urutan keduanya adalah wajah menarik. Dalam rapat-rapat di ruang redaksi kriteria seperti ini selalu muncul, dan akhirnya memang harus berkompromi dengan tuntutan industri.

Tentang ini dalam **Jurnal Perempuan 67** feminis eksistensialis, Simone de Beauvoir menjelaskan bahwa memang tidak adanya subyektifitas bagi perempuan. Eksistensi perempuan dihadirkan bukan pada diri atau untuk dirinya sendiri, melainkan untuk orang lain. Perempuan dihadirkan bukan sebagai realitas dirinya, melainkan realitas yang dibuat oleh orang lain yaitu pandangan patriarkhi. Dalam industri media, tubuh perempuan bukan sebuah realitas yang hadir atas perempuan itu sendiri, melainkan diciptakan sedemikian rupa yaitu dengan melihat “bagaimana orang lain memandang”.

Bagi feminisme, sungguh sulit meruntuhkan mitos kecantikan di media, karena merubah mitos perempuan sama saja menggerakkan industri media yang selalu mengatakan bahwa mereka melakukan ini karena selera pasar.²

Sejumlah peserta FGD setuju jika para jurnalis harus berusaha keras untuk merubah hal ini. Karena sebenarnya pekerjaan jurnalis adalah untuk mengabarkan berita atau menuliskan berita yang kemudian diberikan kepada masyarakat. Jadi kriteria awal menjadi jurnalis, haruslah orang yang mampu untuk menuliskan berita, mempunyai ketrampilan dan kecerdasan. Jika media visual seperti televisi memberikan syarat harus tampil cantik, maka ini seharusnya tidak menjadi syarat utama bagi para jurnalis perempuannya.

2. Hak reproduksi jadi hambatan

Persoalan tentang minimnya jumlah jurnalis perempuan yang bekerja di media merupakan topik yang paling hangat dibicarakan dalam FGD. Rata-rata peserta FGD mengakui minimnya jumlah jurnalis dari tingkat reporter hingga pemimpin redaksi. Penyebabnya adalah: pertama, pekerjaan jurnalis yang tak pernah mengenal waktu. Jurnalis televisi misalnya harus mau bekerja di luar jam kerja, yaitu bisa dari malam hingga dini hari atau dari malam hingga pagi hari. Selain itu pekerjaan reporter yang kadang tak bisa diduga membuat para jurnalis perempuan akhirnya lebih banyak memilih keluar dari pekerjaannya.

Penyebab kedua, jurnalis perempuan masih mempunyai problem ganda, seperti selain bekerja di sektor publik, ia harus mengatur urusan domestiknya. Jadi seringkali mereka terhambat pekerjaannya atau terhambat karirnya di media

2 *Ibid.*

karena ini. Ini bisa dilihat dari banyaknya jurnalis perempuan harus berkompromi dengan urusan rumah tangganya, misalnya: ketika anaknya sakit, maka jurnalis perempuan harus mengorbankan waktunya bekerja untuk mengurus anak. Belum lagi jika suaminya sakit atau ada keperluan keluarga lainnya. Hal ini tidak dialami jurnalis laki-laki.

Penyebab ketiga, ketika jurnalis perempuan mengalami persoalan kesehatan reproduksi seperti: hamil, melahirkan, menyusui. Jurnalis perempuan harus membagi waktunya dengan baik jika sedang dalam kondisi hamil terutama menjaga fisiknya, juga selagi menyusui.

Beberapa persoalan lain yang dialami jurnalis perempuan terkait hak reproduksi antaralain: jurnalis perempuan di Indonesia masih memperoleh tunjangan yang berbeda dengan jurnalis laki-laki. Misalnya masih ada jurnalis perempuan yang tidak mendapatkan tunjangan melahirkan, tunjangan keluarga, karena jurnalis perempuan umumnya dinilai bukan sebagai kepala keluarga.

Beberapa jurnalis perempuan juga menyatakan masih belum mendapatkan cuti melahirkan hingga tiga bulan. Ada yang masih mendapatkan cuti melahirkan hingga dua bulan saja.

Secara umum, hampir tidak adanya ruang menyusui juga membuat kesulitan bagi para jurnalis perempuan yang sedang menyusui. Hampir semua peserta FGD bahkan menyatakan di tempat mereka bekerja tidak ada ruang untuk menyusui. Akibatnya, mereka biasa menyusui di ruangan tertutup atau memerah ASI di kamar mandi. Para jurnalis perempuan yang melakukan laktasi ini juga tidak diberikan waktu khusus. Umumnya mereka menyusui dan memerah ASI di sela waktu istirahat. Akibatnya, waktu istirahat mereka menjadi berkurang. Padahal perusahaan menginginkan mereka selalu tepat waktu. Maka tak heran, ketika hamil dan

menyusui (proses reproduksi), banyak jurnalis perempuan kemudian yang kerepotan untuk membagi waktu. Akibatnya, sering fatal, jurnalis perempuan yang sedang melakukan proses reproduksi dianggap tidak produktif. Beberapa peserta FGD yang berasal dari jurnalis televisi menyatakan, bahkan ketika mereka sedang menyusui, pimpinannya tidak memperbolehkan mereka untuk memegang sebuah program acara, karena ini dinilai akan menghambat jalannya program. Jadi fungsi reproduksi dianggap sebagai penghambat karir seorang jurnalis perempuan.

Beberapa hak jurnalis perempuan juga masih dilanggar oleh media tempat mereka bekerja, misalnya: belum memberikan cuti haid bagi jurnalis perempuan, belum memberikan makanan pendukung bagi jurnalis perempuan yang bekerja dari jam 23.00 – 05.00.

Dari sejumlah sebab inilah maka tak heran jika sangat sedikit jurnalis yang kemudian bertahan dalam bekerja. Mereka gugur satu demi satu. Ini juga yang menyebabkan mengapa kemudian tak banyak jurnalis yang menempati posisi tinggi sebagai pengambil keputusan di media. Padahal berada dalam posisi sebagai pengambil keputusan dirasakan sangat penting, yaitu bisa merubah kebijakan yang lebih baik dan berperspektif perempuan.

Dari situasi ini, hampir semua peserta FGD menyayangkan, perusahaan media yang hanya sekedar mempekerjakan perempuan, namun tidak memberikan fasilitas yang memadai. Jika perempuan diberikan fasilitas dan waktu untuk mengurus anaknya yang sakit, diberikan waktu dan fasilitas untuk menyusui dan diberikan perlakuan khusus ketika hamil, maka perempuan tidak tergerus habis untuk melanjutkan cita-citanya dalam bekerja.

Kritikan lain adalah selama ini urusan anak dan rumah tangga misalnya selalu menjadi tanggungjawab jurnalis perempuan,

sedangkan jurnalis laki-laki tidak diberikan tanggungjawab untuk ini. Stereotype inilah yang telah berlangsung hingga kini, bahwa perempuanlah yang selalu menjalankan hak pengasuhan dan wajib menyelesaikan persoalan domestik, sedangkan laki-laki tidak.

Dalam **Jurnal Perempuan 56, Rita Olivia Tambunan** kemudian menyebutkan kondisi ini sebagai feminisasi kerja (*feminisation of work*), salah satunya bisa dilihat bahwa ketersediaan lapangan kerja bagi perempuan tidak dibarengi dengan perlindungan akan hak kerja. Sehingga selanjutnya diskriminasi terjadi pada area maternitas (perlunya menyediakan perlindungan untuk hak kesehatan reproduksi buruh perempuan seperti ketika haid, menyusui, dan sebagainya) walaupun hak ini dilindungi Undang-undang, namun dalam prakteknya selalu ada banyak pelanggaran.³

Rita Olivia juga mencatat, kondisi ini terus berlangsung karena banyak pemodal yang kemudian lebih senang mempekerjakan buruh perempuan muda dan belum berkeluarga untuk menghindari kewajiban hukum yang harus dipenuhi perusahaan, seperti hak atas maternitas. Jadi analogi ini masih berlangsung hingga kini : dulu, perempuan tak boleh bekerja karena harus mengurus rumah dan anak. Kini, perempuan boleh bekerja di luar rumah, namun tetap saja harus mengurus rumah dan anak. Maka yang terjadi adalah beban perempuan bertambah banyak namun tak diiringi dengan fasilitas yang memadai. Sedangkan di sisi lain, secara budaya, kriteria terhadap laki-laki tak juga berubah: bekerja di sektor publik namun tidak menyelesaikan urusan domestik. *Stereotype* ini terus melakat. Padahal jika laki-laki dan perempuan sama-sama bekerja di sektor publik, maka urusan domestik harusnya menjadi urusan keduanya.

3 *Menyoal Buruh, Mengapa mereka diperdagangkan*, Jurnal Perempuan, Edisi 56, Jakarta, 2007.

3. Pelecehan terhadap jurnalis perempuan

Lalu, apalagi persoalan yang dialami jurnalis perempuan pada umumnya? Para peserta FGD sering mendapatkan pelecehan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pelecehan langsung misalnya, mereka sering dirayu maupun dirangkul oleh rekan sekerjanya. Walaupun kadang-kadang hanya bermaksud untuk bercanda, namun jurnalis perempuan menyatakan, perilaku yang mereka terima kadang-kadang sudah sangat berlebihan.

Jurnalis laki-laki juga sering menertawakan narasumber perempuan atau menjadikan narasumber perempuan sebagai lelucon. Misalnya ketika mereka berkomentar tentang narasumber perempuan yang ada di televisi atau foto perempuan di media cetak. Beberapa jurnalis perempuan menyatakan sangat risih dengan kondisi ini, namun mau tak mau mereka harus mentolerir hal ini karena ini sudah merupakan situasi yang umum terjadi.

Hal lain yang mereka alami, sejumlah jurnalis perempuan juga menyatakan sering mendapatkan pelecehan ketika melakukan peliputan, yaitu beberapa narasumber laki-laki yang mencoba merayu jurnalis perempuan. Kondisi ini tidak membuat jurnalis perempuan merasa nyaman. Namun situasi ini juga sudah sering terjadi, jadi banyak orang yang menganggapnya sebagai situasi yang biasa.

Sejumlah jurnalis perempuan juga masih mendapatkan perlakuan kurang menguntungkan dari media tempat mereka bekerja. Media tempat mereka bekerja enggan mengirimkan para jurnalis perempuannya ke daerah konflik karena mereka punya ketakutan jurnalis perempuan akan mendapatkan kekerasan seksual. Namun jika situasi genting, maka yang akan mereka kirim adalah jurnalis perempuan. Karena jurnalis perempuan dinilai gampang untuk merayu narasumber. Perlakuan ini tentu saja tidak dialami oleh jurnalis laki-laki.

Tentang ini, feminis Angela Davis dalam buku **Dictionary of Feminis Theory** menyatakan bahwa ini disebabkan oleh symptom struktur kekuasaan dan ketidakberdayaan yang meluas di masyarakat. Feminis lain, Catherine Mac Kinnon selanjutnya melihat bahwa pelecehan menyimbolkan bagaimana perempuan dianggap sebagai obyek oleh laki-laki.⁴Dalam prakteknya, kondisi ini seperti kepanjangan tangan industri maupun kebijakan media. Karena ruang-ruang redaksi masih memperdebatkan soal kriteria cantik dan tidak cantik untuk para jurnalisnya dan para narasumber mediana, maka dengan sendirinya ukuran inilah yang masih diyakini awak media sebagai sesuatu yang dianggap dibenarkan.

Perempuan juga masih dilihat sebagai fisiknya, bukan dari pikirannya. Hal inilah yang kemudian membuat posisi perempuan menjadi inferior. Mereka seringkali mempertanyakan tubuhnya sendiri: mengapa aku harus digoda, dilecehkan dan dijadikan obyek?. Kritik dari para feminis menyatakan bahwa banyak perempuan yang harus berusaha keras untuk menolak pelecehan ini. Namun banyak juga perempuan yang kemudian terperangkap. Umumnya mereka berusaha keras agar menjadikan tubuhnya sesuai standar ideal kecantikan. Banyak perempuan yang rendah diri dan merasa iri ketika tubuh mereka tidak sesuai standar kecantikan.

Semua kondisi di atas adalah sebuah situasi yang membingungkan bagi perempuan. Karena di satu sisi, ketika mereka tampil cantik, mereka akan digoda dan dijadikan obyek. Namun ketika tak tampil cantik maka mereka akan mendapatkan pelecehan. Seringkali diskriminasi juga mereka alami ketika ada perempuan yang dianggap lebih cantik.

Para peserta FGD intinya setuju jika perempuan harus

4 Maggie Humm, *Dictionary of Feminist Theory*, Ohio University, 1990.

keluar dari situasi ini. Mereka harus tampil percaya diri dan menolak jika mendapatkan pelecehan atau kekerasan. •

BAB VI

Tantangan berserikat dan berorganisasi

HINGGA sekarang belum ada perkembangan yang baik soal Serikat Pekerja yang dibangun dengan perspektif perempuan. Jurnalis perempuan di media juga belum memulai untuk membuat diskusi-diskusi dengan perspektif perempuan. Padahal dua hal ini merupakan cara-cara yang efektif agar para pekerja media mulai membicarakan persoalan-persoalan yang dialami para jurnalis perempuan. Jika sudah mulai membicarakan, maka tak sulit lagi untuk memperjuangkan isu-isu yang menimpa jurnalis perempuan di media.

Sejumlah peserta FGD setuju jika para jurnalis perempuan harus mulai berkumpul dan bekerjasama untuk mengatasi persoalan-persoalan yang mereka alami. Selama ini para jurnalis perempuan umumnya belum mengungkapkan persoalan mereka secara bersama-sama, baik dengan jurnalis perempuan yang lain maupun di depan manajemen perusahaan tempat mereka bekerja. Jika ada persoalan terkait kesehatan reproduksi misalnya, maka para jurnalis perempuan cenderung membicarakannya diantara mereka dan menyelesaikannya secara personal. Misalnya: jika ada jurnalis perempuan yang anaknya sakit, maka jurnalis perempuan lain yang akan

menggantikannya bekerja, dan lain-lain. Mereka menyadari jika persoalan ini tidak cukup jika diselesaikan secara individu. Jadi harus secara bersama-sama dan bertemu dengan pihak perusahaan.

Lalu dengan cara apa mengumpulkan para jurnalis perempuan agar bisa bekerjasama mengatasi persoalan mereka? Banyak peserta FGD menyadari jika tak mudah menyelesaikan persoalan ini jika para jurnalis perempuannya tidak berkumpul maupun berorganisasi. Sedangkan mendirikan Serikat Pekerja juga merupakan sesuatu yang masih sulit dilakukan oleh para jurnalis. Selama ini, perusahaan sangat kuat mencengkeram para buruh jurnalisnya, sehingga ancaman untuk di-PHK atau mendapatkan sanksi jika jurnalisnya dirasa kritis ketika mempertanyakan sesuatu selalu mengincar di depan mata. Dengan sendirinya, mendirikan serikat pekerja media memang tak mudah seperti membalikkan telapak tangan.

Menurut catatan AJI dalam buku yang berjudul **Ancaman itu Datang dari Dalam**, pekerja media kini tak hanya menghadapi konglomerasi media dimana para pengusaha melebarkan sayapnya. Tak hanya melebarkan sayap untuk mengeruk keuntungan secara ekonomi, namun banyak pemilik media yang kemudian sibuk berpartai. Ancaman lain yang terjadi saat ini yaitu ancaman regulasi dan ancaman dari pihak luar seperti aparat dan kelompok tertentu. Ancaman paling banyak yang dihadapi para pekerja media yaitu ancaman dari dalam, yakni dari pihak manajemen dan pemilik modal. Persoalan lainnya, pemilik modalpun kerap mempraktekkan tindakan anti serikat atau union busting. Mereka juga berkali-kali memecat para jurnalisnya yang mencoba mempertanyakan kebijakan perusahaan atau mendirikan Serikat Pekerja.¹

1 Abdul Manan, *Ancaman itu Datang dari Dalam*, Catatan Tahunan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Jakarta, 2010.

Berbeda dengan yang terjadi di sektor buruh pabrik, pertumbuhan serikat pekerja di media mengalami pertumbuhan yang sangat lambat. Hingga tahun 2012 jumlah serikat pekerja media di Indonesia hanya 31 serikat pekerja dari kurang lebih 2400 media yang ada di Indonesia.

Dalam buku yang berjudul: **Menjelang Sinyal Merah** di kurun waktu lima tahun terakhir, ada pesan ajek yang selalu disampaikan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) saat memperingati Hari Buruh Internasional yang jatuh setiap tanggal 1 Mei. Selain meminta perbaikan kesejahteraan jurnalis, AJI juga mendorong para pekerja media berhimpun dan mengorganisasi diri dalam wadah serikat pekerja. Pesan itu juga yang disampaikan saat AJI memperingati May Day—sebutan umum untuk peringatan hari buruh—pada 1 Mei 2011.²

Setidaknya ada dua hal yang mendorong AJI terus berkampanye agar pekerja media berinisiatif mendirikan serikat pekerja. Pertama, serikat pekerja merupakan organisasi legal dan diakui undang-undang. Serikat pekerja diberi mandat undang-undang untuk memperjuangkan kepentingan karyawan, mulai dari penanganan kasus ketenagakerjaan sampai usulan perbaikan kesejahteraan. Banyak bukti menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki serikat pekerja memiliki kesejahteraan lebih baik—setidaknya karyawan memiliki alat untuk memperjuangkan perbaikan kesejahterannya. Kedua, pertumbuhan serikat pekerja di media tergolong lambat dan masih jauh dari watak umum serikat yang progresif. Sampai Mei 2011, AJI dan FSPM Independen mencatat bahwa jumlah serikat pekerja media di Indonesia memang masih sangat sedikit. Jumlah ini sama sekali tak proporsional dan jauh dari ideal jika dibandingkan dengan jumlah media di Indonesia.

2 Abdul Manan, *Menjelang Sinyal Merah*, Catatan Tahunan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Jakarta, 2011.

Selain ganjil, statistik jumlah serikat pekerja di media ini juga ironis. Pekerja media, yang selama ini kerap menjadi pembela vokal dalam isu hak asasi manusia melalui berita yang ditulisnya, justru kurang berhasil memperjuangkan hak-hak dasarnya sebagai pekerja—khususnya hak untuk berserikat—di dalam rumah tangganya sendiri.

Fakta yang kurang baik ini, jika merujuk pada sejarah kelahiran serikat pekerja di sektor media, memang tak sepenuhnya mengejutkan. Meski surat kabar sudah ada di Indonesia sejak 1745, dengan adanya *Bataviasche Nouvelles*, serikat pekerja pers baru tumbuh beratus-ratus tahun kemudian. Lambannya pertumbuhan serikat pekerja media bukan karena kurangnya sengketa ketenagakerjaan di perusahaan media. Penjelasan yang relevan atas fenomena itu antara lain karena watak media sebagai lembaga bisnis memang kurang terasa pada tahun-tahun sebelumnya.

Serikat pekerja media yang pertama kali lahir di Indonesia adalah Serikat pekerja Tempo di tahun 1978. Setelah itu sekitar tahun 1992 diikuti berdirinya serikat pekerja bisnis Indonesia dengan nama Kerukunan Warga karyawan Bisnis Indonesia (1992), berturut-turut kemudian SP Bina Media Tenggara-Jakarta Post (1993), Dewan Karyawan Forum (1997), Dewan Karyawan PT Abdi Bangsa-penerbit Republika (1997).

Kemudian berturut-turut di tahun 1998 sampai 2012 masing-masing: Perkumpulan Karyawan Kompas, Dewan karyawan tabloid Kontan, Dewan pekerja AN-TV, Serikat pekerja Surabaya Post, Ikatan Karyawan Solo Pos, Forum Komunikasi Karyawan Pos Kota, Serikat Pekerja Detik.com, Serikat Pekerja KBR 68H, Serikat Pekerja Neraca, Serikat Pekerja Berita Kota, Dewan Pekerja Radio Jakarta News FM, Serikat Pekerja Antara, Serikat Pekerja Kopitime.com, Serikat Pekerja Sinar Harapan. Setelah 2002 berdiri sejumlah serikat pekerja yang baru seperti: Perkumpulan Karyawan Smart FM,

Serikat pekerja Hukumonline.com, Serikat karyawan Indosiar, Serikat Pekerja Suara Pembaruan, Serikat Pekerja Sumut Post Medan, Serikat Pekerja Medan Bisnis, Serikat Pekerja Analisa Medan, Serikat Pekerja Lampung TV, Serikat Pekerja Mercusuar Palu, Serikat Pekerja Aceh Independen.

Dan yang baru muncul di tahun 2012 adalah: Serikat Pekerja Pontianak Post. Tempo kemudian juga melahirkan serikat pekerja kontributor di tahun 2012. Serikat pekerja kontributor Tempo (Sepak@t) ini merupakan serikat pekerja kontributor yang pertamakali lahir di Indonesia.

Problematika pendirian serikat pekerja di media sendiri merupakan hal yang umum terjadi hingga kini. AJI mencatat problem laten yang dialami para jurnalis ketika akan mendirikan Serikat Pekerja:

1. Problem “Kelas” yang belum tuntas

Selama ini mayoritas jurnalis masih mengidentifikasi dirinya sebagai kelompok profesional. Mereka merasa enggan untuk dikelompokkan menjadi bagian dari kelas buruh. Latar belakang pendidikan yang tinggi, kemudahan akses dalam kerja-kerja jurnalistik, penampilan yang keren dan mentereng adalah beberapa faktor yang membuat jurnalis makin membenamkan dirinya sebagai kelas white collar.

2. Masih bertumpu pada jurnalis

Dalam kepengurusan sebuah organisasi atau serikat pekerja, jurnalis masih dianggap sebagai kasta brahmana. Poros sebuah serikat umumnya ditumpukan pada jurnalis.

3. Stigma negatif tentang Serikat Pekerja

Serikat Pekerja termasuk aktivisnya kerap dituding sebagai pembuat kisruh di perusahaan karena suka menuntut dan membuat disharmoni dalam hubungan kerja.

4. Lemah secara manajemen dan organisasi

Tak adanya rapat reguler, minimnya perumusan agenda dan program hingga lemahnya administrasi keuangan serikat pekerja membuat mayoritas anggota menjadi demoralisasi.

5. Sanksi dari manajemen

Sanksi yang diberikan oleh manajemen perusahaan pada aktivis atau pengurus dan anggota serikat pekerja seringkali membuat jurnalis takut untuk bergabung dalam serikat pekerja.

6. Rendahnya pembelaan dan solidaritas di dalam serikat

Minimnya pengalaman dan kemampuan bernegosiasi sering membuat pengurus serikat pekerja media menghindari terlibat konflik langsung dengan manajemen. Akibatnya ketika ada anggota yang mengadukan masalah, pengurus serikat pekerja media tak mampu untuk membantu dan mengadvokasi anggotanya.

7. Terpisah dalam teritori tertentu

Kondisi ini umum terjadi di perusahaan media ketika media mempunyai beberapa serikat pekerja, misalnya di bagian percetakan dan bagian redaksi. Pembatasan kriteria ini kadang membuat 2 serikat pekerja yang berdiri tidak mampu untuk bersatu.

8. Tuntutan kerja yang tinggi

Tuntutan kerja yang tinggi terhadap pekerja media seringkali memperlemah militansi para pengurus serikat pekerja media.

9. Bimbang akan pilihan loyalitas

Pengurus maupun anggota serikat pekerja kadang bimbang untuk memilih untuk lebih loyalitas pada serikat pekerja atau perusahaan. Hal inilah yang sering

membuat organisasi menjadi melemah.

10. Lemahnya kaderisasi

Ini merupakan problem usang serikat pekerja. Tak banyak munculnya kader-kader baru membuat serikat pekerja lemah dalam kaderisasi.

Tantangan lain juga dialami para jurnalis yang mendirikan serikat pekerja atau menjadi pengurus dan anggotanya. Tak jarang mereka dihalang-halangi, diintimidasi, dipindahkan bahkan di PHK jika terlibat dalam organisasi atau Serikat Pekerja. Padahal disisi yang lain para jurnalis masih mengalami berbagai macam persoalan seperti desakan ekonomi atau masih minimnya kesejahteraan yang mereka terima. Inilah catatannya:

1. Ditemukan masih banyak jurnalis yang tak memahami UU ketenagakerjaan
2. Bekerja keras dengan sistem kontrak kerja yang tidak jelas
3. Bekerja dengan jam kerja yang tidak jelas.
4. Bekerja dengan resiko tinggi
5. Lulusan perguruan tinggi tapi rela di upah rendah

Data yang dihimpun AJI menyangkut kondisi umum pekerja media berdasarkan survey AJI di 16 kota mencakup:

1. Para jurnalis umumnya tidak punya tabungan cukup, jaminan kesehatan, tempat tinggal layak, menyekolahkan anak secara memadai, bahkan tidak punya dana untuk menikah. Dengan data tersebut ironisnya masih banyak

yang belum berserikat.

2. Berdasarkan survey AJI2010 di 7 kota, beban kerja mereka tidak sebanding dengan upah yang diterimanya.
3. Mereka menyatakan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Karena itulah tantangan-tantangan ini juga harus diperhitungkan oleh para jurnalis perempuan yang akan membentuk kelompok jurnalis perempuan atau memberikan perspektif perempuan pada serikat pekerja yang sudah berdiri.

Selama ini sangat banyak persoalan yang dihadapi perempuan untuk bergabung di dalam serikat pekerja. Federasi Serikat Pekerja Media Independen (FSPMI) Independen yang merupakan naungan dari 10 Serikat Pekerja media di Indonesia mencatat beberapa persoalan mengapa tak banyak perempuan yang bergabung di dalam Serikat Pekerja. Pertama, karena memang dari segi jumlah tak banyak perempuan yang bekerja menjadi jurnalis dibandingkan laki-laki, jadi dengan sendirinya kebanyakan pengurus Serikat Pekerja dipegang laki-laki. Yang kedua, posisi pengurus Serikat Pekerja media selama ini selalu beresiko karena seolah-olah berhadapan dengan manajemen, hal ini pula yang membuat tak banyak perempuan tertarik untuk bergabung di dalam Serikat Pekerja. Yang ketiga, karena secara umum kesadaran untuk berorganisasi yang masih rendah. Dari problem ini diperlukan siasat hingga kelompok perempuan bisa mulai berdiri. Pertama, yaitu dengan cara menumbuhkan kesadaran para jurnalis perempuan untuk berorganisasi, yang kedua dengan cara mengajak mereka untuk berkumpul, yang ketiga mulai mengajak mereka untuk berdiskusi soal-soal yang spesifik, yaitu soal persoalan yang mereka alami sebagai pekerja media.

Para perempuan yang di medianya sudah terbentuk Serikat Pekerja, bisa bergabung di dalamnya dan memberikan perspektif perempuan pada Serikat Pekerja yang sudah berdiri, karena umumnya mereka sudah mempunyai PKB (Perjanjian Kerja Bersama). Namun jika belum ada Serikat Pekerja di media masing-masing, maka membentuk kelompok perempuan merupakan cara yang paling efektif untuk mensosialisasikan soal Serikat Pekerja dan Serikat Pekerja dengan perspektif perempuan. Karena sulit jika tidak memulai dengan diskusi-diskusi kecil seperti ini.

Beberapa diskusi yang bisa dilakukan oleh kelompok perempuan antarlain soal : kesejahteraan berperspektif perempuan, soal hak kesehatan reproduksi, dan lain-lain. Tentu saja tantangannya tak beda jauh dengan yang dihadapi para pengurus dan anggota Serikat Pekerja, karena para jurnalis perempuan ini akan menghadapi kelompok yang sama, yaitu manajemen perusahaan.

Beberapa peserta FGD setuju jika para jurnalis perempuan mulai berkumpul bersama dulu dan didekatkan dengan hobi mereka, seperti yang hobi membaca, dipertemukan dalam komunitas membaca. Jurnalis yang hobinya berolahraga, dipertemukan dalam komunitas berolahraga, dll. Dengan cara ini maka para jurnalis perempuan bisa dikumpulkan dan membentuk solidaritas.

Tentang bagaimana membentuk organisasi di tengah banyaknya tantangan politik dan ekonomi perusahaan media ini, sejumlah feminis mengungkapkan teorinya tentang sisterhood (persaudaraan perempuan). Dalam **Dictionary of Feminism** disebutkan bahwa perkumpulan perempuan atau sisterhood mencakup gagasan dan pengalaman ikatan perempuan dan penguatan diri serta identitas yang ditemukan dalam pandangan yang berpusat pada perempuan dan definisi perempuan itu sendiri. Karena perkumpulan perempuan

ini didasarkan pada kesadaran yang jelas bahwa semua perempuan tanpa memandang suku, kelas, ras atau bangsa mempunyai persoalan yang sama, yaitu melawan penindasan pada perempuan. Organisasi perempuan yang terbentuk nantinya harus mampu memperjuangkan perlawanan terhadap penindasan.³

Beberapa Jurnalis yang tergabung di AJI kemudian mencoba memberikan perspektif perempuan di AJI melalui divisi perempuan di AJI di masing-masing kota atau dalam beberapa program kerja secara umum. Mereka juga memberikan kontribusi tentang perspektif perempuan di media tempat mereka bekerja. Sejumlah masukan mereka berikan pada media tempat mereka bekerja. Untuk yang akan datang, AJI akan mulai memfasilitasi kelompok-kelompok diskusi perempuan di media.

Beberapa jurnalis perempuan peserta FGD juga berharap ada keterbukaan komunikasi dengan manajemen tempat mereka bekerja, karena umumnya, di media tempat mereka bekerja tidak terdapat organisasi atau kelompok untuk sekedar menginventarisir persoalan-persoalan mereka.

Secara ideal, beberapa jurnalis perempuan menginginkan adanya organisasi yang bisa memunculkan persoalan yang dialami jurnalis perempuan serta membantu mereka untuk menyelesaikan persoalan. •

3 Maggie Humm, *Dictionary of Feminism*, Ohio University, 1990.

BAB VII

Lakukan sekarang !

BEBERAPA solusi harus segera ditawarkan, seperti mengajak para jurnalis perempuan untuk berkumpul dan mengemukakan persoalan dan pendapat mereka, mengajak manajemen perusahaan bertemu dan menegosiasi, serta membuat peraturan bersama untuk mengatasi persoalan yang dialami jurnalis perempuan.

Jika sudah, maka para jurnalis perempuan bisa mengorganisir persoalan mereka. Sekelompok aktivis perempuan menyatakan, jika sudah berkumpul maka para jurnalis perempuan bisa membentuk solidaritas (in sisterhood). Solidaritas antar perempuan menjadi sangat penting agar para jurnalis perempuan kemudian bisa mengungkapkan persoalan mereka secara lebih terbuka dan kemudian saling meringankan beban antara yang satu dengan yang lain.

Banyaknya jurnalis perempuan yang fokus untuk menuliskan persoalan perempuan di media di tempat mereka bekerja merupakan pertanda baik bahwa mereka walaupun jumlahnya kecil melakukan sesuatu yang besar untuk media di tempat mereka bekerja. Selain membangun perspektif perempuan diantara diantara jurnalis di tempat mereka bekerja, para jurnalis perempuan ini juga memberikan perspektif perempuan

bagi para pembaca.

Mimpinya, di masa-masa mendatang, jurnalis perempuan bisaberserikatataumembentukkelompokuntukmengorganisir kebutuhan mereka. Mereka bisa membentuk kelompok sendiri atau menjadi perspektif dalam sebuah serikat pekerja.

Beberapa rekomendasi ini bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan jurnalis perempuan:

1. Membentuk kelompok-kelompok jurnalis perempuan dan menginventarisir persoalan yang mereka alami. Jika sudah ada serikat pekerja di media tempat mereka bekerja, maka jurnalis perempuan dapat terlibat untuk memberikan perspektif perempuan dan memecahkan persoalan mereka. Misalnya: kebutuhan untuk cuti haid, cuti hamil, ruangan untuk menyusui, waktu khusus menyusui, menolak segala bentuk pelecehan dan kekerasan di tempat kerja, mendapatkan akses yang sama di tempat kerja, dll.
2. Mulai dari tempat kerja kita, usulkan pelatihan-pelatihan keterampilan bagi jurnalis perempuan. Ini dapat diusulkan karena sifatnya populis, tawarkan solusi problem perusahaan kepada manajemen misalkan kasus pada upah layak jurnalis secara umum dan secara khusus pada jurnalis perempuan.
3. Memberikan kode etik jurnalistik di media tempat mereka bekerja agar menghormati isi kode etik jurnalistik.
4. Buat kelompok-kelompok kecil seperti kelompok presenter atau kelompok redaktur, kelompok reporter, berdasarkan bidang kerja atau hobi jurnalis perempuan. Dari sinilah kita bisa memberikan ide untuk menyelesaikan persoalan jurnalis perempuan.

5. Jika kelompok-kelompok kecil ini sudah terbentuk, maka masing-masing langsung melakukan rencana aksi untuk memberikan masukan pada perusahaan tentang persoalan yang mereka alami, serta menawarkan pada perusahaan cara memberikan solusi atas persoalan yang dialami jurnalis perempuan. •

BAB VIII

Standar Layak Kerja Bagi Jurnalis Perempuan

PEMETAAN kondisi kerja jurnalis perempuan tanpa dibarengi standar layak kerja, maka terasa kurang. Maka, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) melakukan formulasi standar layak kerja jurnalis perempuan. Formulasi ini diharapkan menjadi acuan bagi perusahaan media untuk melindungi dan menerapkan hak-hak pekerja perempuan.

Sebenarnya, peraturan dasar tentang perempuan dan ketenagakerjaan telah dimuat pada Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003. Namun hasilnya belum maksimal. Bahkan saat AJI melakukan workshop tentang formulasi standar layak kerja jurnalis perempuan di Solo dan Medan, kebanyakan jurnalis perempuan tidak tahu bahwa hak-hak pekerja telah diatur di UU.

Saat AJI melakukan Focus Group Discussion (FGD) tentang formulasi standar layak kerja jurnalis perempuan, peserta FGD masih melihat bahwa hak-hak jurnalis perempuan belum terpenuhi.

1. Masih banyak jurnalis perempuan tidak mengetahui bahwa dalam UU No 13 Tahun 2003 pada pasal 76

disebutkan bahwa “Pengusaha yang mempekerjakan wanita antara jam 23.00-07.00 wajib:

Memberi makanan dan minuman bergizi.

- a. Menjaga keamanan dan kesusilaan di tempat kerja.
 - b. Wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja wanita yang berangkat dan pulang kerja antara jam 23.00 – 05.00
2. Sebagai jurnalis yang jam kerjanya tidak menentu, pulang pada malam hari kerap terjadi. Dan pada malam hari, kejahatan seksual masih rawan terjadi. Namun sayangnya, masih ada peserta FGD yang tidak mengetahui adanya fasilitas antar jemput bagi pekerja yang pulang malam. Ada peserta FGD yang kantornya telah memberikan fasilitas ini kepada jurnalis tanpa membedakan jenis kelamin.
 3. Bagaimana dengan cuti haid? Dalam UU No 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa pekerja perempuan dalam masa haid, merasa sakit dan melapor kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari 1 dan 2 pada waktu haid. Peserta FGD menilai, kata ‘merasa sakit’ seharusnya dihilangkan. Menurut peserta FGD, jika melihat dari kesehatan reproduksi, sakit atau tidak sakit saat haid memang harus istirahat. Tak perlu menunjukkan surat dokter bahwa jurnalis perempuan itu kerap mengalami sakit saat haid. Namun masih ada jurnalis perempuan yang walaupun merasa sakit sekali pada saat haid, tetap memaksakan diri untuk tetap bekerja. Jurnalis Perempuan, kata peserta FGD walaupun mengetahui di UU diatur tentang ini, namun memilih diam saja.
 4. Pemberian ASI (Air Susu Ibu) yang sudah diatur oleh berbagai peraturan, masih juga belum terpenuhi.

Konvensi ILO No 1883 Tahun 2000 Pasal 10 mengenai Ibu Menyusui menyebutkan bahwa, ibu yang menyusui harus diberi hak istirahat harian atau pengurangan jam kerja harian untuk menyusui anaknya. Istirahat dan pengurangan jam kerja harian ini harus dihitung sebagai jam kerja dan dibayar oleh perusahaan. Peserta FGD menilai bahwa perusahaan media sudah ada yang menyediakan fasilitas ruang menyusui. Awalnya, jurnalis perempuan mendesak difasilitasi ruang menyusui dan perusahaan media menyanggupi. Dampaknya, jumlah jurnalis perempuan yang menyusui di perusahaan media pun menjadi banyak. Jurnalis perempuan saling berbagi pengalaman bagaimana menyusui yang tepat dan berbagai tips menyusui lainnya. Peserta FGD menilai bahwa memang kodrat perempuan adalah melahirkan, menyusui dan haid. Sehingga pemenuhan terhadap hak jurnalis perempuan harus dilakukan. Apalagi dukungan pemerintah terhadap penyediaan ruang menyusui sudah diatur dalam PP No 30 Tahun 2012 tentang pemberian ASI Eksklusif. Apabila perusahaan tidak memfasilitasi maka diberikan sanksinya. Namun hingga kini, masih lebih banyak perusahaan media yang tidak menyediakan ruang menyusui. Akibatnya, jurnalis perempuan memilih memeras ASI di toilet yang tidak terjamin kebersihannya.

5. Lantas, apakah ada pengaturan jam kerja malam bagi jurnalis perempuan yang hamil? Menurut peserta FGD, sebaiknya penugasan malam kepada jurnalis perempuan ditiadakan. Terlalu riskan jika kehamilan muda diminta meliput di kawasan yang jauh dan berbahaya. Peserta FGD juga menekankan agar jurnalis perempuan tidak boleh dipecat karena kehamilannya karena ini melanggar UU Ketenagakerjaan. Selain itu, UU juga melarang pemecatan pada perempuan menyusui atau yang sedang keguguran.

6. Terkait diskriminasi, peserta FGD meminta agar tak ada diskriminasi bagi jurnalis perempuan dan laki-laki. Bentuk diskriminasi salah satunya dengan masih adanya perusahaan media yang tidak membiayai biaya persalinan jurnalis perempuan dikarenakan menganggap bahwa biaya persalinan itu telah dibayar kantor suaminya. Ini tentu tak adil. Jurnalis perempuan adalah pekerja yang semestinya ditanggung biaya persalinannya. Selain itu, perusahaan media juga diharapkan mengganti biaya persalinan keluarga inti yang meliputi suami dan anak. Selama ini perusahaan hanya mengganti biaya kesehatan jurnalis perempuan yang telah menikah. Namun tidak mengganti biaya kesehatan suami dan anak. Oleh karena itu, peserta FGD meminta agar perusahaan media juga mengganti biaya kesehatan suami dan anak.
7. Selain itu, peserta FGD menilai bahwa berkurangnya jurnalis perempuan juga bisa diakibatkan pernikahan jurnalis perempuan, memiliki anak serta kurangnya fasilitas di perusahaan media yang mendukungnya sebagai ibu bekerja. Peserta FGD menilai apabila fasilitas di perusahaan media ditambah maka jumlah jurnalis perempuan akan bertambah. Perusahaan media juga diharapkan untuk memberikan kebijakan yang mendukung jurnalis perempuan.

Maka, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah formulasi standar layak kerja jurnalis perempuan. Standar layak kerja ini pertama kali dirumuskan di Solo. Lantas disampaikan dan diperbaiki di Medan. Tak berhenti sampai disitu, standar layak kerja ini diformulasikan secara lebih baik dan dikategorisasikan oleh peserta FGD. Standar layak kerja ini akan disosialisasikan di beberapa kota di Indonesia. Apresiasi kepada perusahaan media yang telah memenuhi standar layak kerja jurnalis perempuan, akan menjadi langkah tindak lanjut. Apresiasi ini diharapkan menjadi contoh bagi perusahaan media yang

menerapkan standar layak kerja jurnalis perempuan.

Selain itu, sosialisasi kepada jurnalis perempuan terkait manajemen laktasi perlu diberikan. Cara ini dilakukan agar jurnalis perempuan mampu memberikan ASI kepada bayinya. Keterlibatan jurnalis perempuan dalam berserikat juga menjadi salah satu cara untuk mendorong agar isu perempuan dimasukkan dalam program serikat pekerja. Peserta FGD juga menilai bahwa standar layak kerja jurnalis perempuan ini juga harus dimasukkan ke dalam peraturan perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Berikut standar layak kerja jurnalis perempuan yang dirumuskan :

Terkait Perlindungan

- Perlindungan dari Perlakuan Diskriminatif Berbasis Gender
- Perlindungan dari kekerasan seksual dan pelecehan seksual
- Perlindungan dari pemutusan hubungan kerja atas dasar kehamilan, keguguran, melahirkan, menyusui dan proses pengasuhan.
- Perlindungan mendapatkan upah penuh selama menjalani masa cuti haid, melahirkan, dan keguguran

Terkait Hak Atas Reproduksi

- Perusahaan media memberikan cuti haid selama 2 hari
- Perusahaan media memberikan cuti melahirkan minimal selama 3 bulan

- Perusahaan media memberikan cuti 1,5 bulan kepada yang mengalami keguguran

Terkait Jam kerja

- Perusahaan media memberikan fleksibilitas kerja kepada jurnalis yang hamil.
- Perusahaan media tidak mempekerjakan jurnalis perempuan dalam kondisi hamil antara pukul 20.00–07.00.

Terkait Fasilitas

- Perusahaan media yang menugaskan jurnalis perempuan antara pukul 20.00-07.00, wajib:
 - a. Memberi makanan dan minuman bergizi
 - b. Menjaga keamanan dan perlindungan dari tindak kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja
 - c. Wajib menyediakan angkutan antar jemput atau pengganti uang transportasi bagi jurnalis perempuan yang berangkat dan pulang kerja
- Perusahaan media wajib memberi kesempatan kepada jurnalis perempuan untuk memberikan ASI kepada bayi atau memerah ASI selama waktu kerja.
- Perusahaan media wajib menyediakan kamar mandi yang layak serta terpisah antara pekerja perempuan dan laki-laki.
- Perusahaan media wajib menyediakan ruang menyusui dan fasilitas penyimpanan ASI perah

- Perusahaan media wajib memberikan jaminan kesehatan kepada setiap jurnalis dan keluarga intinya seperti pelayanan medis, rawat jalan, rawat inap di rumah sakit
- Perusahaan media wajib memberikan biaya minimal untuk empat kali pemeriksaan kehamilan dan biaya persalinan. •

